

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN
(Kasus Di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

NANANG HARIANTO



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
MALANG
2009**

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN
(Kasus Di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)**

Oleh :

NANANG HARIANTO

0410450024-45

SKRIPSI

**Disampaikan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

**Judul :PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN
(Kasus di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang Jawa Timur)**

Nama : NANANG HARIANTO

Nim : 0410450024-45

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS.
NIP. 130 518 966

Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS
NIP. 130 873 498

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS
NIP. 130 936 227

Mengesahkan,
MAJELIS PENGUJI

Dosen Penguji I,

Dosen Penguji II,

Ir. Edi Dwi Cahyono, M. Agr. Sc.
NIP. 131 586 565

Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesni, MS
NIP. 130 935 071

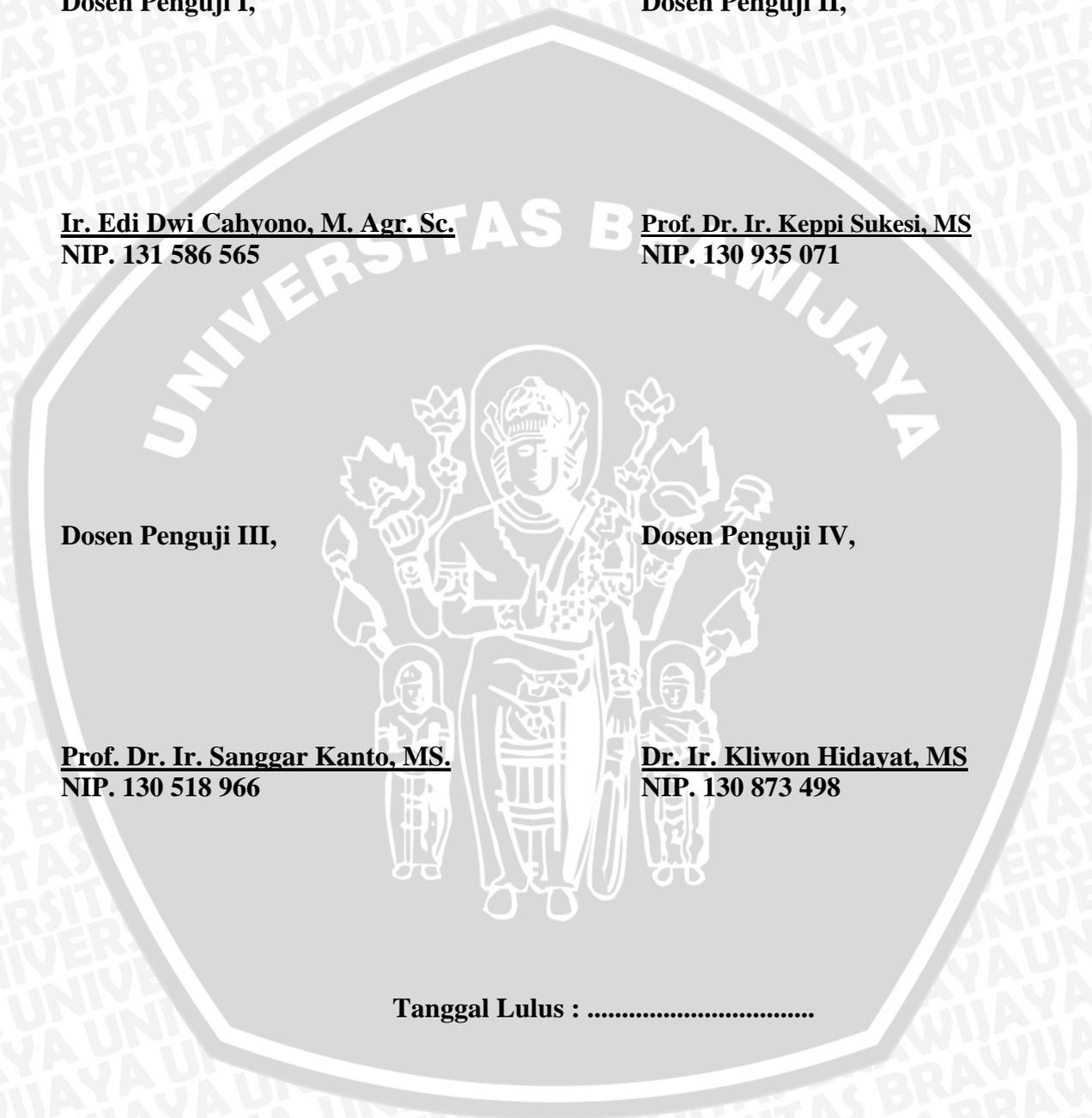
Dosen Penguji III,

Dosen Penguji IV,

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS.
NIP. 130 518 966

Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS
NIP. 130 873 498

Tanggal Lulus :



RINGKASAN

Nanang Harianto. 0410450024-45. Proses Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. (Kasus Di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang). Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS dan Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi pembangunan yang terus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat memuai masalah yang menghambat proses pembangunan. Salah satu masalah utama pembangunan di saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan kemiskinan sudah sangat mendesak untuk ditangani.

Penekanan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju tingkat kemiskinan antara lain program P2KP yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu: 1). Pemberdayaan manusia, 2). Pemberdayaan usaha, 3). Pemberdayaan lingkungan. Dengan adanya program tersebut maka diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah :1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilokasi penelitian? 2. Bagaimana dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di lokasi penelitian?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di lokasi penelitian. 2. Menganalisa dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di lokasi penelitian.

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi instansi pemerintah sebagai masukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan. 2. Bagi peneliti dan mahasiswa memberi wawasan secara lebih mendalam tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk menghendaki penelitian lebih lanjut.

Tipe penelitian ini adalah *Explanatory Research* sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan lokasi yang dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Penentuan responden sebanyak 27 responden dengan metode *Multistage random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan : wawancara dengan kuisioner, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diperoleh : 1. Proses pelaksanaan Program P2KP di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Program P2KP di Desa Wandanpuro dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan kegiatan program yaitu : a) Sosialisasi, b) Rembuk Kesiapan Masyarakat, c)

Refleksi kemiskinan, d) Pemetaan Swadaya, e) Pembentukan BKM, f) Perencanaan Partisipatif, g) Pelaksanaan Pemberdayaan Tridaya (Manusia, Ekonomi dan Lingkungan). Meskipun ada beberapa hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan, akan tetapi dapat diatasi dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat Desa Wandanpuro. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya Program P2KP di Desa Wandanpuro dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. 2. Dampak dari pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang adalah berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin, yaitu terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik setelah dilaksanakannya program P2KP. Dampak yang dirasakan adalah perubahan tingkat kesejahteraan responden, yaitu tingkat kesejahteraan sebelum mengikuti P2KP berada dalam kategori sedang, selanjutnya setelah mengikuti P2KP berada dalam kategori tinggi. Perubahan tingkat kesejahteraan responden tersebut dilihat dari perubahan kepemilikan aset, keadaan pangan, keadaan sandang, keadaan papan, kesehatan dan pendidikan. Dari perubahan tersebut diperoleh perubahan tingkat kesejahteraan responden yang sebelumnya 69,52% menjadi 83,18%, sehingga mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar 13,66%. Perubahan kesejahteraan tersebut dibuktikan dengan hasil analisis Uji Wilcoxon. Yaitu yang diperoleh kesimpulan terjadi perubahan tingkat kesejahteraan responden anggota program P2KP di Desa Wandanpuro. Dengan adanya program P2KP manfaat yang dirasakan responden sebagian besar adalah sangat terbantu dari segi penghasilan yaitu dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga responden. Dengan adanya program P2KP kesejahteraan rumah tangga responden menjadi lebih baik, baik dari kondisi sandang, pangan, dan papan maupun kesehatan dan pendidikan rumah tangga responden.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha perlu di bentuk sebuah wadah organisasi sebagai bentuk kelanjutan dari program pelatihan ketrampilan seperti kelompok-kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) agar kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat tersalurkan. 2. Manfaat dari Program P2KP di Desa Wandanpuro belum dirasakan oleh keseluruhan rumah tangga miskin, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan partisipasi yang aktif dari rumah tangga miskin. 3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan Program P2KP dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin sebagai bentuk perbandingan dengan pelaksanaan program di wilayah lain. Sehingga dapat diketahui solusi-solusi untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program P2KP selanjutnya.

SUMMARY

Nanang Harianto. 0410450024-45. Implementation Process of Poverty Prevention in Urban Area Program and the Impact to Prosperity of Household Destitute (A case in Wandanpuro Village, Bululawang Subdistrict, Malang Regency). Supervised by Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS and Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS

Government development is an initiative to raise human resource quality according to sustainable. However, development strive for achieve society prosperity expand a problem being inhibited a development process. One of main problem is still highest number of destitute inhabitant and joblessness. A poverty problem is a social problem in community. Poverty problem already very urge to handle.

Poverty emphasizing already make by government to compress poverty level among others Process of Poverty Prevention in Urban Area Program. This program consist of three approach are human empowerment, enterprises empowerment and environment empowerment. With this situation then expected can decrease poverty level and increase society prosperity.

Based on that things, so can formulate this research problem are: 1). How implementation process of Poverty Prevention in Urban Area Program in research location? and 2). How the impact of Poverty Prevention in Urban Area Program to poverty of household destitute in research location?

Then, objectives of the research are: 1) To describe of Poverty Prevention in Urban Area Program in research location and 2) To analysis the impact of Poverty Prevention in Urban Area Program to poverty of household destitute in research location.

And, significances of the research are: 1) For government institute as input for poverty prevention and comparison for make certain about project which taken by government and 2) For researcher and student can get insight as reference of Poverty Prevention in Urban Area Program and subject matter comparison for advanced research.

Research method of the research is survey method. Type of the research is explanatory research. My research location at Wandanpuro village, Bululawang subdistrict, Malang regency. And in this research, sampling determination is using purposive sampling. Sampling method of the research is Multistage Random Sampling by 27 respondents. Data collection of the research is interview with questionnaire, observation and documentation.

The result of the research are implementation process of Poverty Prevention in Urban Area Program in Wandanpuro village, Bululawang Subdistrict, Malang regency already done well and conform to government regulation. Implementation process of Poverty Prevention in Urban Area Program in Wandanpuro village followed a stages are a). Socialization, b). Discuss about readiness of the society, c). Poverty reflection, d). Self-supporting mapping, e). Formation of BKM, f). Participation project and g). Implementation of empowerment (human, Economic and Environment). Although, any something inhibited in implementation process, it can be handled and finished by own society in Wandanpuro village. Its thing can be show with implementation process of of Poverty Prevention in Urban Area

Program in Wandanpuro village has abided from 2005 until now. And the second result is the impact of Poverty Prevention in Urban Area Program in Wandanpuro village, Bululawang Subdistrict, Malang regency has a positive impact with prosperity level of household destitute that it has a change of prosperity level better after implementation of of Poverty Prevention in Urban Area Program.

The impact of this program has a change of prosperity correspondent level that is prosperity level before followed Poverty Prevention in Urban Area Program in moderate category and then after followed Poverty Prevention in Urban Area Program in high category. Change of correspondent prosperity level can be seen from change of asset ownership, food, clothing, shelter, health and education. This change of correspondent level before followed Poverty Prevention in Urban Area Program is 69.52% and then become 83.18%, until the prosperity increase as big as 13.66%. Prosperity change evidenced with result analysis in Wilcoxon test. And the conclusion is consist change of correspondent prosperity level especially Poverty Prevention in Urban Area Program members in Wandanpuro village. An advantage of this program for majority correspondent is very helpful from income sector that is can helpful to fulfill every day necessity of household correspondent. With Poverty Prevention in Urban Area Program, prosperity of household correspondent becomes better in food, clothing, shelter, health and education conditions.

From this result, a suggestion can be handed are 1. Implementation of Poverty Prevention in Urban Area Program in Wandanpuro village especially in implementation of enterprises empowerment stage need to create an organization as continuation form for training skill program as groups of UKM to channeled capability of society, 2. An advantage of Poverty Prevention in Urban Area Program in Wandanpuro village not yet feels for all household destitute so need to socializations more intensively and participation actively from household destitute and 3. Needed to continued research about implementation process of Poverty Prevention in Urban Area Program and the impact with prosperity level of household destitute as a comparison shape with implementation process in other region. So it can be known about solutions to overcome problem and barrier in implementation of Poverty Prevention in Urban Area Program furthermore.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Kasus di Desa Wandanpuro Kec Bululawang Kab Malang”.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1) di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian beserta seluruh Dosen dan Staf, atas segala bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian.
2. Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti.
3. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada peneliti.
4. Bapak Budi Sayekti selaku Koordinator BKM Makmur yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian.
5. Bapak dan Ibu serta kakak yang selalu memberikan do'a dan motivasi agar tidak pernah putus asa untuk menjadi lebih baik.
6. Teman-teman seperjuangan PKP '04, terimakasih bantuan, masukan, serta dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

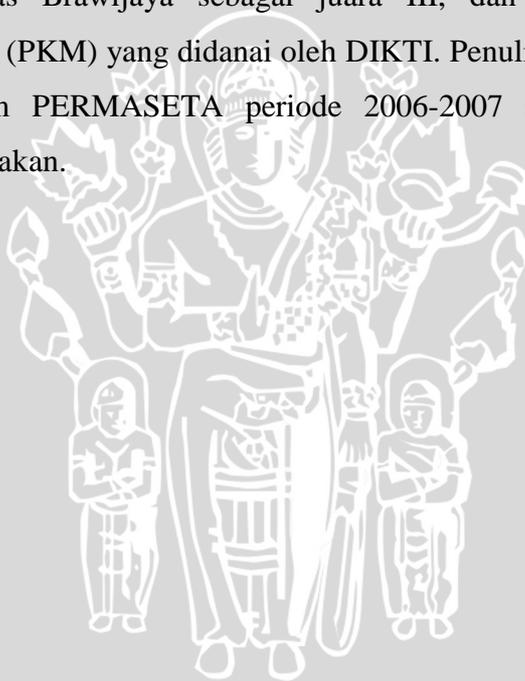
Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik saran yang cerdas yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis sebagai perbaikan, mudah-mudahan tulisan ini dapat berguna bagi kita semua Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, Mei 2009

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Madiun pada tanggal 6 Desember 1985, putra dari Bapak Sardi dan Ibu Nurfiati dan merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 2 Sareng Geger (1992-1998), dan melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Geger (1998-2001), kemudian meneruskan ke SMU Negeri I Geger (2001-2004). Pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan di S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pengalaman penulis selama menjadi mahasiswa pernah menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai juara III, dan Peserta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh DIKTI. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum PERMASETA periode 2006-2007 serta aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Kemiskinan	6
2.1.1. Pengertian Kemiskinan	6
2.1.2. Kriteria Kemiskinan	14
2.1.3. Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia	17
2.1.4. Garis Kemiskinan	19
2.1.5. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan	21
2.2. Konsep Kesejahteraan	26
2.2.1. Pengertian Kesejahteraan	26
2.2.2. Tinjauan Kesejahteraan Rumah Tangga	29
2.2.3. Kondisi Rumah Tangga Miskin	30
2.3. Tinjauan Program P2KP	31
2.3.1. Latar Belakang P2KP	31
2.3.2. Visi dan Misi P2KP	34
2.3.3. Nilai dan Prinsip Landasan Program P2KP	34
2.3.4. Tujuan dan Sasaran Program P2KP	36
2.3.5. Tolak Ukur Kinerja Program P2KP	37
III. KERANGKA KONSEPTUAL	39
3.1. Kerangka Pemikiran	39
3.2. Hipotesis	44
3.3. Batasan Masalah	44
3.4. Definisi Operasional	44
3.5. Pengukuran Variabel	46
IV. METODE PENELITIAN	52
4.1. Metode Penentuan Tempat Dan Waktu	52
4.2. Metode Penentuan Sampel	52
4.3. Metode Pengumpulan Data	54
4.4. Metode Analisis Data	55



V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	59
5.1. Kondisi Geografis dan Batas Administratif	59
5.2. Tata Guna Lahan	59
5.3. Karakteristik Penduduk	60
5.3.1. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	60
5.3.2. Distribusi Penduduk Menurut Umur	61
5.3.3. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	61
5.3.4. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	62
5.4. Sarana dan Prasarana	63
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	65
6.1. Karakteristik Responden	65
6.1.1. Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Berdasarkan Umur	65
6.1.2. Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Berdasarkan Jenis Kelamin	66
6.1.3. Karakteristik Tingkat Pendidikan Anggota KSM Program P2KP	67
6.1.4. Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga	68
6.1.5. Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Berdasarkan Kepemilikan Lahan	68
6.2. Proses Pelaksanaan Program P2KP di Desa Wandanpuro	69
6.2.1. Sosialisasi	70
6.2.2. Rembuk Kesiapan Masyarakat	71
6.2.3. Refleksi Kemiskinan	73
6.2.4. Pemetaan Swadaya	75
6.2.5. Pembentukan Badan Kswadayaan Masyarakat	76
6.2.6. Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Program	79
6.2.7. Pelaksanaan Program P2KP	81
6.3. Dampak Program P2KP di Desa Wandanpuro	88
6.3.1. Uji Rank Wilcoxon Terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin	91
6.3.2. Perubahan Kepemilikan Aset	92
6.3.3. Perubahan Keadaan Pangan	94
6.3.4. Perubahan Keadaan Sandang	95
6.3.5. Perubahan Keadaan Papan	96
6.3.6. Keadaan Kesehatan	98
6.3.7. Keadaan Pendidikan	99
6.3.8. Perubahan Tingkat Kesejahteraan	100
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	105
7.1. Kesimpulan	105
7.2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
Tabel 1.	Variabel Proses Pelaksanaan Program P2KP	46
Tabel 2.	Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Responden Peserta Program P2KP	49
Tabel 3.	Daftar Jumlah Responden dari KSM di Masing-masing RW Desa Wandanpuro	54
Tabel 4.	Tata Guna Lahan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	60
Tabel 5.	Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	60
Tabel 6.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur Penduduk di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	61
Tabel 7.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	62
Tabel 8.	Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	63
Tabel 9.	Potensi Sarana dan Prasarana di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang	64
Tabel 10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Umur	66
Tabel 11.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 12.	Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan	67
Tabel 13.	Karakteristik Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga	68
Tabel 14.	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Luas Lahan	69
Tabel 15.	Kegiatan Pemberdayaan Manusia P2KP	84
Tabel 16.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi P2KP	85
Tabel 17.	Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan P2KP	87
Tabel 18.	Dampak Program P2KP Terhadap Tingkat Kesejahteraan RTM	89
Tabel 19.	Analisis Wilcoxon Terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan Pada RTM	92

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
Gambar 1.	Lingkaran Setan Kemiskinan	12
Gambar 2.	Proses Perhitungan Garis Kemiskinan	21
Gambar 3.	Kerangka Pemikiran Proses Program P2KP dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin	43
Gambar 4.	Persentase Tingkat Kesejahteraan Responden	101



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Daftar Nama Responden	109
2.	Skema Pengambilan Sampel dengan <i>Multistage Random Sampling</i>	110
3.	Skor dan Ranking Kepemilikan Asset RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	111
4.	Skor dan Ranking Keadaan Pangan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	112
5.	Skor dan Ranking Keadaan Sandang RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	113
6.	Skor dan Ranking Keadaan Papan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	114
7.	Skor dan Ranking Kesehatan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	115
8.	Skor dan Ranking Pendidikan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	116
9.	Skor dan Ranking Perubahan Kesejahteraan Keluarga RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP	117
10.	Perhitungan Tingkat Kesejahteraan RTM Responden Sebelum Pelaksanaan Program P2KP	119
11.	Perhitungan Tingkat Kesejahteraan RTM Responden Sesudah Pelaksanaan Program P2KP	120
12.	Nilai Ta Untuk Uji Pangkat Bertanda Wilcoxon	121
13.	Foto Hasil Penelitian	122
14.	Kuisisioner Penelitian	124

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi pembangunan yang terus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat memuai masalah yang menghambat proses pembangunan. Salah satu masalah utama pembangunan di saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan kemiskinan sudah sangat mendesak untuk ditangani.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Penyebab utama kemiskinan adalah sikap mental yaitu sikap dan perilaku manusia yang melunturkan kebersamaan di antara kita, atau merenggangnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial dengan landasan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kejujuran sering disebut sebagai modal sosial masyarakat untuk dipercaya masyarakat lain (P2KP, 2007). Selain itu adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan masyarakat miskin sehingga tidak memiliki akses yang memadai ke sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Sehingga memaksa masyarakat miskin hidup dibawah standar baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial dan politik dimana masyarakat miskin tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka.

Gejala-gejala yang menunjukkan kemiskinan antara lain adalah pendidikan yang rendah yang menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya dan produktivitas, tidak punya ketrampilan sehingga lemah dalam kemampuan berusaha, tidak memiliki modal usaha atau terbatas, kebijakan yang tidak memihak atau diskriminatif, dan adanya pandangan hidup, perilaku atau kebiasaan buruk yang mengakibatkan seseorang menjadi miskin, serta terbatasnya akses kepada ekonomi dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya tersebut telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang konsisten dilakukan oleh Pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas sehingga kebijakan Pemerintah dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program P2KP menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) merupakan salah satu strategi dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat. Tujuan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mendorong penduduk miskin secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami mereka sendiri. Keberdayaan penduduk miskin ditandai oleh semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif yang dapat memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi dan meningkatkan nilai aset keluarga miskin serta meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

Strategi pemberdayaan masyarakat sekarang mulai diarahkan pada pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang mampu menjadi wadah perjuangan masyarakat miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, dan ekonomi maupun lingkungan. Penguatan kelembagaan masyarakat dititikberatkan pada upaya penguatan peran sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat miskin setempat. Melalui kelembagaan masyarakat diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kelembagaan tersebut adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya dan sebagai motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan

program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil program. Sejak pelaksanaan P2KP-1 sampai P2KP-3 saat ini telah terbentuk 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 Kecamatan di 235 kota/kabupaten. Disetiap kelurahan, BKM dan masyarakat menyusun PJM pronangkis secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini sedang dilaksanakan di sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yaitu salah satunya di Kecamatan Bululawang. Program tersebut bagi kecamatan Bululawang dapat dikatakan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di Kecamatan Bululawang.

Pelaksanaan Program P2KP menganut pada pendekatan pemberdayaan sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengacu pada konsep Pembangunan Tridaya sebagai pendekatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Bululawang, yaitu :

1. Pembangunan sosial
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan lingkungan

Program P2KP dilaksanakan di Kecamatan Bululawang sejak tahun 2005 yaitu salah satunya dilaksanakan di Desa Wandanpuro. BKM yang terbentuk bernama BKM Makmur terdiri 48 KSM yang memiliki anggota 229 orang.

Dari beberapa uraian diatas maka diketahui bahwa Program P2KP diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak dari Program P2KP terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program yang

diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang. Akan tetapi, proses pelaksanaan program ini belum terbukti dampak dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang dengan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin.

Terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di lokasi penelitian?
2. Bagaimana dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di lokasi penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di lokasi penelitian.
2. Menganalisa dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di lokasi penelitian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi instansi pemerintah sebagai masukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa memberi wawasan secara lebih mendalam tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk menghendaki penelitian lebih lanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi atau situasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya atau mereka sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (P2KP, 2007). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1986). BPS mengartikan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi dari kebutuhan makanan dan non makanan.

Menurut Kuncoro (1986), mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena makin memburuknya perbandingan antara luas tanah dan jumlah individu, serta memburuknya pola pemilikan atas tanah serta adanya dualisme sosial, ekonomi dan teknologi. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan dan kekuatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan cara kerjanya, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada kepribadian bangsa dan nilai luhur universal dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sosial, dan berkepriadian bangsa Indonesia.

Suparlan (1984), menyatakan kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat bagi mereka yang tergolong tidak miskin, yaitu dari hasil pengamatan yang telah mereka lakukan baik secara sadar, mengenai berbagai gejala sosial yang terwujud dalam masyarakat. Kesadaran akan adanya kemiskinan bagi mereka yang tidak miskin biasanya terwujud pada waktu mereka membandingkan gejala-gejala sosial dengan tingkat kehidupan yang mereka punyai.

Suharto (2006), menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yaitu mencangkup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Secara sosial-psikologis, kemiskinan merupakan kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Dimensi kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor penghambat secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin sendiri seperti rendahnya pendidikan dan hambatan budaya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan resmi yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya (Suharto, 2006).

Menurut Sahdan (2005), kemiskinan telah membatasi hak-hak rakyat yang seharusnya didapatkan untuk kelangsungan hidupnya, antara lain:

1. Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
2. Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum
3. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman
4. Hak rakyat untuk mendapatkan akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau
5. Hak rakyat untuk mendapatkan akses dalam pendidikan
6. Hak rakyat untuk mendapatkan akses dalam kesehatan
7. Hak rakyat untuk memperoleh keadilan
8. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik dan pemerintah

9. Hak rakyat untuk berinovasi
10. Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan
11. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik

BAPPENAS (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, air bersih, pendidikan, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan atau laki-laki.

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain:

1. *Basic Need Approach*, Pendekatan kebutuhan dasar
2. *Income Approach*, Pendekatan melalui pendapatan
3. *Humas Capability Approach*, Pendekatan kemampuan dasar
4. Pendekatan obyek dan subyek

Kemiskinan dilihat sebagai ketidak mampuan (*Lack of oppoicanty*) apabila seorang keluarga dan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi. Ketidak mampuan ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kemiskinan dari segi pendapatan adalah suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu atau garis kemiskinan, terutama disebabkan oleh redahnya penguasaan asset seperti lahan, modal dan kesempatan usaha.

Keterbatasan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan

keputusan. Pendekatan obyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapatan atau pandangan orang miskin sendiri.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang hanya memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita perhari. Sedangkan indikatornya adalah:

1. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun
2. Kepemilikan fasilitas air bersih
3. Prosentase pengeluaran terhadap penghasilan perbulan
4. Kepemilikan rumah
5. Fasilitas penerangan
6. Fasilitas sanitasi
7. Anak usia sekolah yang bersekolah
8. Sumber penghasilan
9. Kemampuan sarana kesehatan

Sahdan (2005), kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen masalah dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Secara umum masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan:

1. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, pendidikan dan kesehatan.
2. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha produktif.
3. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi.
4. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perilaku diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan.

5. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk membebaskan diri dan mental dari bahaya kemiskinan serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Mubyarto (2005), menyatakan bahwa sebagai penyebab kemiskinan dan ketertinggalan desa dalam proses pembangunan adalah karena daerah pedesaan sebagian besar didiami oleh petani yang tetap miskin akibat teknologi primitif, tidak tersedianya irigasi dan lain-lain prasarana desa, kekurangan input pelengkap seperti pupuk dan karena warga desa tidak memiliki atau kekurangan modal. Maka tugas negara dalam proses pembangunan desa pada dasarnya adalah sebagaimana menyediakan input dan memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya.

Menurut Dillon (2003), penyebab kemiskinan di Indonesia bukanlah kurangnya sumber daya alam, melainkan karena faktor non alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Khususnya kelompok-kelompok usaha yang sudah cukup baik dapat memanfaatkan situasi yang tercapai dengan lebih baik karena telah lebih siap secara teknis. Dalam perkembangannya, pertumbuhan untuk pemerataan tidak terjadi dengan mulus, bahkan kesenjangan sosial ekonomi makin dirasakan melebar dan akhirnya terjadi kerusuhan sosial yang memuncak dan mengakibatkan kemiskinan.

Menurut Suparlan (1984), sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi tersebut dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek-aspek yang dipunyai manusia dalam kehidupannya. Karena itu kemiskinan dapat dilihat atau dikaji dari aspek-aspek atau permukaannya yang nampak menonjol sesuai dengan bidang ilmu atau tujuan pengkajian serta dalam dan luasnya jangkauan pengetahuan yang dipunyai oleh orang awam atau khalayak ramai. Aspek-aspek yang dilihat sebagai peranan yang menonjol dalam masalah kemiskinan adalah:

1. Kebudayaan dan sosialnya

Dalam pengertian ini, setiap manusia hidup dalam satuan-satuan sosial yang ada dalam masyarakatnya. Di antara satuan-satuan sosial yang nampak batas-

batasannya antara yang satu dengan yang lainnya adalah satuan-satuan sosial yang terwujud berdasarkan atas perbedaan kesanggupan untuk memperoleh dan memiliki kekayaan dan harta benda yang berharga.

2. Lingkungan

Menginterpretasi lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam pengertian ini kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang operasional dalam menghadapi kehidupan yang nyata sebagaimana yang dihadapi oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Pranata sosial

Pranata sosial adalah sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang tertentu, yang dirasakan diperlukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam pranata-pranata sosial inilah aspek ekonomi yang nampak seolah-olah berdiri sendiri dalam perwujudan masalah kemiskinan, sama dengan aspek-aspek dan mewujudkan masalah-masalah lainnya, melibatkan berbagai aspek-aspek dan mewujudkan masalah-masalah lainnya.

Menurut BAPPENAS (2004), desa hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Prosentasi di daerah perkotaan mengalami penurunan, tetapi prosentase angka kemiskinan di daerah pedesaan justru mengalami peningkatan 60% tahun 1998 menjadi 67% tahun 1999 sebesar 25,1 juta jiwa, sementara di daerah perkotaan hanya mencapai 12,4 juta jiwa. Data tersebut diperkuat laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan.

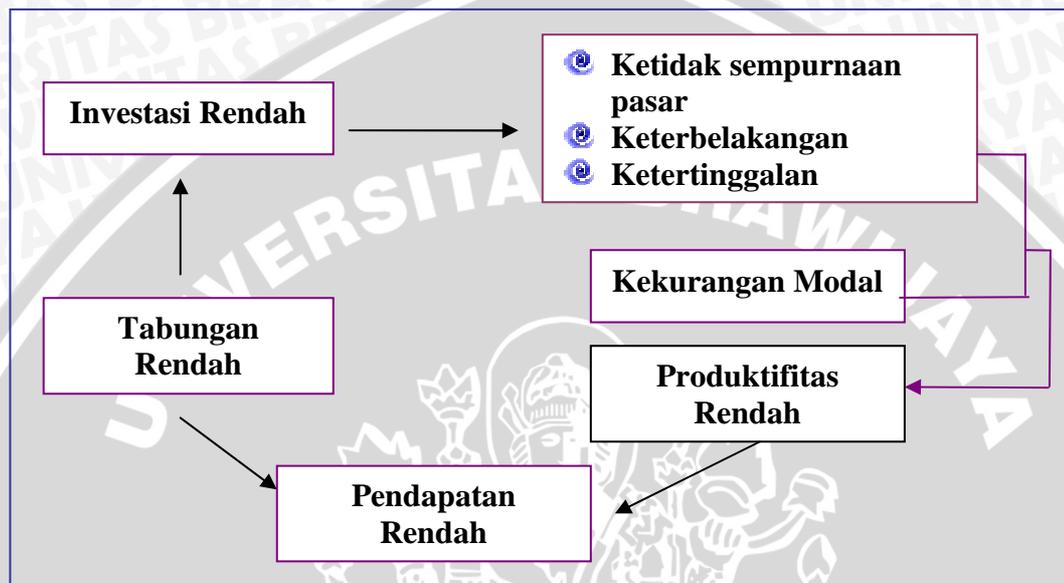
Mengidentifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari sudut pandang dari sisi ekonomi.

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada

gilirannya upah yang diperoleh rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal

Kemiskinan bisa dituntaskan apabila kita bisa memutuskan rantai lingkaran setan seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan

(Kuncoro,1986)

Penyebab utama kemiskinan desa adalah:

1. Pengaruh faktor pendidikan yang rendah
2. Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian
3. Ketidak merataan investasi di sektor pertanian
4. Alokasi anggaran kredit yang rendah
5. Kebijakan pembangunan perkotaan
6. Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional
7. Rendahnya produktifitas dan pembentukan modal
8. Budaya menabung yang belum berkembang dikalangan masyarakat desa
9. Tata pemerintah yang buruk yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan
10. Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa

11. Rendahnya jaminan kesehatan

Robert Cambers (1987) dalam teorinya "*Deprivation Trap*" (lingkaran setan kemiskinan/ jebakan kemiskinan/perangkap kemiskinan) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Perangkap kemiskinan tersebut terdiri dari :

a. Kemiskinan (*property propper*)

Merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil; kekurangan gizi menyebabkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit menjadi rendah, padahal tidak ada uang untuk berobat ke klinik atau dokter; orangpun menjadi tersisih, karena tidak mampu membiayai sekolah, membeli pesawat radio atausepeda, menyediakan ongkos untuk mencari kerja, atau bertempat tinggal di dekat pusat keramaian dan di pinggir jalan besar; orang menjadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan; dan menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah; orang miskin tidak mempunyai suara

b. Kelemahan fisik (*physical weakness*)

Suatu rumah tangga mendorong orang ke arah kemiskinan melalui beberapa cara: tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah; tidak mampu menggarap lahan yang luas, atau bekerja lebih lama, melalui upah yang rendah bagi kaum wanita atau orang-orang yang lemah, serta kelemahan karena sakit. Tubuh yang lemah juga seringkali membuat orang menjadi tersisih karena tidak bisa mengikuti pertemuan-pertemuan untuk mengikuti informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat, terutama bagi kaum wanita yang berkewajiban mengurus anak-anak.

c. Isolasi atau keterasingan (*isolation*)

Isolasi disebabkan karena orang tidak dapat mengakses pendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil, atau berada di luar jangkauan komunikasi. Isolasi akan semakin menopang kemiskinan, karena pelayanan dan bantuan dari

pemerintah tidak akan dapat menjangkau mereka; orang yang buta huruf tentu saja akan terjauh dari informasi yang memiliki nilai ekonomi dan yang sebenarnya mereka perlukan.

d. Kerentanan atau kerawanan (*vulnerability to contingencies*)

Kerentanan adalah salah satu mata rantai yang paling banyak mempunyai jalinan. Faktor ini berkaitan erat dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan; berkaitan dengan kelemahan jasmani untuk menangani keadaan darurat. Waktu dan tenaga mereka ditukar dengan uang untuk mengatasi goncangan mendadak yang dialami. Mereka terkadang menjadi amat bergantung dengan majikannya ataupun dengan orang yang dijadikan gantungan hidupnya.

e. Ketidakberdayaan (*powerlessness*)

Ketidakberdayaan mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya seringkali tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, setidaknya terhalang untuk memperoleh bantuan hukum serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang layak ataupun menolak suku bunga yang tinggi. Orang miskin selalu menempatkan dirinya pada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi jual beli, dan mereka hampir tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, misalnya keputusan tentang bantuan-bantuan yang seharusnya untuk mereka sendiri

2.1.2 Kriteria Kemiskinan

Menurut Awang, *dkk* (1999), bahwa kriteria kemiskinan menurut pamong desa dan tokoh masyarakat antara lain:

1. Pemilikan lahan yang sangat sempit dan bahkan sebagian besar tidak memiliki lahan sama sekali.
2. Kelompok ini tinggal di rumah *gedeg* dengan lantai tanah dan tanpa dilengkapi sarana MCK.
3. Penerangan listrik belum ada dan walaupun ada didapatkan dari bantuan tetangga yang mampu.
4. Pendapatan tidak menentu

5. Tingkat pendidikan kelompok miskin sangat rendah, karena rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar atau buta huruf.

Menurut Sahdan (2005), kriteria kemiskinan dapat dilihat dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat.

Menurut BAPPENAS (2004), indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari :

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya pasokan kalori penduduk miskin dan buruknya gizi bayi, balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang relatif jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas.
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh perempuan dan pembantu rumah tangga perempuan.
5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin tinggal di kawasan nelayan, pinggir hutan, dan pertanian lahan kering yang kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah sering kali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.

6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya oleh penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air bersih.
7. Lemahnya kapastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk berkerja diatas tanah pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan.
9. Lemahnya jaminan rasa aman terhadap masyarakat, terutama yang dirasakan oleh masyarakat miskin.
10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran pertokoan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.
11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar dari pada rumah tangga tidak miskin.

Menurut Bank Dunia (2006) ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS\$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga

tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

2.1.3 Model Pengukuran Kemiskinan di Indonesia.

Model pengukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia dibagi dalam 3 model yaitu: model tingkat konsumsi, model kesejahteraan keluarga, dan model pembangunan manusia.

1. Model Tingkat Konsumsi

Sajogyo (1985) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.

Hampir sejalan dengan Sajogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan – kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan “Garis Kemiskinan” (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

2. Model Kesejahteraan Keluarga

Metode ini dilakukan oleh BKKBN, dengan lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Bila BPS menggunakan rumah tangga, BKKBN menggunakan keluarga. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan

dalam mengentaskan kemiskinan ini, BKKBN melakukan program pendataan keluarga, yang dilakukan setiap tahun. Dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus. Contoh salah satu dari indikator yang digunakan BKKBN dalam pentahapan keluarga sejahtera: Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) yaitu belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: a. Indikator Ekonomi: Makan dua kali atau lebih sehari, Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. b. Indikator Non-Ekonomi: Melaksanakan ibadah, Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

3. Model Pembangunan Manusia

Pendekatan pembangunan manusia dipromosikan oleh lembaga PBB untuk memprogram pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah lewat BPS atau Badan Pusat Statistik turut mengembangkan model pembangunan manusia, yang telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai “Pembangunan Manusia Seutuhnya”. Satu konsep yang melibatkan pembangunan secara lebih komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting diantara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi. Pendekatan sumber daya manusia sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat dari pada sebagai tujuan. Pembangunan kesejahteraan masyarakat sering kali melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pada sebagai

agen perubah dalam proses pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas tingkat kemiskinan dapat digolongkan berdasarkan kepemilikan dan kelayakan hidup yang dijalani oleh masyarakat.

2.1.4 Garis Kemiskinan

Powerty line (garis kemiskinan) adalah tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial. Biasanya dihitung berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk “*keranjang pangan*” yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah. Garis Kemiskinan (GK) digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin. GK didapatkan dari hasil survey modul konsumsi Susenas yang ditetapkan dalam rupiah per orang per bulan. Dengan demikian GK ditetapkan setiap tiga tahun sekali baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi (Cahyat, 2004).

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Selama periode 1976 sampai 1993, telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Dengan menerapkan garis kemiskinan ini kedalam data SUSENAS (Survei Sosial

Ekonomi Nasional) dari tahun 1976 sampai dengan 1987, akan diperoleh persentasi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan (Kuncoro, 1997).

Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal :

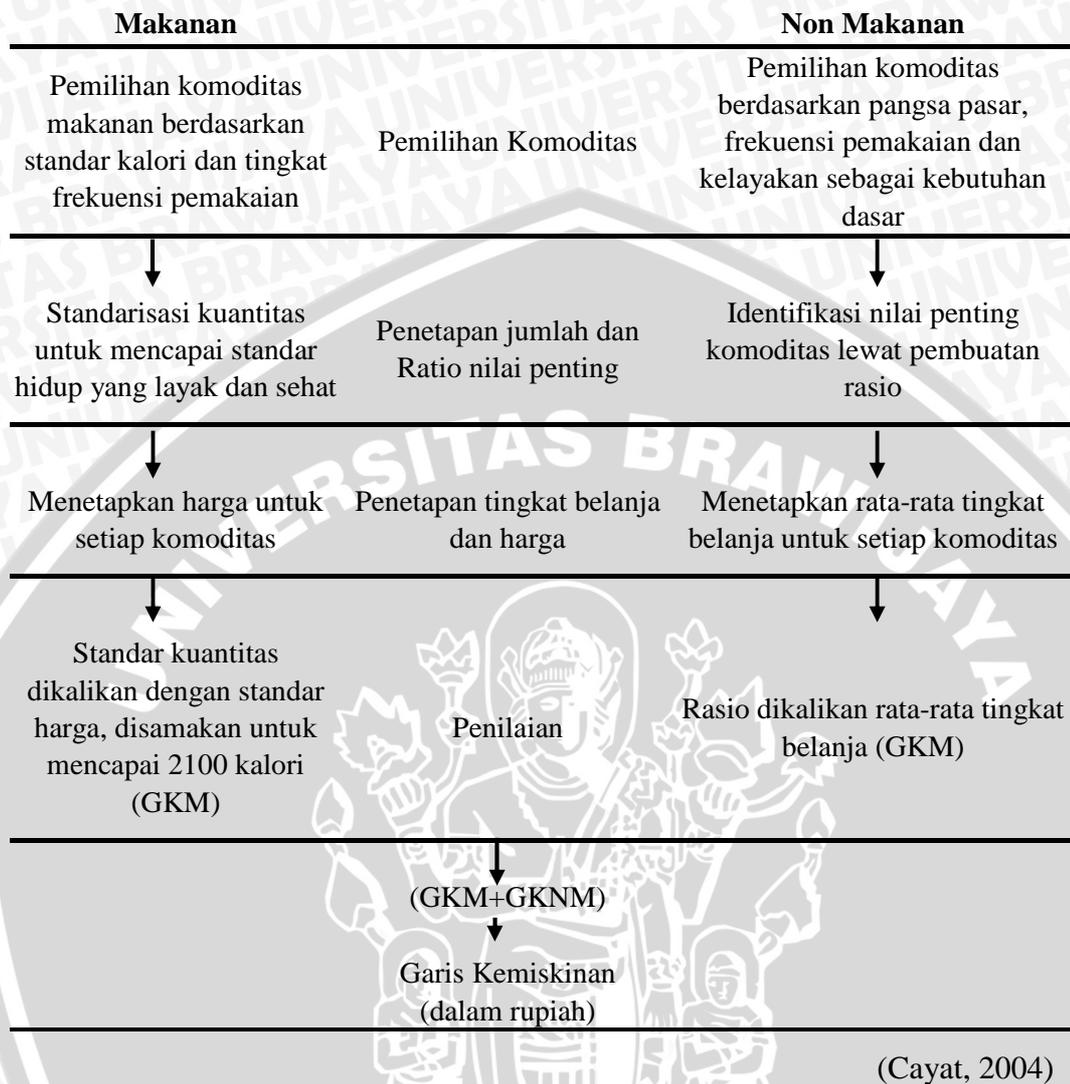
1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan
3. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Dalam hal ini garis kemiskinan dapat tinggi atau rendah. Terhadap posisi manusia dalam lingkungan sosial, bukan ukuran kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya ditengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bernilai gizi cukup dengan nilai protein dan kalori cukup sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya. Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa dan tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal.

Ciri-ciri penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ada lima diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya mereka tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah, modal atau ketrampilan. Sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan asset produksi dengan kekuatan mereka sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah, waktu mereka tersisa untuk mencari nafkah untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di daerah terpencil atau pedesaan.
5. Mereka yang hidup dikota berusia muda dan tidak didukung atau memiliki bekal yang memadai.

Gambar 2. Proses Perhitungan Garis Kemiskinan



2.1.5 Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang konsisten dilakukan oleh Pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggungjawab semua elemen bangsa. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Peran strategis yang harus dilakukan Pemerintah yang harus dilakukan dalam batas-batas dimana kebijakan Pemerintah yang sedang dan yang



akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin, dan lebih khusus lagi bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga miskin.

Menurut Tim P3PK (1994), berbagai intervensi kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini yang mencakup pengalihan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke berbagai jenjang pemerintahan dalam bentuk Inpres yang dimaksudkan untuk merangsang kegiatan ekonomi dan membantun kesempatan kerja di daerah, khususnya di daerah pedesaan, pengadaan berbagai macam pelayanan sosial dan peningkatan akses kaum miskin kepada pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan perluasan jangkauan perkreditan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pada umumnya dan prasarana pertanian pada khususnya, pengembangan kelembagaan yang secara langsung diarahkan untuk menanggulangi rakyat miskin.

Lubis (1983), merumuskan siasat pembangunan yang berkiblat pada kebutuhan setidaknya ada tiga langkah penting yang harus diikuti, antara lain:

1. Kelompok-kelompok sasaran harus ditentukan secermat-cermatnya (golongan orang miskin di desa dan di kota atau petani kecil, buruh tani tidak bertanah dan sebagainya).
2. Penelitian kuantitatif harus dilakukan untuk memperkirakan besar golongan penduduk yang berda di bawah garis kebutuhan pokok minimum dan perkiraan mengenai berapa besar produksi dan besar modal yang harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum ini dalam jangka waktu tertentu.
3. Alat-alat pelaksana harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kebutuhan pokok minimum dapat dipenuhi melalui pasar yang syarat-syarat permintaannya mungkin menuju kearah lain. Ini menuntut perubahan harga, kendali pemerintah dalam beberapa bidang produksi dan penanaman modal dan sistem pelayanan baru untuk menjangkau penduduk miskin dan untuk menarik produktivitas mereka dalam jangka panjang.

Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Program penanggulangan kemiskinan akan berdampak baik apabila ada suasana tentram dan stabil.
2. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup.
3. Program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.
4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri.
5. Pendelegasian wewenang disentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan diupayakan pada tingkatan Pemerintah serendah mungkin.
6. Tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan pada perbaikan pelakunya, terutama manusianya menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan.
7. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan upaya menanggulangi kemiskinan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya komprehensif. Di bidang kesehatan, Pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial, yaitu:

1. Pusat Pelayanan Kesehatan di Tingkat Kecamatan (PUSKESMAS)
2. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
3. Penempatan Bidan Desa
4. Program Keluarga Berencana (KB)

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberikan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.

Dari Bank Dunia dilaksanakan program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa:

1. Kredit Investasi Kecil (KIK)
2. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
3. Kredit Usaha Kecil (KUK)
4. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
5. Kredit Usaha Tani (KUT)

Suharto (2006), menyatakan bentuk-bentuk program penanganan kemiskinan yang dilihat dari pendekatan pekerjaan sosial antara lain :

1. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
3. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Program kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Program penanganan bagian yang hilang atau *the missing piece strategy* meliputi program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan yang dianggap salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau disentuh akan membawa dampak pada aspek lainnya.

Berikut adalah program yang telah dan sedang dilaksanakan, untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain:

1. Program Impres Desa Tertinggal (DIT)
2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
3. Program Kredit Usaha Tani (KUT)
4. Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)
5. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin)
6. Program Dana Bergulir Bahan Bakar untuk Usaha Kecil dan Menengah
7. Program JPS-Bidang Kesehatan
8. Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak, dan sebagainya

9. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
10. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
11. Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra)
12. Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar dan Bangdes

Menurut BPPN (1997), program penanggulangan kemiskinan dapat menjadi gerakan masyarakat miskin menanggulangi kemiskinannya sejauh terciptanya kondisi berikut:

1. Aparat pemerintah harus mengembangkan pendekatan terhadap masyarakat bukannya pendekatan “serba perintah” atau “serba harus”.
2. Rakyat miskin diperdayakan menurut potensi dan nilai-nilai yang dimilikinya dengan pemberian informasi selengkap-lengkapnyanya tentang apa saja yang relevan.
3. Pengembangan ekonomi rakyat diutamakan, bukan saja dari segi dana tetapi juga dari segi kepedulian semua pihak yang mengarah kepada pengembangan ekonomi rakyat.
4. Aparat pemerintah semakin mantap keberdayaannya, baik keberdayaan segi teknis, ekonomi, maupun dalam sikap kepeduliannya terhadap penduduk miskin.

Kebijakan dasar penanggulangan kemiskinan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu, kebijakan yang tidak langsung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kebijakan langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.

1. Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksud antara lain :

1. Suasana sosial politik yang tentram
2. Ekonomi yang stabil
3. Budaya yang berkembang

Selain diatas juga terdapat upaya penggolongan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan perpajakan pengendalian tingkat

inflasi diarahkan pada penciptaan situasi yang konduktif bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Semua itu merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak langsung mengenai masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan atau tunjangan sosial.

2. Kebijakan Langsung

Kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar, serta pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat berpendapatan rendah.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap terus-menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu peningkatan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Hal ini berarti pemberian kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Dalam hubungan ini, Pemerintah Daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan penduduk dikantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat dengan kelompok sasaran pelaksana program yang ditujukan kepada masyarakat miskin akan semakin efektif.

2.2 Konsep Kesejahteraan

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Pada dasarnya pengertian kesejahteraan adalah sangat relatif dan berbeda-beda menurut pendapat masing-masing orang. Seseorang mengatakan bahwa orang lain hidupnya sejahtera, namun orang lain tersebut sebaliknya mengatakan bahwa dirinya tidak sejahtera. Dengan demikian kesejahteraan sulit sekali untuk ditentukan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1986), kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, selama tidak kurang suatu apapun (terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran).

Sejahtera dapat diartikan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman,. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun yang ditimbulkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan penduduk yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat).

Sedangkan ukuran yang dipergunakan sebagai penentu tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang umum adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan, kekayaan dan pekerjaan.
2. Lingkungan kerja
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Ketertiban sosial
6. Milik pribadi yang diinginkan masyarakat
7. Kesempatan rekreasi dan menggunakan waktu senggang.

Ahmad (2005), kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat di manfaatkan dalam suatu proses produksi dan memperoleh imbalan banyak dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang di kuasai maka semakin tinggi tingkat

kesejahteraan yang diraihinya. Demikian sebaliknya, orang menjadi miskin karena tidak punya akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi walaupun faktor produksi itu dirinya sendiri.

Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kesejahteraan ekonomi rumah tangga adalah suatu keadaan kehidupan rumah tangga yang terlepas dari kemiskinan, terpenuhinya kepuasan lahiriah dan peningkatan pendapatan atau kekayaan pekerjaan. Untuk itu kebijaksanaan diarahkan untuk mendorong kesadaran, tanggung jawab dan kemampuan yang diperlukan agar mereka secara bersama-sama atau perorangan dapat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat diupayakan salah satunya dari peningkatan atau perbaikan taraf hidupnya. Peningkatan taraf hidup ini hanya akan bisa dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi melalui peningkatan usaha atau pendapatan dari rumah tangga tersebut. Masyarakat dipedesaan umumnya adalah para petani yang masih menggunakan tata cara atau teknologi tradisional dalam menjalankan usaha taninya. Dalam kondisi ini peningkatan taraf hidup yang menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan merupakan hal yang sulit diwujudkan. Untuk itulah pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan produksi pertanian. Untuk itu selain menyarankan teknologi pertanian yang tepat guna yang telah dilakukan melalui penyuluhan, ternyata kendala utamanya adalah permodalan serta sarana transportasi yang kurang mendukung.

Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan, hal ini bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.
2. Fungsi pencegahan, dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai timbul masalah sosial yang baru.
3. Fungsi pengembangan, untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat hidup secara produktif.
4. Fungsi penunjang, fungsi ini menumpang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang.

Dari konsep tentang kriteria kesejahteraan sosial tersebut diatas, dapat kita pahami bahwa usaha perubahan kearah perbaikan kondisi pada masyarakat dapat

disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial apabila telah memenuhi syarat tersebut diatas, dan sebaiknya usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan harus mencerminkan kepentingan dan kehendak dari masyarakat, sehingga akan mendapat dukungan secara luas.

2.2.2 Tinjauan Kesejahteraan Rumah Tangga

Indikator kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut :

1. Keluarga prasejahtera (sangat miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

1. Makan 2 kali sehari
2. Memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dll)
3. Tingkat kesehatan yang selalu dijaga
4. Rumah yang layak huni
5. Lingkungan bersih dan sehat

2. Keluarga sejahtera I (miskin)

Dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi :

a. Indikator ekonomi

1. Paling tidak seminggu sekali keluarga makan daging/telur/ ikan/ayam
2. Setahun sekali paling kurang seluruh keluarga mendapat pakaian baru
3. Luas lantai rumah paling tidak mencukupi untuk aktivitas sehari-hari

b. Indikator non ekonomi

1. Ibadah teratur
2. Sehat tiga bulan terakhir
3. Punya penghasilan tetap
4. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB
5. Anak sekolah terpenuhi pendidikannya

3. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang meliputi :

1. Memiliki tabungan keluarga

2. Makan bersama sambil berkomunikasi
 3. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 4. Meningkatkan pengetahuan agama
 5. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah
 6. Menggunakan sarana transportasi
4. Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi :

1. Memiliki tabungan keluarga
 2. Makan bersama sambil berkomunikasi
 3. Mengikuti kegiatan masyarakat
 4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 5. Meningkatkan pengetahuan bersama
 6. Menggunakan sarana transportasi
 7. Memperoleh berita dari surat kabar, radio TV dan majalah
5. Keluarga Sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi :

1. Seluruh kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan melimpah
2. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
3. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan
4. Model Pembangunan Manusia

2.2.3 Kondisi Rumah Tangga Miskin

Dalam masyarakat pedesaan terkait erat dengan kemiskinan, biasanya kemiskinan dikaitkan dengan aspek ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka dikatakan hidup dibawah garis kemiskinan kebutuhan hidup paling pokok seperti pangan, pakaian dan tempat berteduh.

Kondisi lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga, seperti didaerah yang terletak di pegunungan dan merupakan lahan kering. Selain gambaran dari segi fisik, mengidentifikasi kehidupan rumah tangga juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan anak-anak mereka, pola konsumsi sehari-hari

dan tingkat pendapatan mereka. Tingkat pendapatan mereka rendah, maka logis jika tingkat pendidikan mereka juga rendah. Disamping kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi rumah tangga miskin adalah pemenuhan kebutuhan pangan, karena merupakan prasyarat utama agar rumah tangga miskin dapat bertahan hidup.

Beberapa indikator menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan rakyat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan rumah tangga serta faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan rakyat, antara lain dapat diungkap secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan yang masih rendah
2. Pengangguran yang masih tinggi
3. Biaya hidup yang tinggi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit
4. Kurangnya penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai keagamaan
5. Kurangnya pemahaman etos berkarya
6. Lambatnya pembangunan sumber daya manusia
7. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia termasuk aparat negara
8. Lemahnya daya dorong perekonomian
9. Tingginya kesenjangan antar daerah
10. Menurunnya penyediaan infrastruktur
11. Lemahnya kelembagaan sosial baik formal maupun non formal
12. Menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan
13. Gangguan keamanan, konflik sosial dan bencana alam, serta kondisi perekonomian yang masih belum stabil

2.3. Tinjauan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

2.3.1 Latar Belakang P2KP

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar

lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

- a. Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
- b. Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
- c. Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
- d. Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
- e. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan atau nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rebug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana *waqaf* bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta

dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai gerakan masyarakat, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

2.3.2 Visi dan Misi P2KP

- a. Visi dari program P2KP adalah terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari.
- b. Misi dari program P2KP adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

2.3.3 Nilai dan Prinsip Landasan Program P2KP

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melandasi program P2KP adalah sebagai berikut :

1. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral)

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah :

- 1) Jujur;
- 2) Dapat dipercaya;
- 3) Ikhlas/kerelawanan;

- 4) Adil;
- 5) Kesetaraan;
- 6) Kesatuan dalam keragaman;

2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance)

Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (*Good Governance*) yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP adalah :

- 1) Demokrasi; 2) Partisipasi;
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas;
- 4) Desentralisasi;

3. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya)

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.

- a. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
- b. Pengembangan Masyarakat (*Sosial Development*); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan

marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

- c. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*); dalam upaya menyasrakan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.

2.3.4 Tujuan dan Sasaran Program P2KP

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut :

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya,
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait,

dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM),

3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai dari Program P2KP ini, yaitu:

1. Membangun / mengembangkan organisasi masyarakat warga yang aspiratif dan akuntabel memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin.
2. Mendorong pemerintah daerah agar lebih mampu dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat miskin melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin dalam hal akses pelayanan pendanaan, jaminan sosial, dan prasarana lingkungan permukiman.

Setidaknya ada tiga kelompok sasaran masyarakat yang ingin disentuh melalui P2KP, yaitu :

1. Masyarakat kelurahan; yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga).
2. Pemerintah daerah; yaitu perangkat pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan.
3. Para pihak terkait lainnya; yaitu seluruh pihak terkait di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan aparat pemerintahan daerah seperti: Perbankan, LSM, Perguruan Tinggi setempat, dan Lembaga-lembaga keuangan.

2.3.5 Tolak Ukur Kinerja Program P2KP

Dalam pelaksanaan P2KP dikembangkan beberapa tolak ukur kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan program

secara dini. Tolak ukur kinerja P2KP didasarkan pada aspek-aspek masukan atau input, proses, keluaran atau output dan dampak.

Tolak ukur aspek masukan meliputi antara lain :

1. Jumlah kelurahan yang mendapatkan bantuan, dan
2. Jumlah fasilitator menurut ukuran layanan terhadap jumlah penduduk penerima bantuan.

Tolak ukur aspek keluaran meliputi antara lain :

1. Jumlah usulan yang diajukan,
2. Persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai,
3. Pengembalian pinjaman pertahapan,
4. Modal awal,
5. Bunga,
6. Persentase penyelesaian pekerjaan, dan
7. Audit jumlah kelurahan terpilih.

Tolak ukur aspek dampak, meliputi antara lain :

1. Tingkat kepuasan penerima bantuan,
2. Persentase jumlah orang yang diteliti, yang mengetahui keberadaan program,
3. Persentase jumlah orang yang diteliti yang merasa puas dengan keberadaan program, dan
4. Adanya pertumbuhan peningkatan modal yang berputar dikelurahan sasaran.

III. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Pemikiran

Secara umum kemiskinan seringkali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap layak. Dalam kehidupannya masyarakat miskin secara layak dan tidak berdaya menghadapi tantangan pembangunan yang terjadi dengan ciri-ciri seperti tidak memiliki akses dan sarana yang memungkinkan dalam mengambil keputusan politik yang menyangkut hidupnya, rendahnya penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, tidak terintegrasikan masyarakat miskin dalam institusi sosial formal dan terinternalisasikannya budaya kemiskinan, dan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap berbagai hal yang menjadi modal hidup mereka. Adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan menyebabkan mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena institusi pengambil keputusan tidak mampu menerapkan nilai – nilai luhur universal atau tidak adil dimana penyebab utamanya adalah dikarenakan sikap mental atau sikap dan perilaku manusia atau seseorang yang tidak berdaya sehingga solidaritas sosial semakin merenggang.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu adanya upaya-upaya untuk merubah kondisi ketidakberdayaan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berdaya yang mampu mengatasi kemiskinan yang dialaminya secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat yaitu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). P2KP merupakan suatu upaya pemerintah yang bertujuan kepada suatu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam proses pelaksanaannya, program P2KP menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) merupakan salah satu strategi dalam menanggulangi kemiskinan

masyarakat. Tujuan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mendorong penduduk miskin secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami mereka sendiri. Pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat merupakan titik kunci dalam proses pelaksanaan Program P2KP dimana secara keseluruhan kegiatan dalam pelaksanaan komponen tersebut melibatkan masyarakat. Pelaksanaan program P2KP dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat dan tahap pelaksanaan komponen dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Untuk menjawab tujuan penelitian ini dalam pelaksanaan program P2KP secara keseluruhan terdapat dalam tahap pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat yaitu tahap-tahap pelaksanaan program P2KP yang diawali dengan sosialisasi sampai pelaksanaan program.

Proses pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat merupakan variabel dalam proses pelaksanaan program P2KP yang menjadi 7 variabel yaitu sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, pembentukan Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM), Perencanaan partisipatif, dan pelaksanaan Tridaya. Ke tujuh variabel tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Sosialisasi**, dapat dilihat dari keterwakilan dari masyarakat rumah tangga miskin yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tentang P2KP kemasyarakat dan membangun kesadaran tentang kemiskinan.
2. **Rembuk Kesiapan Masyarakat**, untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial, serta menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. **Refleksi Kemiskinan** adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi masyarakat mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat.

4. Kegiatan **Pemetaan Swadaya**, untuk mengenal, memahami, dan menggali persoalan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan wilayahnya.
5. Membangun organisasi dan kelembagaan masyarakat: **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)** dengan pembelajaran warga mengenai kepemimpinan yang berbasis nilai, aspiratif, dan akuntabel.
6. **Perencanaan Partisipatif** melalui sejumlah rembuk warga, dan penyusunan PJM Pronangkis di tingkat kelurahan
7. **Pelaksanaan Prinsip Tri-Daya** (Sosial-Ekonomi-Lingkungan), melalui pemanfaatan dana BLM, merencanakan, dan mengelola keberlanjutannya melalui Unit pengelola keuangan (UPK). Pemanfaatan dana BLM ini dapat berupa santunan sosial, pinjaman bergulir untuk pengembangan usaha mikro, dan pembangunan perbaikan untuk prasarana dasar lingkungan permukiman.

Dampak dari program P2KP akan ditunjukkan dengan tercapainya tujuan sesuai dengan target yang diharapkan dan ada atau tidaknya peningkatan kesejahteraan dari sebelum dilaksanakan program P2KP dan sesudah dilaksanakan program P2KP dari rumah tangga miskin. Berdasarkan latar belakang dan kenyataan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak program P2KP terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. Terdapat 6 variabel tingkat kesejahteraan antara lain: kepemilikan aset, keadaan pangan, keadaan sandang, keadaan papan, kesehatan dan pendidikan. Dari keenam variabel kesejahteraan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

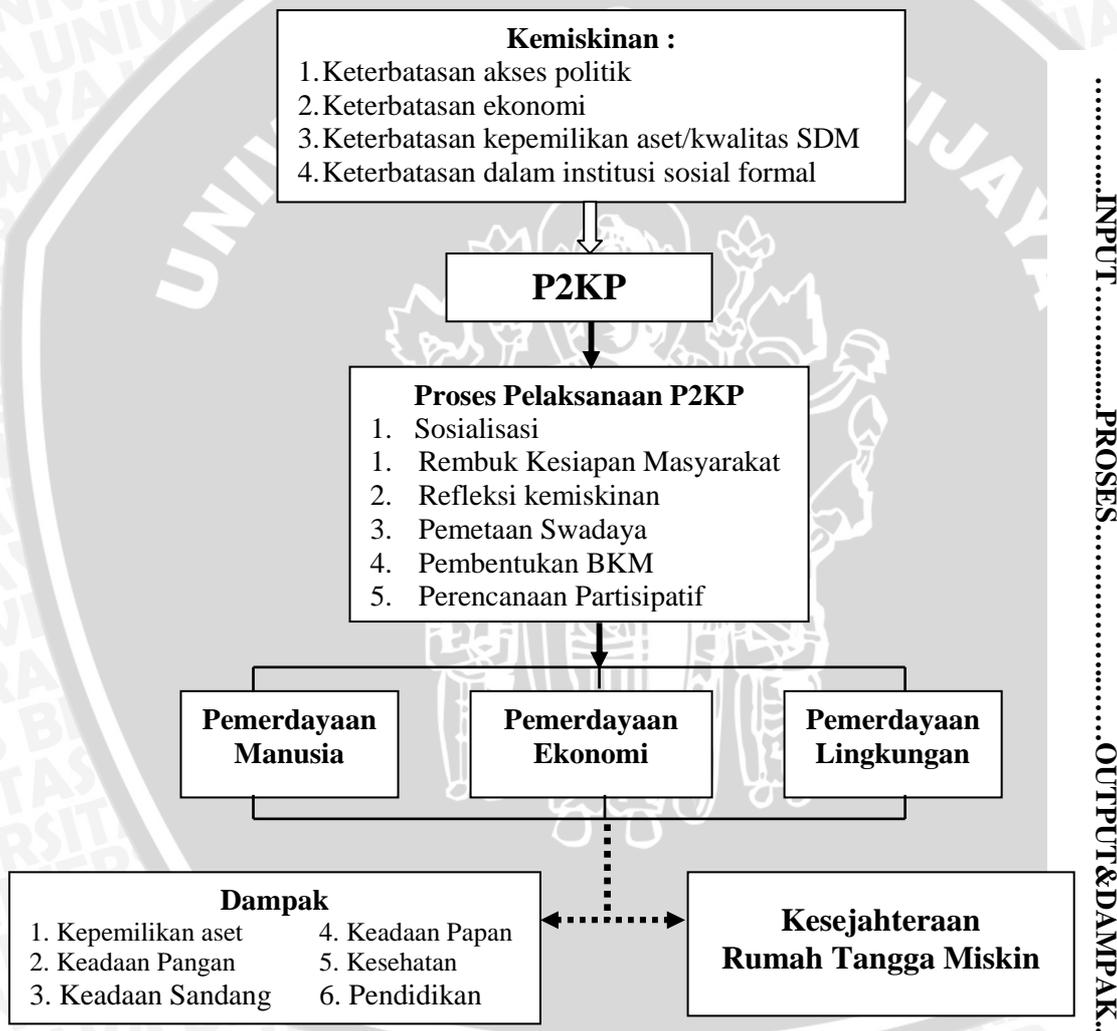
14. Kepemilikan aset dihitung dari jumlah kepemilikan dari kekayaan atau harta yang dimiliki keluarga. Apabila terjadi peningkatan dari jumlah kepemilikan aset sebelum mengikuti program P2KP dan sesudah mengikuti program P2KP maka dapat dikatakan berdampak positif terhadap tingkat kepemilikan aset. Maka program P2KP ini layak untuk dikembangkan.
15. Keadaan pangan dapat dilihat dari frekuensi makan dalam setiap hari. Frekuensi makan pada umumnya dilakukan 3 kali dalam sehari. Apabila frekuensi makan tersebut telah dilakukan maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dikatakan sederhana. Hal ini dapat dibuktikan apakah sebelum program P2KP dan sesudah program P2KP terjadi perubahan pola makan atau frekuensi makan dalam satu hari.

16. Keadaan sandang dilihat dari tercukupinya pakaian yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini kurang bisa dikatakan kesejahteraan berhasil apabila diukur dari kepemilikan pakaian maka pengukuran kesejahteraan yang dilihat dari variabel kesejahteraan keadaan sandang, maka dilihat dari presentase pembelian pakaian baru dari setiap tahunnya. Dikatakan sejahtera apabila sekurang-kurangnya anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setiap tahunnya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan dapat terukur dengan baik.
17. Keadaan papan, fasilitas rumah huni yang ada didalam masyarakat merupakan salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan. Keadaan rumah yang ada meliputi keadaan lantai, tembok dan fasilitas MCK serta sarana air bersih yang tersedia juga merupakan menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Keadaan rumah (papan) dilihat dari bangunan rumah misalnya keadaan rumah yang masih gedhek, lantai tanah dan atap genteng
18. Sedangkan variabel kesehatan dilihat dari tingkat kesehatan yang ada di keluarga tersebut apabila ada anggota keluarga yang sakit diperiksa ke dokter atau di bawa ke puskesmas ataupun di dibawa ketukang pijat (dukun). Kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam hal kesehatan adalah tempat yang jauh dari puskesmas atau pusat kesehatan, biaya berobat dan ketergantungan masyarakat menggunakan obat yang terjual bebas serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan sebagainya. Dengan demikian tingkat kesehatan masyarakat sulit untuk dikontrol sehingga masyarakat sering mengalami penyakit yang terlambat terdeteksi.
19. Variabel pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan anggota keluarga yang berusia sekolah. Di dalam keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga yang berusia sekolah bersekolah semuanya atau ada yang tidak dapat bersekolah karena faktor biaya yang kurang mendukung sehingga harus berhenti sekolah. Penilaian ini merupakan dapat menjadi patokan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut

Apabila variabel kesejahteraan ini telah diukur dan diketahui maka akan terlihat dampak program P2KP terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin dengan membandingkan ekosistem sebelum mengikuti program dan ekosistem

sesudah mengikuti program. Dengan terukurnya tingkat kesejahteraan RTM sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program P2KP ini maka akan terlihat dampak program P2KP yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro tersebut apakah program berdampak positif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan RTM atau berdampak negatif yang tidak terdapat peningkatan kesejahteraan RTM.

Adapun gambar dari kerangka pemikiran proses program P2KP dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Proses Program P2KP Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.

Keterangan :

- : Faktor yang mempengaruhi
- : Proses
- : Dampak

3.2. Hipotesis

Diduga pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro berdampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (RTM).

3.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada BKM Makmur Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang menerima program P2KP dari tahun 2005 sampai sekarang.
2. Penelitian ini dibatasi pada proses pelaksanaan program P2KP tahap komponen pemberdayaan masyarakat dan dampak dari program P2KP.
3. Dampak yang diukur adalah tingkat kesejahteraan yang meliputi kepemilikan aset, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dengan membandingkan tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya program P2KP.

3.4. Definisi Operasional

1. Program P2KP adalah salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : di selenggarakan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tahap – tahap pelaksanaan seperti :
 - a. Sosialisasi
 - b. Rembuk Kesiapan Masyarakat
 - c. Refleksi kemiskinan
 - d. Pemetaan Swadaya
 - e. Pembentukan BKM
 - f. Perencanaan Program
 - g. Pelaksanaan Program pemberdayaan(manusia, usaha dan lingkungan)
2. Proses pelaksanaan P2KP adalah rangkaian atau tahapan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

3. Dampak program P2KP adalah sejauh mana program yang diberikan menjangkau sasaran secara luas, tepat sasaran dalam arti mencakup masyarakat miskin di pedesaan dan golongan ekonomi lemah yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dapat dilihat perbedaan sebelum diadakan program dan sesudah diadakan program P2KP.
4. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah keadaan rumah tangga yang sangat memprihatinkan dan serba kekurangan sehingga sulit menjalani kehidupan dengan normal dan baik.
5. Kesejahteraan rumah tangga adalah kondisi rumah tangga yang kebutuhan pokok anggota keluarga sudah terpenuhi atau tercukupi meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, memiliki aset dan tidak serba kekurangan.
 - a. Kesehatan adalah keadaan sehat dari badan, dalam hal ini bila ada anggota keluarga yang mengalami sakit pengobatannya yang sering dibawa ke dokter/puskesmas.
 - b. Kepemilikan aset adalah kepemilikan terhadap barang atau harta yang dapat dinilai, dalam hal ini adalah luas lahan sawah, alat transportasi, alat komunikasi, alat hiburan dan kepemilikan ternak.
 - c. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan yang dinilai adalah pendidikan formal yang dilakukan oleh anak responden pada usia sekolah.
 - d. Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) adalah sarana tempat untuk mandi cuci dan buang hajat yang dimiliki oleh rumah tangga yang ikut dalam program P2KP.
 - e. Pangan adalah makanan, dalam hal ini kebiasaan makan dari responden dan keluarganya dalam sehari.
 - f. Rumah adalah tempat keluarga bertempat tinggal tetap yang memenuhi kesehatan. Rumah yang berlantai tanah kurang memenuhi kesehatan.

3.5 Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Pelaksanaan Program P2KP

Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka untuk menjawab permasalahan dan tujuan yang pertama untuk variabel dan indikator proses pelaksanaan program P2KP dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Variabel Proses Pelaksanaan Program P2KP

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
Mendiskripsikan Proses pelaksanaan Program P2KP	Proses pelaksanaan Program P2KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi program P2KP yang telah dilakukan 2. Kegiatan Rembuk Kesiapan Masyarakat program P2KP 3. Kegiatan Refleksi kemiskinan program P2KP 4. Kegiatan Pemetaan swadaya program P2KP 5. Langkah-langkah pembentukan BKM 6. Kegiatan penyusunan rencana kerja kelompok 7. Pelaksanaan Program P2KP <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pemberdayaan manusia yang dilakukan b. Kegiatan pemberdayaan usaha yang dilakukan c. Kegiatan pemberdayaan lingkungan yang dilakukan

3.5.2 Variabel Tingkat Kesejahteraan RTM

Untuk melihat dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga akan dianalisis sebelum dan sesudah program P2KP yang sudah dilaksanakan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tahun 2007. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa keluarga telah memenuhi kebutuhan dasarnya seperti yang telah ditetapkan BKKBN. Untuk melihat dampak dari program P2KP terhadap kesejahteraan menurut BKKBN maka digunakan 6 variabel yang dijadikan parameter.

1. Kepemilikan aset

Kepemilikan aset dihitung dengan menilai jumlah kepemilikan harta atau benda yang dimiliki keluarga seperti luas lahan sawah, kepemilikan ternak, alat transportasi, alat komunikasi, alat hiburan. Berdasarkan perhitungan tersebut maka penilaian tertinggi akan mendapatkan skor 3.

2. Keadaan Pangan

Berdasarkan konsep kesejahteraan menurut Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa keluarga dikatakan sejahtera apabila seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. Frekuensi makan 2 kali sehari memang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan frekuensi konsumsi daging/ikan/telur dalam setiap minggunya. Jika dikonsumsi setiap hari maka mendapat penilaian 3.

3. Keadaan sandang

Menurut BKKBN bahwa keluarga dikatakan sejahtera apabila sekurang-kurangnya anggota keluarganya memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun terakhir. Sedangkan berdasarkan survei pendahuluan yaitu dengan observasi dan wawancara awal kepada anggota Program P2KP didapatkan hasil bahwa mereka beranggapan dengan memiliki dua stel pakaian sudah cukup bagi mereka dikatakan sejahtera. Untuk itu peneliti memberikan skor tiga untuk keluarga yang mendapatkan dua stel baju baru dalam waktu satu tahun.

4. Keadaan Papan

- a. Rumah

Untuk penilaian keadaan rumah dilihat dari luas rumah, keadaan lantai, dinding rumah, tembok rumah dan atap rumah yang ditempati sehari-hari. Selain itu, juga dilihat dari keadaan penerangan rumah. Keadaan lantai diskor 3 jika lantai keramik atau tegel, 2 jika plester dari semen dan 1 jika lantai masih tanah. Dan untuk dinding di skor 3 jika dindingnya dari tembok dan sudah diplester, skor 2 jika dinding tembok belum diplester dan 1 jika masih belum tembok atau dari papan dan gedeg.

b. Air Bersih dan MCK

Kebiasaan masyarakat untuk memperoleh sumber air bersih mencerminkan usaha masyarakat untuk hidup sehat. Disadari bahwa air yang paling higienis adalah air ledeng (PDAM, PAM), namun untuk mendapatkannya masih tergolong mahal dan terbatas. Konsumsi air yang sumbernya dari alam seperti mata air dan sungai untuk daerah pedesaan masih lebih banyak. Bila keluarga memiliki air bersih dan sarana MCK sendiri mendapatkan skor 3, terdapat air bersih dan MCK umum mendapat skor 2, tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya mendapat skor 1.

5. Kesehatan

Tingkat kesadaran masyarakat akan arti hidup sehat merupakan syarat mutlak terwujudnya suatu kehidupan yang baik secara jasmani dan rohani. Hidup sehat tentunya harus ditunjang oleh penyediaan rumah sakit dan puskesmas. Untuk tingkat kesehatan dilihat dari layanan pengobatan yang sering digunakan bila anggota keluarga sakit. Jika dibawa ke dokter khusus mendapatkan skor 3, jika dibawa ke puskesmas mendapatkan skor 2, dan jika ke dukun atau tukang pijat mendapat skor 1.

6. Pendidikan

Keluarga dikatakan sejahtera apabila kebutuhan akan pendidikan terpenuhi. Gambaran dapat ditunjukkan melalui tingkat kecerdasan penduduk yang mencakup: kepandaian dalam membaca dan menulis, keterlibatan penduduk dalam jenjang/tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka putus sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan kriteria tersebut keluarga yang semua anak usia sekolah bersekolah mendapatkan skor 3, ada anak usia sekolah tidak bersekolah mendapatkan skor 2, semua anak usia sekolah tidak bersekolah mendapat skor 1.

Tabel 2. Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Responden Peserta Program P2KP

Variabel	Indikator	Skor
Kesejahteraan Rumah Tangga	A). Kepemilikan aset anggota program P2KP	
	1. Luas kepemilikan lahan sawah	
	a. > 0,77ha	3
	b. 0,33 – 0,77ha	2
	c. < 0,33ha	1
	2. Kepemilikan ternak	
	a. Sapi (.....ekor)	3
	b. Kambing (.....ekor)	2
	c. Ayam (.....ekor)	1
	3. Alat transportasi	
	a. Mobil, sepeda motor, sepeda (..Unit)	3
	b. Sepeda motor, sepeda (..Unit)	2
	c. Sepeda (..Unit)	1
	4. Alat komunikasi	
	a. Telepon rumah dan Hand Phone	3
	b. Telepon rumah atau Hand Phone saja	2
	c. Tidak punya	1
	5. Alat hiburan / elektronik	
	a. TV, DVD, Tape, radio (.....unit)	3
	b. TV dan Radio (.....unit)	2
	c. Radio atau Tape (.....unit)	1
	B). Keadaan Pangan	
	1. Frekuensi makan anggota keluarga	
	a. Frekuensi makan lebih dari 2 kali dalam sehari	3
	b. Frekuensi makan 2 kali dalam sehari	2
	c. Frekuensi makan kurang dari 2 kali dalam sehari	1
	2. Konsumsi (Makan) daging atau ikan atau telur dalam keluarga	
a. Setiap hari	3	
b. Seminggu sekali	2	
c. 2 minggu sekali	1	
C). Keadaan sandang		
a. Lebih dari cukup (masing-masing anggota keluarga mendapatkan 2 stel pakaian baru dalam 1 tahun)	3	
b. Cukup (masing-masing anggota keluarga hanya mendapatkan 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun)	2	
c. Kurang (masing-masing anggota		

	keluarga tidak mendapatkan pakaian baru dalam 1 tahun)	1	
	D). Keadaan Papan		
	1. Luas rumah		
	a. Lebih besar dari 8m ²	3	
	b. Standart 8m ²	2	
	c. Lebih kecil dari 8m ²	1	
	2. Keadaan lantai rumah		
	a. Lantai keramik/tegel	3	
	b. Plester semen	2	
	c. Tanah	1	
	3. Keadaan tembok rumah		
	a. Tembok plester	3	
	b. Tembok tidak plester	2	
	c. Gedheg/papan	1	
	4. Keadaan atap rumah		
	a. Genteng	3	
	b. Seng	2	
	c. Ijuk	1	
	5. Keadaan penerangan rumah		
	a. Listrik sendiri	3	
	b. Listrik ikut orang lain	2	
	c. Petromak	1	
	6. Persediaan air bersih dan MCK rumah		
	a. Memiliki air bersih dan MCK sendiri	3	
	b. Memiliki air bersih dan MCK milik umum	2	
	c. Tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya	1	
	E). Layanan Kesehatan yang sering digunakan anggota keluarga jika sakit		
	a. Dokter khusus	3	
	b. Puskesmas	2	
	c. Dukun/tukang pijat	1	
	F). Pendidikan		
	a. Semua anak usia sekolah bersekolah	3	
	b. Ada anak usia sekolah tidak bersekolah	2	
	c. Semua anak usia sekolah tidak bersekolah	1	
	Skor Maksimal	48	
	Skor Minimal	16	

Keterangan Skor

Skor maksimum variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin = $16 \times 3 = 48$

Skor minimum variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin = $16 \times 1 = 16$

$$\text{Selang Kelas} = \frac{48-16}{3} = 10.6$$

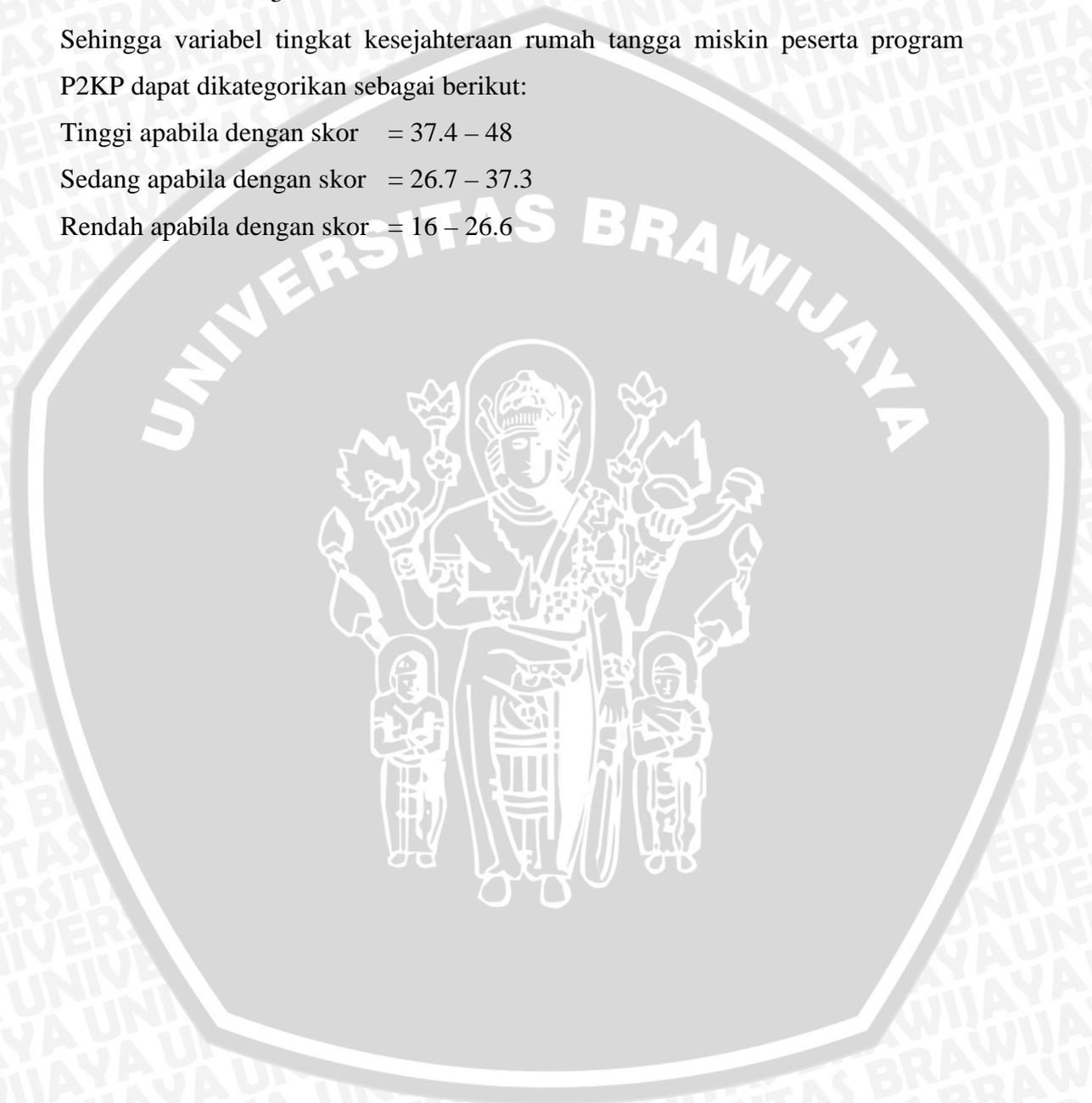
Sehingga variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin peserta program

P2KP dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tinggi apabila dengan skor = $37.4 - 48$

Sedang apabila dengan skor = $26.7 - 37.3$

Rendah apabila dengan skor = $16 - 26.6$



IV. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian *Explanatori (Explanatory Research)*. Menurut Singarimbun (1995) bahwa penelitian penjelasan atau *explanatory research* merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian fokus penelitian penjelasan atau *explanatory* terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel.

4.1. Metode Penentuan Tempat Dan waktu

Dalam hal ini lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*puporsive*) yaitu di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Dengan pertimbangan bahwa desa Wandanpuro mulai mendapat program P2KP sejak tahun 2005 dan telah melakukan pembangunan di berbagai bidang serta program P2KP masih dilaksanakan di desa tersebut sampai sekarang.

4.2. Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang mengikuti program P2KP di Desa Wandanpuro. Populasi tersebut terbagi dalam kelompok kecil yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berjumlah 48 KSM yang diwadahi oleh satu Badan Kswadyaan Masyarakat (BKM) Makmur. BKM Makmur merupakan BKM satu-satunya yang dibentuk masyarakat desa Wandanpuro.

Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan secara *Multistage Random Sampling* (teknik random bertahap). Penentuan sampel jenis ini ditentukan dengan menggunakan dua tahap atau lebih. Populasi dibagi-bagi dalam lapisan, kemudian sejumlah lapisan dipilih (tahap pertama). Setiap lapisan yang dipilih dibagi-bagi dalam kelompok. Dari setiap lapisan yang dipilih pada tahap pertama, dipilih lagi sejumlah kelompok (tahap kedua). Begitulah seterusnya dengan seberapa tahap berikutnya (Hidayat,1989).

Untuk menentukan sampel yang akan di ambil, berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Tahap pertama adalah membagi populasi dalam lapisan-lapisan, dimana dalam 1 desa terdapat 9 rukun warga yang tergabung dalam BKM Makmur.
2. Tahap kedua adalah membagi KSM yang tersebar di masing-masing RW secara berdasarkan RW masing-masing KSM. Dimana pada RW 1 terdiri dari 3 KSM, RW 2 terdiri dari 4 KSM, RW 3 terdiri dari 8 KSM, RW 4 - 6 terdiri masing-masing 6 KSM, RW 7 - 9 terdiri masing-masing 5 KSM sehingga totalnya 48 KSM. Kemudian secara random dari RW 1 diambil 1 KSM, RW 2 diambil 2 KSM, RW 3 diambil 5 KSM, RW 4 diambil 4 KSM, RW 5 diambil 3 KSM, RW 6 diambil 3 KSM dan RW 7-9 diambil masing-masing 2 KSM. Dimana jumlah ini diharapkan sudah dapat mewakili jumlah KSM yang ada pada RW tersebut dan diperoleh 24 KSM yang masing-masing KSM memiliki anggota petani.
3. Kemudian tahap terakhir adalah menentukan sampel dari masing-masing sampel KSM dengan metode random. Dari setiap KSM pada RW yang menjadi sampel diambil sampel petani secara random sebanyak 20% dari anggota populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006), dalam teknik pengambilan sampel secara random bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15%, atau 20-25% atau lebih. Sampel sebesar 20% diharapkan cukup representatif untuk memperoleh data berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Dari tahapan-tahapan diatas untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 tentang jumlah petani sampel yang diambil dari KSM di Desa Wandanpuro, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah Responden Dari KSM di Masing-masing RW Desa Wandanpuro

No	RW	Jumlah KSM	Jumlah populasi RTM	20% dari populasi sampel	Jumlah sampel yang diambil
1	RW 1	1 KSM	4	0.8	1
2	RW 2	2 KSM	11	2.2	2
3	RW 3	5 KSM	26	5.2	5
4	RW 4	4 KSM	24	4.8	5
5	RW 5	3 KSM	20	4	4
6	RW 6	3 KSM	21	4.2	4
7	RW 7	2 KSM	9	1.8	2
8	RW 8	2 KSM	12	2.4	2
9	RW 9	2 KSM	9	1.8	2
Total		24 KSM	136	27.2	27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk memperoleh jumlah sampel 27 dari total populasi RTM 136 adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel *Multistage Random Sampling*. Adapun urutan pengambilan sampel dapat dilihat pada lampiran 2.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Yaitu teknik mendapatkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun dan Effendi,1995). Pengumpulan sampel atau data dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengenai proses pelaksanaan dan dampak program P2KP. Wawancara ini ditujukan untuk lebih mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu penggalian informasi dengan menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan) kepada responden dan wawancara tidak terstruktur (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi pendukung atau pelengkap kuisisioner pada beberapa informan kunci (*key informan*).

2. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang ada dan berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang diamati adalah data yang menyangkut kegiatan dalam proses pelaksanaan dan dampak program P2KP.

3. Dokumentasi

Pencatatan dokumen dan sumber data yang didapat berupa catatan dokumen. Data yang didapat dari teknik dokumentasi adalah data sekunder. Data yang diambil melalui metode ini adalah data mengenai petani yang ada di Kecamatan Bululawang Desa Wandanpuro, jumlah anggota Program P2KP, keadaan wilayah di daerah penelitian.

4.4. Metode Analisa Data

1) Analisis Deskriptif Kualitatif

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan yang ada dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di desa Wandanpuro. Dilakukan dengan menuliskan proses pelaksanaan dari tahap awal sampai pelaksanaan yang telah dilakukan di desa Wandanpuro.

Deskriptif kualitatif menggunakan bantuan alat kuantitatif melalui skor. Penentuan skor tersebut didasarkan pada jumlah skala maksimal dan minimal dari responden yang dipilih pada tiap-tiap indikator yang dipilih.

1. Menentukan banyaknya selang kelas

Selang kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini ada tiga unsur, yaitu:

1. Tinggi
2. Sedang
3. Rendah

2. Menentukan kisaran

Kisaran adalah selisih dari nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah dan dirumuskan sebagai berikut:

Rumus:

$$R = X_t - X_r \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

R = kisaran

X_t = Nilai pengamatan tertinggi

X_r = Nilai pengamatan terendah

3. Pembuatan selang dalam kelas

Selang dalam kelas dilambangkan dengan I dan ditentukan oleh rumus sebagai berikut:

Rumus:

Menentukan interval kelas

$$I = \frac{X_t - X_r}{K} \text{ Atau } I = R / K \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

X_t : Nilai pengamatan tertinggi

I : Interval kelas

X_r : Nilai pengamatan terendah

K : Kelas

R : Kisaran

2. Analisis Data Kuantitatif

Yaitu dengan menggunakan **Uji Pangkat Bertanda Wilcoxon**. Uji Pangkat Bertanda Wilcoxon merupakan salah satu metode dari statistik non parametrik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan tingkat kesejahteraan pada responden setelah mengikuti program P2KP. Langkah-langkah yang perlu dalam pengujiannya adalah:

- a. Menjumlahkan skor untuk masing-masing variabel baik sebelum program P2KP maupun sesudah program P2KP. Variabel yang dihitung adalah variabel tingkat kesejahteraan RTM, yaitu: (A), Kepemilikan aset (B), Keadaan Pangan

(C), Keadaan Sandang (D), Keadaan Papan (E), Kesehatan dan (F), Pendidikan.

- b. Menghitung beda antara variabel sesudah dan sebelum program P2KP (Y) dengan sebelum program P2KP ($Y_i - X_i$), untuk masing-masing variabel (A,B,C,D,E,F).
- c. Memberikan pangkat untuk tiap-tiap beda ($Y_i - X_i$) sesuai dengan besarnya, tanpa memperhatikan tanda beda. Kalau ada dua atau lebih beda yang sama, maka pangkat untuk tiap-tiap beda ini adalah pangkat rata-rata.
- d. Memberi tanda positif/negatif pada pangkat untuk tiap-tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu.
- e. Menjumlahkan semua pangkat bertanda positif/negatif, tergantung dari mana yang memberikan jumlah terkecil, setelah tandanya dihilangkan (Jumlah pangkat terkecil diberi lambang T).
- f. Membandingkan nilai T yang diperoleh dengan nilai T_α

Kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut:

Bila $T_{hitung} < T_{tabel} \rightarrow$ Tolak H_0

Bila $T_{hitung} \geq T_{tabel} \rightarrow$ Terima H_0

T_{tabel} diperoleh dari tabel T dalam Tes Wilcoxon, dalam penelitian ini menggunakan T untuk uji Wilcoxon untuk jumlah responden (n) adalah ≤ 25 . sedangkan untuk responden (n) > 25 menggunakan rumus Tes Rangkings – Bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan, dengan rumus:

$$Mean = \mu = \frac{N(N+1)}{4}$$

$$Deviasi Standar = \sigma_T = \sqrt{\frac{N(N+1)(2N+1)}{24}}$$

$$\text{Dengan demikian} = z = \frac{T - \frac{N(N+1)}{4}}{\sqrt{\frac{N(N+1)(2N+1)}{24}}}$$

- g. Terima H_0 artinya:
 - Tidak terjadi perubahan kepemilikan aset

- Tidak terjadi perubahan keadaan pangan
- Tidak terjadi perubahan keadaan sandang
- Tidak terjadi perubahan keadaan papan
- Tidak terjadi perubahan kesehatan
- Tidak terjadi perubahan pendidikan

pada RTM di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, setelah diadakan program P2KP.

h. Tolak Ho artinya:

- Terjadi perubahan kepemilikan aset
- Terjadi perubahan keadaan pangan
- Terjadi perubahan keadaan sandang
- Terjadi perubahan keadaan papan
- Terjadi perubahan kesehatan
- Terjadi perubahan pendidikan

pada RTM di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, setelah diadakan program P2KP.

Apabila hasil yang diperoleh Tolak Ho (Kesimpulan = ada perubahan kesejahteraan), maka dilanjutkan dengan menganalisis perubahannya tergolong positif/negatif.

V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1 Kondisi Geografis dan Batas Administratif

Desa Wandanpuro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak kurang lebih 0,2 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, kurang lebih 12 Km dari pusat pemerintahan kabupaten. Desa ini terletak pada ketinggian kurang lebih 405 m di atas permukaan laut, sedangkan suhu udara berkisar 26 hingga 31 derajat C. Dengan tingkat kesuburan tanah yang subur dan topografi wilayah yang berupa dataran seluas 200,095 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Wandanpuro adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sempalwadak
Sebelah Selatan	: Sungai Manten
Sebelah Timur	: Desa Bululawang
Sebelah Barat	: Sungai Brantas

Dengan letaknya berada di kawasan tanah datar yang subur dan tidak tandus maka sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan profesionalitas di dalam pengembangan pertaniannya, sehingga memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

5.2. Tata Guna Lahan

Luas lahan Desa Wandanpuro secara keseluruhan adalah 200.095 Ha yang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Sidodadi, Dusun Sidomukti, Dusun Sidorejo dan Dusun Sidomulyo. Lahan yang ada dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sawah, ladang, bangunan umum, makam, pemukiman dan lain-lain. Secara rinci penggunaan lahan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Tata Guna Lahan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pertanian Sawah	129.379	64,66
Ladang/Tegalan	10.360	5,18
Bangunan Umum	6.132	3,06
Perikanan/Kolam	0.200	0,10
Pemukiman/Perumahan	36.435	18,21
Pemakaman/Kuburan	3.469	1,73
Lain-lain	14.120	7,06
Total	200.095	100,00

Sumber: Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Dari tabel 4 diketahui bahwa tanah di Desa Wandanpuro paling banyak digunakan untuk sektor pertanian yaitu sebanyak 129.379 Ha (64,66%) dari total luas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wandanpuro merupakan daerah pertanian dimana lahannya banyak digunakan untuk usaha di bidang pertanian.

5.3. Karakteristik Penduduk

5.3.1. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Wandanpuro tahun 2007 terdiri dari 1.819 kepala keluarga, dan terdiri dari 1.626 rumah tangga dengan jumlah total 6.989 jiwa. Jumlah penduduk perempuan 3.509 jiwa (50,21%) dan laki-laki 3.480 jiwa (49,79%). Adapun distribusi penduduk di Desa Wandanpuro menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Perempuan	3.509	50,21
Laki-laki	3.480	49,79
Total	6.989	100,00

Sumber: Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki 3.480 jiwa (49,79%), dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.509 jiwa (50,21%) dari total keseluruhan penduduk. Hal ini berarti bahwa angka kelahiran penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan angka kelahiran penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah penduduk dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan penduduk dari 6.442 orang menjadi 6.989 orang.

5.3.2 Distribusi Penduduk Menurut Umur

Berdasarkan umur, keadaan penduduk Desa Wandanpuro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur Penduduk di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Umur (Th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 – 14	1.554	22,23
15 – 56	4.631	66,26
57 th ke atas	804	11,50
Total	6.989	100,00

Sumber: Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur terbesar adalah berada pada usia 15-56 tahun yaitu sejumlah 4.631 jiwa (66,26%) dari total jumlah penduduk yang berarti bahwa penduduk usia produktif lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Desa Wandanpuro mempunyai kualitas yang baik sehingga lebih mudah dalam menerima suatu teknologi baru atau program-program baru untuk mengembangkan desa tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya usia lanjut yaitu sejumlah 804 jiwa (11,50%) mampu mengimbangi jumlah usia produktif yang lebih besar dari usia lanjut.

5.3.3. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Adanya pendidikan yang memadai baik yang dilaksanakan secara formal maupun non formal adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan. Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Wandanpuro dapat dikategorikan belum pada tingkat rata-rata standar pendidikan pemerintah program wajib belajar 9 tahun. Hal ini terlihat dari kecilnya prosentase yaitu 35,61% warga yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan, lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 7. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Tidak Tamat SD/Sederajat	375	6,57
SD/Sederajat	2.031	35,61
SLTP/Sederajat	1.508	26,44
SLTA/Sederajat	1.413	24,77
Diploma/Akademi	122	2,14
Perguruan Tinggi	255	4,47
Total	5.704	100,00

Sumber: Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Wandanpuro masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk yang hanya tamatan SD/ sederajat sebanyak 2.031 orang (35.61%), sedangkan penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 375 orang (6,57%). Selanjutnya penduduk tamatan SLTP/ sederajat sebanyak 1.508 orang (26,44%) dan untuk tamatan SLTA/ sederajat 1.413 orang (24,77%) sementara tamatan diploma atau akademi sebanyak 122 orang (2,14%) dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 255 orang atau (4,47%).

5.3.4. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Didukung dengan potensi wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten, mendorong masyarakat Desa Wandanpuro untuk memberdayakan tata letak desa yang memungkinkan untuk berwirausaha sehingga kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian penduduk Desa Wandanpuro selain di bidang pertanian.

Tabel 8. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	142	9,18
Buruh (tani,tukang)	686	44,34
Pedagang	89	5,75
Wiraswasta	427	27,60
Peternak	12	0,78
PNS	26	1,68
Polisi dan TNI	17	1,10
Pensiunan	58	3,75
Karyawan Swasta	90	5,82
Total	1547	100,00

Sumber: Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Tabel 8 diketahui bahwa penduduk di Desa Wandanpuro yang bekerja sebanyak 1547 jiwa dari total penduduk. Mata pencaharian yang paling banyak ditekuni adalah sebagai buruh tani yaitu sebanyak jiwa 686 (44,34%) dari jumlah penduduk yang bekerja, sedangkan urutan kedua adalah menjadi wiraswasta yaitu sebanyak 427 jiwa (27,60%) dan urutan ketiga adalah sebagai petani sebanyak 142 jiwa (9,18%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Wandanpuro bekerja pada sektor pertanian, baik menjadi petani maupun buruh tani. Artinya sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama bagi kesempatan kerja dan penghasilan sebagian besar penduduk. Masyarakat Wandanpuro yang bekerja di bidang pertanian umumnya yang memiliki lahan sawah irigasi saja sedangkan lainnya mengandalkan dari lahan yang ditanami tebu dan tanaman lainnya.

5.4 Sarana dan Prasarana

Di Desa Wandanpuro terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat setempat baik milik bersama maupun milik pribadi. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang dapat disajikan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9. Potensi Sarana dan Prasarana di Desa Wandanpuro
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Prasarana Irigasi	Dam/bendungan, Saluran sekunder, Saluran tersier dan Sumur ladang, PAM
2	Prasarana Pendidikan Formal	Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat.
3	Prasarana Pemerintahan Desa	Balai Desa dan Perlengkapannya
4	Prasarana Perhubungan Darat	Jembatan, Jalan Kabupaten/Propinsi dan Jalan Desa
5	Sarana Transportasi	Kendaraan umum roda dua, Kendaraan umum roda tiga dan Kendaraan umum roda empat atau lebih
6	Sarana Komunikasi	Telepon Pribadi, Telepon Umum dan Wartel
7	Prasarana Listrik	PLN
8	Sarana Pasar	Supermarket, Pertokoan, Warung
9	Sarana Keuangan	Bank dan Kelompok Simpan Pinjam
10	Prasarana Ibadah	Masjid, mushola (Langgar) dan Gereja
11	Sarana Kesehatan	Posyandu

Sumber : Kantor Desa Wandanpuro, 2007

Dari tabel 9 tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Wandanpuro cukup banyak. Karena letaknya strategis dan dekat dari pusat pemerintahan maka secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada selalu dijaga dan dalam keadaan baik. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di Desa Wandanpuro yang menunjang pembangunan sudah sangat baik. Dengan demikian, Desa Wandanpuro memiliki peluang yang relatif besar untuk dikembangkan.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Karakteristik Responden

Penggambaran karakteristik responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi responden secara umum di daerah penelitian. Data karakteristik responden ini disajikan dari analisis data primer yang diperoleh lewat observasi lapang, teknik wawancara langsung dan dokumentasi.

Responden yang diambil dalam penelitian ini berasal dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Program P2KP di Desa Wandanpuro. Program P2KP merupakan suatu program Penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan melalui pengembangan sumberdaya manusia, sehingga masyarakat terutama keluarga miskin tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Desa Wandanpuro mempunyai 48 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) penerima bantuan P2KP, yang terdiri dari 3 - 7 rumah tangga tiap kelompoknya. Semuanya berada di empat dusun yaitu Dusun Sidodadi, Dusun Sidomukti, Dusun Sidorejo, dan Dusun Sidomulyo. Dari 48 KSM yang ada diambil sebanyak 24 KSM yang berjumlah 136 anggota, dirandom lagi untuk diambil sebagai responden sehingga dihasilkan 27 responden. Dalam penelitian ini karakteristik responden yang diambil adalah berdasarkan golongan umur responden, jenis kelamin responden peserta program P2KP, tingkat pendidikan responden, jumlah tanggungan keluarga, dan kepemilikan luas lahan anggota KSM yang mengikuti program P2KP di Desa Wandanpuro Kec Bululawang.

6.1.1 Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Berdasarkan Umur di Desa Wandanpuro

Komposisi umur responden dapat digunakan untuk mengetahui persentase (%) umur produktif responden. Untuk karakteristik umur anggota KSM program P2KP di Desa Wandanpuro disajikan pada tabel berikut :

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Umur

No	Umur Responden (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	< 40	6	22,22
2	40 – 60	16	59,26
3	> 60	5	18,52
Jumlah		27	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Umur sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan usahanya. Semakin tua umur seseorang maka kemampuan secara fisik akan semakin berkurang. Berdasarkan data tabel 10 dapat diketahui bahwa umur responden 40 – 60 tahun berjumlah paling banyak yaitu 16 orang (59,26%). Jadi dari segi umur, responden dalam penelitian ini tidak semuanya produktif sehingga sebagian kecil dari mereka tidak mampu menjalankan usahanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

6.1.2 Karakteristik Anggota KSM Program P2KP Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Wandanpuro

Untuk karakteristik jenis kelamin anggota KSM program P2KP di Desa Wandanpuro disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	10	37,04
2	Perempuan	17	62,96
Jumlah		27	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Dari segi jenis kelamin responden paling banyak adalah perempuan yaitu berjumlah 17 responden (62,96%) sedangkan untuk Laki-laki berjumlah 10 responden (37,04%). Dari penelitian di lapang, perempuan lebih banyak berminat untuk ikut dalam program P2KP yaitu menjadi anggota KSM. Alasan yang dikemukakan adalah untuk membantu menambah pendapatan keluarga yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara usaha mandiri, berdagang di pasar, dan jualan makanan, catering, dan kelontong. Sedangkan

untuk yang laki-laki lebih banyak untuk usaha di bidang peternakan dan pertanian. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam program P2KP di Desa Wandanpuro. Tidak ada pemilihan khusus bagi anggota yang ikut dalam program P2KP ini. Dan tidak dibeda-bedakan perempuan atau laki-laki yang harus ikut, semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi anggota program P2KP.

6.1.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Anggota KSM Program P2KP di Desa Wandanpuro

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya pikir masyarakat atau responden. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam mempertimbangkan segala sesuatu dalam proses pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah dan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dari hasil penelitian, tingkat pendidikan responden disajikan dalam tabel 12 berikut ini :

Tabel 12. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Lulus SD	13	48,15
2	Lulus SMP	7	25,93
3	Lulus SMA	6	22,22
4	PT	1	3,70
Jumlah		27	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Ditinjau dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan anggota Program P2KP tergolong rendah yaitu lulusan SD (Sekolah Dasar) sebesar 13 jiwa (48,15%) dari total responden. Sedangkan yang tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebesar 7 jiwa (25,93%) dari total responden, dan tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) sebesar 6 jiwa (22,22%). Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan juga sarana pendidikan yang belum ada di desa atau kota kecamatan Bululawang. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari orang tua responden akan arti pentingnya pendidikan.

6.1.4 Karakteristik Anggota KSM Program P2KP di Desa Wandanpuro Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Tanggungan keluarga merupakan beban bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan pangan maupun sandang. Jumlah tanggungan responden ditunjukkan pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Karakteristik Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	< 3	14	51,85
2	3 – 5	11	40,74
3	> 5	2	7,41
Jumlah		27	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa paling banyak responden mempunyai tanggungan keluarga kurang dari 3 jiwa adalah 14 responden (51,85%). Dari jumlah tanggungan keluarga tersebut maka dapat diketahui siapa saja anggota keluarga yang bekerja atau tidak bekerja, sebelum adanya program P2KP maupun setelah program P2KP. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga yang belum bekerja dan lansia akan mempengaruhi juga terhadap beban yang harus ditanggung kepala keluarga dalam pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga. Sehingga jika dilihat dari tabel 13 diatas menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut tergolong tinggi dikarenakan jumlah tanggungan keluarga paling banyak kurang dari 3 orang.

6.1.5 Karakteristik Anggota KSM Program P2KP di Desa Wandanpuro Berdasarkan Kepemilikan Luas Lahan

Luas lahan responden merupakan lahan yang diusahakan oleh responden baik itu lahan milik sendiri, dan menyewa. Bagi petani yang mempunyai lahan luas, biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, oleh sebab itu petani akan lebih mudah dalam hal penyediaan modal untuk pengembangan usahatannya. Sebaliknya bila seseorang memiliki lahan sempit maka dia akan

lebih berfikir panjang untuk mengembangkan usahatannya. Besarnya luas lahan responden dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Luas Lahan

No	Luas Lahan yang dimiliki (ha)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	> 0,77	3	11,11
2	0,33 – 0,77	10	37,04
3	< 0,33	14	51,85
Jumlah		27	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa luas lahan yang dimiliki responden paling banyak adalah kurang dari 0,33 ha yaitu berjumlah 14 responden (51,85 %). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepemilikan luas lahan responden rendah yaitu kurang dari 0,33 ha. Hal ini yang menyebabkan pendapatan dari usaha tani juga rendah sehingga responden lebih banyak memilih untuk mencari tambahan penghasilan dari sektor lain seperti usaha jualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga menjadi dorongan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya program P2KP di Desa Wandanpuro dengan menjadi anggota KSM P2KP dengan aktif.

6.2 Proses Pelaksanaan Program P2KP di Desa Wandanpuro

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Wandanpuro sudah dimulai sejak tahun 2003, akan tetapi baru berjalan pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan proses dari program P2KP itu sendiri membutuhkan waktu yang lama hampir satu tahun dan baru tahun 2005 usulan program-program yang diajukan dari BKM Makmur disetujui oleh Pemerintah Pusat dan juga disetujui pencairan dana bantuannya. P2KP merupakan proyek pemerintah yang berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, untuk membangun "gerakan kemitraan" dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan

berkelanjutan. Meskipun kebijakan proyek ini dibuat dari pemerintah atas yang bersifat *top down* tapi dalam pelaksanaannya, kebijakan ini bersifat *bottom up*. Dimana kebijakan proyek ini mengutamakan peran aktif masyarakat sebagai subyek pelaku kegiatan-kegiatan yang ada dalam setiap tahapan proyek tersebut.

Pelaksanaan program P2KP ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat dan tahap pelaksanaan komponen dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Untuk menjawab tujuan penelitian ini dalam pelaksanaan program P2KP secara keseluruhan terdapat dalam tahap pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat yaitu proses pelaksanaan program P2KP yang diawali dengan sosialisasi sampai pelaksanaan program.

Proses pelaksanaan komponen pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh kegiatan. Ketujuh kegiatan tersebut menjadi variabel dalam proses pelaksanaan program P2KP di dalam penelitian ini, yaitu Sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Perencanaan partisipatif, dan pelaksanaan Tridaya. Kegiatan tersebut menjadi kegiatan utama dalam pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro dari awal sampai sekarang.

6.2.1 Sosialisasi

Merupakan kegiatan awal berupa pengenalan P2KP dan pendekatan-pendekatan ke masyarakat atau kelompok masyarakat, aparat pemerintah lokal, dan tokoh-tokoh kunci di tingkat kelurahan. Kegiatan sosialisasi awal ini dilakukan secara interpersonal atau melalui pertemuan-pertemuan kelompok yang ada di masyarakat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi awal tersebut adalah seluruh masyarakat termasuk aparat kelurahan dapat memahami gambaran P2KP secara umum serta prosedur pelaksanaannya. Dan adanya kesepakatan masyarakat untuk melaksanakan Rembug Kesiapan Masyarakat guna menyatakan kesiapan atau ketidaksiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam P2KP.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Desa Wandanpuro dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2003. Pelaksanaan sosialisasi pertama kali dilakukan ditingkat kelurahan yaitu bagi

aparatus kelurahan Desa Wandanpuro, kemudian diteruskan ke tingkat RW masing-masing dusun. Kemudian melakukan pertemuan di masing-masing RT melalui acara pengajian tahlil dan PKK. Setelah di tingkat RT kemudian baru diadakan pertemuan ditingkat desa, yang dihadiri oleh perwakilan RT dengan tujuan untuk kesepakatan melakukan Rembuk Kesiapan Masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel) bersama aparat kelurahan yang sudah dibentuk oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kabupaten. Dari keterangan yang diperoleh bahwa Faskel pertama kali di Desa Wandanpuro bernama Bisman Bhaktiar dan sudah berganti sebanyak empat kali.

Dari data di lapangan dapat diketahui bahwa keterlibatan responden yang ikut dalam sosialisasi sebanyak 23 responden (85,19%) dan yang tidak ikut dalam sosialisasi sebanyak 4 responden (14,81%). Sehingga dapat dikatakan keterlibatan responden dalam kegiatan sosialisasi ini cukup baik. Dari keterangan yang diperoleh, responden tidak ikut dikarenakan responden sedang pergi ke tempat saudaranya yang ada di luar kota dan ada yang bekerja.

6.2.2 Rembug Kesiapan Masyarakat

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah serangkaian rembug/rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/Desa bekerja sama dengan tim fasilitator mulai tingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/Desa dengan mengundang semua warga secara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat di calon lokasi kelurahan sasaran untuk menetapkan kesiapan dan ketidaksiapan warga melaksanakan P2KP dan memilih pada calon Kader Masyarakat.

Ketentuan dasar yang dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan pokok ini adalah dilaksanakannya rembug/rapat warga di calon kelurahan sasaran, dari masyarakat bawah sampai dengan tingkat kelurahan yang difasilitasi oleh Faskel. Hal ini ditujukan agar keputusan kesiapan pelaksanaan proyek benar-benar dari masyarakat bukan dari pejabat pemerintah kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat saja.

Secara umum tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyek ini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itu juga diharapkan adanya pemahaman peran dan fungsi dari masing-masing pelaku P2KP, baik aparat pemerintah kelurahan maupun masyarakat.

Untuk pelaksanaannya kemudian Faskel menyosialisasikan terlebih dahulu mengenai kebijakan P2KP ini pada masyarakat, berkaitan dengan prinsip, substansi serta ketentuan P2KP. Hal ini ditunjukkan agar penerimaan P2KP di kelurahan tersebut didasarkan atas pemahaman masyarakat mengenai proyek P2KP. Hal penting yang harus diingat adalah proses pelibatan masyarakat sejak awal agar tumbuh tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap P2KP. Sehingga masyarakat akan benar-benar konsisten menegakkan visi, misi, tujuan, prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan dikemudian hari. Selain itu agar dalam pelaksanaannya tidak semata-mata berorientasi formalitas melainkan harus difokuskan pada "pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka kesempatan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin, untuk terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran untuk dilaksanakannya P2KP di wilayahnya.

Langkah berikutnya Fasilitator menentukan sejumlah kriteria untuk memilih kader-kader masyarakat guna membantu tugasnya. Kriteria yang diutamakan untuk dijadikan sebagai kader masyarakat adalah dari kriteria sifat atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Penanggung jawab proses penyiapan masyarakat dalam P2KP adalah Tim Fasilitator. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan pada bulan ke-1 pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran atau setelah fasilitator dimobilisasi di lokasi sasaran.

Berdasarkan data di lapangan pelaksanaan kegiatan RKM ini dilakukan dengan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat yang diawali dengan sosialisasi pada RT-RT yang ada, yaitu melalui kegiatan masyarakat seperti jamaah tahlil, arisan RT, dan PKK. Sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan bahwa Desa Wandanpuro akan mendapatkan program dari Pemerintah yaitu Program P2KP untuk penanggulangan kemiskinan. Setelah sosialisasi awal di tingkat RT kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan

RKM untuk seluruh warga di Desa Wandanpuro, dengan mengundang wakil-wakil dari 38 RT untuk menentukan kesiapan penerimaan proyek ini dan pemilihan kader-kader untuk membantu Faskel dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Selain itu pensosialisasian ini dimaksudkan untuk lebih menjelaskan adanya proyek P2KP berbeda dengan proyek penanggulangan kemiskinan lainnya. Dimana ditekankan disini adalah warga sebagai subyek bukan obyek proyek. Selain itu Faskel menjelaskan mengenai pemanfaatan dana yang berorientasi pada kegiatan Tridaya yakni sosial, fisik, dan ekonomi bergulir.

Kegiatan RKM di Desa Wandanpuro dilaksanakan pada bulan Februari 2003 yang bertempat di Balai Desa Wandanpuro yang dihadiri 80 peserta utusan RT dari 11 RW di Desa Wandanpuro. Hasil dari RKM ini antara lain warga siap untuk menerima dan melaksanakan program P2KP di Desa Wandanpuro dan terpilih lima peserta untuk menjadi kader untuk membantu Faskel dalam menjalankan tugas berikutnya. Dari data di lapang dapat diketahui bahwa keterlibatan responden yang ikut dalam RKM di tingkat desa sebanyak 15 responden (55,56%) dan yang tidak ikut sebanyak 12 responden (44,44%). Responden yang ikut RKM merupakan wakil dari masing-masing RT sehingga tidak semua responden ikut dalam RKM tingkat desa. Akan tetapi responden yang tidak ikut RKM tingkat desa menyatakan sudah ikut RKM tingkat RT saat acara tahlilan dan arisan RT.

6.2.3 Refleksi Kemiskinan

Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku, pola pikir sehari-hari masyarakat setempat, bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan, serta bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin dan termiskin bersama komponen masyarakat lainnya, dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di P2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan ke-2 yaitu setelah melakukan kegiatan RKM pada tahap sebelumnya. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan

ini adalah teridentifikasinya persepsi mengenai kemiskinan menurut versi masyarakat setempat, dengan hasil-hasil diskusi yang didasarkan pada bahan diskusi untuk Refleksi Kemiskinan. Adapapun yang bertanggung jawab dari kegiatan ini adalah masyarakat sendiri yang difasilitasi fasilitator dan kader masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, kegiatan refleksi kemiskinan yang dilakukan di Desa Wandanpuro ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi isu-isu kemiskinan berdasarkan persepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Wandanpuro. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2003. Kegiatan refleksi kemiskinan ini dilakukan dengan kegiatan diskusi tentang isu-isu kemiskinan yang terjadi yaitu dengan *Focus Group Discussion* (FGD) refleksi kemiskinan. FGD yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro adalah dengan mengadakan pertemuan setiap RT di Desa Wandanpuro untuk membahas kemiskinan yang terjadi di masing-masing RT. Hasil FGD refleksi kemiskinan di Desa Wandanpuro secara garis besar antara adalah :

1. Kondisi lingkungan padat penghuni sehingga agak kumuh,
2. Tingkat pendidikan rata-rata masih rendah,
3. Mata pencaharian yang paling banyak adalah buruh, jualan kecil-kecilan, penarik becak, kuli dan lain-lain,
4. Pembangunan sarana fisik lingkungan belum representatif untuk menunjang aktifitas dan kesehatan,
5. Gizi keluarga khususnya balita, ibu hamil dan lansia kurang terpenuhi, dan
6. Perlu adanya akses di bidang ekonomi produktif, kesehatan dan pendidikan.

Hasil dari FGD refleksi kemiskinan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan Pemetaan Swadaya.

Dari hasil di lapang dapat diketahui bahwa keterlibatan responden yang ikut dalam FGD RK sebanyak 20 responden (74,07%) dan yang tidak ikut sebanyak 7 responden (25,95%).

6.2.4 Pemetaan Swadaya

Pemetaan swadaya adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri persoalan kemiskinan yang dihadapi dan kebutuhan nyata mereka untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Pada pelaksanaan kegiatan ini dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses/daur program, yaitu mulai kajian masalah/kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program. Pendekatan yang dimaksud disebut dengan Penilaian Kebutuhan Masyarakat dalam penerapan pemetaan swadaya dititikberatkan untuk memungkinkan permasalahan yang akan dikaji didasarkan pada sudut pandang masyarakat sendiri, sehingga alternatif pemecahan masalah akan mempertimbangkan potensi, sumber daya serta kepentingan-kepentingan lokal.

Adapun tujuan utama kegiatan pokok Pemetaan Swadaya pada prinsipnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk mampu membudayakan perilaku mandiri yang bertumpu pada potensi diri untuk menanggulangi kemiskinan serta memperbaiki kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Penanggung jawab pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS) untuk pertama kalinya dalam masa proyek adalah masyarakat kelurahan melalui kader-kader masyarakat bersama-sama Tim Pemetaan Swadaya. Anggota Tim Pemetaan Swadaya dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini ditujukan agar pemetaan swadaya dapat melibatkan segenap masyarakat dan pengkondisian pembentukan BKM melalui pemetaan potensi relawan-relawan yang ada di wilayahnya. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pokok PS untuk tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran, yakni sekitar bulan ketiga setelah Fasilitator dimobilisasi di lapangan atau setelah proses kegiatan FGD Refleksi Kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, kegiatan Pemetaan Swadaya di Desa Wandanpuro dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus 2003 dengan tujuan pertama untuk mendapatkan data mengenai Peta dan Profil Kemiskinan masing-masing RT di Desa Wandanpuro dengan cara mendatangi

tiap RT. Dikarenakan banyak langkah-langkah pada kegiatan pokok Pemetaan Swadaya dan pelaksanaan pemetaan yang dilakukan pada tiap-tiap RT mengakibatkan pelaksanaan Pemetaan Swadaya membutuhkan waktu yang lama yakni kurang lebih 4-5 bulan.

Untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Swadaya, faskel sebagai fasilitator proyek masuk ke dalam kegiatan masyarakat secara langsung bersama anggota tim Pemetaan Swadaya. Yaitu melalui kegiatan perkumpulan warga yaitu jama'ah tahlil, arisan RT, ibu PKK.

Berdasarkan data di lapang hasil Pemetaan Swadaya ini dapat diketahui jumlah KK miskin berjumlah 553 KK dimana komunitas KK miskin di Desa Wandanpuro relatif menyebar di berbagai RW yaitu RW 1 jumlah KK miskin 72 KK, RW 2 sejumlah 84 KK, RW 3 sejumlah 58 KK, RW 4 sejumlah 67 KK, RW 5 sejumlah 49 KK, RW 6 sejumlah 13 KK, RW 7 sejumlah 15 KK, RW 8 sejumlah 43 KK, RW 9 sejumlah 67 KK, RW 10 sejumlah 45 KK, dan RW 11 sejumlah 41 KK. Yang dijadikan tolak ukur versi miskin dari P2KP adalah berpenghasilan dibawah tiga ratus ribu per bulan atau kurang lebih berpenghasilan sepuluh ribu per harinya sebagaimana disesuaikan dengan hasil dari FGD Refleksi Kemiskinan. Adapun peta dan profil keluarga miskin inilah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan khususnya bagi sasaran utama P2KP, proses perencanaan program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya ini responden tidak terlibat aktif. Hal ini dikarenakan Pemetaan Swadaya di Desa Wandanpuro dilakukan oleh Faskel dibantu kadernya untuk mendata peta dan profil kemiskinan.

6.2.5 Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan proses partisipasi warga masyarakat kelurahan sasaran untuk memilih dan memutuskan sendiri bentuk wadah organisasi masyarakat (BKM) yang akan dipercaya menangani pelaksanaan P2KP di kelurahannya. Ketentuan dasar dari kegiatan ini adalah terbentuknya organisasi masyarakat warga tingkat kelurahan (BKM) yang dibangun dengan didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, transparan, akuntabel, demokrasi,

kemandirian, otonomi, proaktif, semangat saling membantu, menghargai keragaman dan kedamaian. Artinya, BKM merupakan organisasi masyarakat/institusi lokal yang dibentuk, dimiliki, dikelola dan diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan bersama masyarakat. Sehingga hakekat BKM sebagai wujud paguyuban atau perkumpulan seluruh warga masyarakat setempat.

BKM dimaksudkan sebagai peran serta fungsi kemandirian dan keswadayaan maupun karakteristik dan sifat dari organisasi masyarakat warga di tingkat kelurahan masyarakat di kelurahan sasaran dapat membentuk lembaga baru sebagai BKM, maupun memampukan lembaga-lembaga yang telah ada melalui peningkatan peran dan fungsinya, selama lembaga tersebut sebagai bagian integral dari organisasi masyarakat dan juga telah memenuhi kriteria ciri serta sifat organisasi masyarakat dalam P2KP.

BKM dilegalisasi melalui pencatatan akte notaris atau dalam bentuk badan hukum sebagai perkumpulan/perhimpunan warga. Anggota BKM ini terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya dan dipilih berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama dan mewakili warga dari berbagai kepentingan. Anggota BKM ini tidak ada yang mempunyai hak istimewa dan semua keputusan BKM diambil secara kolektif. Dimana BKM ini dapat dibubarkan oleh masyarakat yang ada dan tinggal di kelurahan tersebut. BKM yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana Pinjaman Bergulir maupun stimulan atas keswadayaan masyarakat (hibah) secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Karena itu, keberadaan BKM merupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran.

Kedudukan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lainnya. Dalam jangka panjang BKM merupakan organisasi masyarakat warga yang berperan mengelola berbagai kehidupan masyarakat bersangkutan, khususnya persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Waktu pelaksanaan pada masa proyek dari kegiatan ini adalah sekitar bulan keempat hingga bulan kelima, setelah fasilitator dimobilisasi dan diselesaikannya kegiatan Pemetaan Swadaya. Sedangkan penanggung jawab dari kegiatan ini pada masa pelaksanaan proyek adalah Panitia Pembentukan BKM yang difasilitasi oleh kader masyarakat dan Fasilitator dan setelah masa proyek berakhir adalah masyarakat setempat dengan difasilitasi kader masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan kegiatan pembentukan BKM di Desa Wandanpuro diawali dengan melakukan rembuk warga pembentukan BKM Desa Wandanpuro yaitu dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2003 di balai Desa Wandanpuro dengan agenda pembentukan BKM. Rembuk warga pembentukan BKM ini dihadiri oleh 104 peserta dimana peserta ini merupakan utusan dari RT di Desa Wandanpuro.

BKM yang terbentuk bernama BKM "MAKMUR" dengan akte notaris nomor 1058/WAR/IX/2003. Sekretariat BKM Makmur bertempat di Kantor Desa Wandanpuro Jl.Raya Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Setelah melaksanakan pembentukan BKM, kemudian melakukan pemilihan untuk anggota dan pengurus BKM. Anggota BKM dipilih sebanyak 11 orang. Calon anggota BKM yang dipilih adalah peserta utusan atau delegasi yang hadir yang mewakili masing-masing RT dengan syarat warga Desa Wandanpuro dan berdomisili tetap di Desa Wandanpuro, tidak menjabat sebagai aparat/perangkat Desa Wandanpuro, tidak menjadi pengurus di organisasi Partai Politik, dan tidak menjadi anggota/Pengurus BPD atau LPMD Desa Wandanpuro. Ketua atau Koordinator BKM yang terpilih adalah Sudarnoto dari RW 1 RT 1 menjabat selama 2 tahun kepengurusan, kemudian Achmad Munir S.Sos menjabat selama 1 tahun. Sedangkan periode sekarang adalah Budi Sayekti Adam dari RW 4 RT 15. Setelah menetapkan anggota BKM Makmur kemudian membuat dan menetapkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKM Makmur. AD/ART ini dibuat sebagai landasan dasar atau pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab BKM Makmur selama 3 tahun periode.

Dalam kegiatan pembentukan BKM ini responden yang terlibat ikut dalam rembuk warga BKM hanya 6 responden (22,22%) dan yang tidak ikut sebanyak

21 responden (77,78%). Yang terlibat ikut dalam pembentukan BKM ini merupakan utusan dari masing-masing RT untuk menjadi calon anggota BKM sehingga tidak bisa semua ikut dalam kegiatan ini.

6.2.6 Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Program Kerja

Kegiatan pokok Perencanaan partisipatif merupakan tahap kunci pada pelaksanaan P2KP dalam rangka pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui kegiatan musyawarah dan rembuk-rembug warga untuk menyusun rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya. Pada tahap ini ada dua langkah utama, yakni Perumusan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) oleh masyarakat serta penyebarluasannya ke pihak-pihak yang terkait.

Penanggung jawab penyusunan program perencanaan partisipatif adalah BKM dan pelaksana kegiatan adalah kader masyarakat serta tim pemetaan swadaya dengan melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan ini terdapat dua jenis rencana yang perlu dirumuskan masyarakat, yakni rencana strategis dan rencana tindak. Rencana strategis pada prinsipnya merupakan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan (3 tahun), yakni : indikasi program untuk menanggulangi kemiskinan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan rencana aksi masyarakat adalah rencana tahunan penggulungan kemiskinan untuk jangka waktu satu tahun yang pertama yang sudah diklasifikasi dalam:

- a. Jenis-jenis kegiatan swadaya murni masyarakat;
- b. Jenis-jenis kegiatan melalui bantuan dana BLM dan swadaya masyarakat;
- c. Jenis-jenis kegiatan dengan bantuan APBD dan sumber lainnya.

PJM dan rencana tahunan Pronangkis yang telah disusun partisipatif oleh masyarakat dikomunikasikan BKM ke pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai pada Pemerintah Kota/Kabupaten dan menyebarluaskannya kepada seluruh warga setempat sebagai pedoman untuk penyusunan usulan kegiatan BLM. Dimana perencanaan partisipatif dan pronagkis menjadi prasyarat bagi masyarakat kelurahan untuk dapat mengakses sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada

masa proyek P2KP di kelurahan sasaran adalah setelah dilakukannya pelaksanaan kegiatan pembentukan BKM di kelurahan. Selanjutnya untuk evaluasi dan penyempurnaan serta penyusunan rencana tahunan melalui perencanaan partisipatif sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali oleh BKM bersama masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, didasarkan pada hasil Pemetaan Swadaya yang telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Wandanpuro. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini, BKM dan kader-kader masyarakat mendapat pelatihan terlebih dahulu. Setelah pelatihan, dilakukan penggalian gagasan dan usulan melalui rembuk-rembuk warga pada tingkat RT dan RW untuk membentuk Program Kerja Menengah (PJM) Pronangkis. Kemudian dari usulan-usulan tersebut diadakan kajian atau rembuk warga Desa Wandanpuro, kemudian disempurnakan melalui rapat pleno BKM pada bulan September 2003 untuk menetapkan program kerja yang akan diajukan dan khususnya pada hal-hal dalam memprioritaskan memiliki nilai yang sama.

Adapun garis besar program kerja yang dibuat untuk periode 2003-2004 yang sudah disepakati bersama adalah :

1. Prasarana Dasar Lingkungan, adalah perbaikan selokan atau gorong-gorong dan saluran irigasi/plengsengan sungai serta jalan kampung/gang.
2. Ekonomi produktif, adalah pelatihan dan pinjaman modal usaha yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Pendidikan adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, beasiswa dan pengadaan sarana pendidikan serta peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan.
4. Kesehatan, adalah peningkatan pemahaman tentang kesehatan, bantuan pemenuhan gizi keluarga khususnya balita, ibu hamil dan lansia, bantuan biaya perawatan kesehatan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan masyarakat serta pengelolaan sampah.
5. Sosial, adalah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan kesadaran pentingnya keluarga harmonis dan peningkatan hubungan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.

PJM Pronangkis ini pada dasarnya mengacu pada program jangka panjang pembangunan desa yang dalam pelaksanaannya disusun dalam bentuk rencana kegiatan jangka pendek (tahunan). Setiap akhir tahun akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil kegiatan tahun itu dan perkembangan yang terjadi. Hasil revisi disampaikan dan disahkan dalam LPJ BKM tahunan.

Keterlibatan responden yang ikut dalam rembuk warga pada tingkat RT untuk membuat program kerja sebanyak 17 responden (62,96%) dan yang tidak ikut sebanyak 10 responden (37,04%). Keterlibatan responden sangat diperlukan agar dapat diketahui apa yang akan menjadi keinginan dan langkah-langkah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.2.7 Pelaksanaan Program P2KP

Pelaksanaan program P2KP adalah bagian dari kegiatan pokok alur proses pelaksanaan program P2KP atau disebut sebagai Kegiatan Pokok Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka memperoleh akses dana BLM P2KP. Usulan kegiatan tersebut disusun sendiri oleh KSM sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing atau oleh panitia yang ditetapkan BKM untuk menangani kegiatan khusus yang bersifat temporer.

Penyaluran dana BLM adalah proses dan prosedur administrasi penyaluran dana BLM P2KP dari pemerintahan ke masyarakat melalui BKM, maupun dari BKM/UPK ke KSM-KSM. Proses penyaluran dana pencairan dana BLM P2KP dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM. Dana BLM tahap 1 (20%) hanya dapat dicairkan ke rekening BKM apabila BKM telah menyerahkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan, serta bersama PJOK menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) berikut lampirannya. Jadi secara langsung penanggungjawab pencairan dana BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat adalah PJOK. Sedangkan untuk penyaluran dana tahap II dan tahap III hanya dapat dilaksanakan apabila BKM menyerahkan hasil verifikasi KMW terhadap pencapaian kinerja sebelumnya dan verifikasi potensi keberlanjutan keuangan, kegiatan serta kelembagaan di kelurahan yang bersangkutan. Prinsip yang sama

pada penyaluran dana dari BKM/UPK ke KSM, yakni apabila KSM telah dapat menunjukkan komitmen, kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Secara langsung dana dapat dicairkan pada KSM ketika KSM telah mengajukan usulan kegiatan dan usulan tersebut telah dinilai layak oleh UPK serta disetujui proses pendanaannya oleh BKM. Sehingga penanggungjawab untuk pencairan dana perguliran BKM ini adalah BKM, yang secara operasional didelegasikan ke Unit Pengelola Keuangan.

Adapun tujuan dari kegiatan pokok ini adalah mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas masyarakat, pemerintahan dan konsultan dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dalam mempermudah proses penyaluran dana BLM P2KP kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP dan untuk membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan pokok ini dilakukan secara bertahap. Tahap I pada saat BKM menyerahkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis serta menandatangani SPPB bersama PJOK. Sementara penyaluran dana perguliran BLM dari UPK/BKM ke KSM didasarkan pada jadwal yang ditetapkan dalam PJM Pronangkis maupun keputusan Rapat Anggota BKM, hal ini dilakukan untuk memproses pencairan dana BLM Tahap II.

Dana BLM yang dicairkan berupa dana pinjaman bergulir sebanyak 80% dan dana pembangunan fisik sebanyak 20%. Berdasarkan data hasil penelitian di lapang total penerimaan dana BLM dari P2KP di Desa Wandanpuro dari tahun 2005 sampai bulan Desember 2008 kurang lebih sebanyak Rp.500,000,000,-. Pada tahun 2005 dana BLM yang cair sebanyak Rp. 100,000,000,- yang kemudian dibagi menjadi dua untuk dana pinjaman bergulir (80%) Rp. 80,000,000,- dan untuk pembangunan fisik (20%) Rp. 20,000,000,-. Sedangkan BKM sendiri mendapatkan dana operasional sebanyak Rp. 5,000,000,- setiap tahunnya. Pada tahun 2007 mendapatkan bantuan dana BLM sebanyak Rp. 76,000,000,- untuk pembangunan fisik yaitu proyek perbaikan dan penyemiran jalan. Digunakan untuk 3 Dusun yaitu Dusun Sidomukti, Dusun Sidorejo dan Dusun Sidomulyo. Dan Rp. 20,000,000,- untuk penambahan dana pinjaman bergulir yang digunakan

KSM. Pada tahun 2008 dana BLM untuk pinjaman bergulir yang turun sebanyak Rp. 50,000,000,- yang digunakan untuk KSM yang memiliki usaha yang masih produktif saja. Sedangkan untuk pembangunan fisik sebanyak Rp. 170,000,000,- yang digunakan untuk pembuatan saluran drainase sepanjang 1,655 m² yang berada di seluruh RW di Desa Wandanpuro. Dana BLM ini pada intinya merupakan dana stimulan untuk kegiatan-kegiatan TRIDAYA yaitu kegiatan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan.

a) Pelaksanaan Pemberdayaan Manusia

Pemberdayaan manusia adalah program P2KP yang tujuan utamanya adalah pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan dan pengurangan beban biaya keluarga miskin melalui bantuan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kelayakan tempat tinggal.

Dari hasil penelitian di lapang, pelaksanaan program-program pemberdayaan manusia P2KP di Desa Wandanpuro dikhususkan untuk peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kegiatan peningkatan dibidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat, bantuan pemenuhan gizi keluarga khususnya balita, ibu hamil dan lansia dan bantuan biaya perawatan kesehatan. Kegiatan peningkatan dibidang pendidikan ditujukan untuk pengadaan sarana pendidikan, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Program-program yang telah dilaksanakan dibidang kesehatan yaitu peningkatan fasilitas posyandu dan pembangunan gedung Polindes Wandanpuro. Sedangkan program dibidang pendidikan yaitu pembangunan gedung TK dan TPQ serta pemberian beasiswa. Perincian kegiatan pelaksanaan program P2KP yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Kegiatan Pemberdayaan Manusia P2KP Desa Wandanpuro

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya (Rp)
1	Bidang Kesehatan			
A	Peningkatan fasilitas polindes	RW 11	72m ²	115.000.000
B	Peningkatan fasilitas posyandu	RW 1-11	7 unit	15.000.000
C	Pengobatan gratis	RW 1-11	150 orang	95.000.000
D	Penghijauan dan kerja bakti	RW 1-11	-	7.200.000
E	Bantuan pemeriksaan kesehatan berkala	RW 1-11	12 orang	12.000.000
F	Bantuan Gizi KK miskin	RW 1-11	30 KK	360.000.000
G	Bantuan untuk pembangunan rumah sehat	RW 1-11	11 rumah	55.000.000
H	Pengelolaan sampah terpadu	RW 1-11	24 unit	24.000.000
2	Bidang Pendidikan			
A	Bea Siswa untuk pendidikan	RW 1-11	30 anak	30.000.000
B	Rehab TK Dharmawanita	RW 1,4,7,8	4 unit	80.000.000
C	Pembangunan gedung permainan dalam untuk TK	RW 1,4,7,8	7x8m ²	160.000.000
D	Kelompok Belajar Paket A dan B	RW 1-11	4 unit	20.000.000
E	Latihan untuk anak putus sekolah usia produktif	RW 1-11	4 unit	30.000.000

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan manusia P2KP di desa Wandanpuro dikhususkan pada dua bidang yaitu bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan dari kegiatan bidang kesehatan ini adalah agar masyarakat Desa Wandanpuro khususnya rumah tangga miskin lebih mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bisa terpenuhi kebutuhan dibidang kesehatan. Selain hal tersebut, tujuannya agar lingkungan masyarakat Desa Wandanpuro lebih bersih dan sehat dengan adanya kegiatan seperti pengelolaan sampah dan penghijauan serta kerja bakti. Sedangkan dalam bidang pendidikan ditujukan untuk rumah tangga miskin atau keluarga yang tidak mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seharusnya didapatkan. Adanya bantuan beasiswa dan bantuan buku-buku pengetahuan sangat membantu dalam proses pembelajaran siswa dan lebih meningkatkan kesadaran betapa pentingnya pendidikan bagi mereka.

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha

Pemberdayaan usaha adalah program P2KP yang diberikan dengan tujuan pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin terutama rumah tangga miskin yang memiliki keinginan untuk berusaha meningkatkan pendapatannya. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha di Desa Wandanpuro ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan meningkatkan pengembangan jumlah usaha. Hal ini didasarkan pada permasalahan banyaknya masyarakat yang belum mampu memanfaatkan lembaga keuangan yang ada, masyarakat belum paham tentang kewirausahaan, masih belum memiliki akses terhadap ketrampilan dan keterbatasan pada modal yang digunakan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, program yang dilaksanakan antara lain mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan, dan peminjaman modal usaha kelompok bergulir. Perincian kegiatan pelaksanaan program P2KP yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi P2KP Desa Wandanpuro

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya (Rp)
1	Meningkatkan kemampuan wirausaha			
A	Latihan dasar kewirausahaan	RW 1-11	45 orang	27.000.000
B	Penumbuhan kelompok usaha sejenis	RW 1-11	5 klp	25.000.000
C	Pendampingan berkelanjutan	RW 1-11	5 klp	15.000.000
2	Meningkatkan ketrampilan dan akses teknologi			
A	Latihan ketrampilan menjahit	RW 1-11	15 orang	15.000.000
B	Latihan ketrampilan kerajinan	RW 1-11	15 orang	15.000.000
C	Latihan ketrampilan pertukangan	RW 1-11	20 orang	20.000.000
D	Latihan ketrampilan pertanian	RW 1-11	20 orang	20.000.000
E	Latihan ketrampilan makanan	RW 1-11	20 orang	20.000.000
F	Latihan ketrampilan peternakan	RW 1-11	20 orang	20.000.000
G	Latihan ketrampilan jasa	RW 1-11	15 orang	15.000.000
3	Meningkatkan pengembangan jumlah usaha			
A	Pinjaman modal usaha/kredit mikro	RW 1-11	518 orang	55.000.000
B	Hibah modal usaha kelompok bergulir	RW 1-11	1 klp	15.000.000
C	Permodalan usaha sistem bagi hasil	RW 1-11	2 klp	20.000.000

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi P2KP di desa Wandanpuro di titikberatkan pada peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan ketrampilan agar masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan untuk melakukan usaha sendiri untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu adanya kegiatan pinjaman modal usaha lebih membantu masyarakat miskin untuk dapat berusaha sendiri terbantu dengan modal yang disediakan oleh P2KP yaitu dana BLM pinjaman bergulir untuk KSM yang ada. Pinjaman yang diberikan kepada masing-masing anggota KSM pertama sebesar Rp. 2,000,000 dan kedua sebesar Rp. 500,000,-. Untuk jasa pinjaman yang dibebankan sebesar 1,5 (satu setengah) % perbulan. Sehingga masing-masing anggota KSM mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 2,500,000,-.

c) Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan adalah program P2KP yang bertujuan untuk terpenuhinya penyediaan dan peningkatan fasilitas umum, dan pengembangan kebutuhan prasarana/sarana dasar lingkungan. Adapun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan ini di Desa Wandanpuro adalah untuk meningkatkan fasilitas lingkungan dimana di khususkan pada fungsi saluran air dan jalan kampung. Hal ini didasarkan pada prioritas permasalahan dimana jika hujan masih terjadi banjir sehingga merusak jalan, mengganggu mobilitas, membahayakan dan mengganggu kesehatan. Sehingga program yang dilaksanakan adalah rehabilitasi drainase (gorong-gorong), pembuatan plengsengan sungai, dan pembuatan selokan. Sedangkan perbaikan jalan kampung dilaksanakan dengan penyemiran jalan yang rusak dan paving dan pengaspalan. Perincian kegiatan pelaksanaan program P2KP yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel 17. Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan P2KP Desa Wandanpuro

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya (Rp)
1	Meningkatkan fasilitas lingkungan (fungsi saluran air dan jalan kampung)			
A	Pembuatan selokan/Drainase	RW 1,2,4,6,8	2005 m	342.000.000
B	Pengerasan jalan kampung	RW 1,2,3	2400 m	561.500.000
C	Rehabilitas Talut/plengsengan sungai	RW 1,2,7,8,9	1179 m	200.000.000
D	Rehab saluran ranting sungai	RW 11	1000 m	120.000.000
E	Penyemiran jalan	RW 1,2,3,4,7,8,10,11	2400 m	40.000.000
2	Meningkatkan kinerja BKM			
A	Pembangunan kantor BKM	RW 4	6x5 m	80.000.000
B	Pembelian fasilitas/peralatan kantor BKM	RW 4	-	30.000.000

Sumber : Analisis data primer, 2008

Pemberdayaan lingkungan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Wandanpuro. Karena bantuan yang diberikan dalam pemberdayaan lingkungan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan memperlancar sarana transportasi.

Dari kegiatan pelaksanaan program P2KP diatas, keterlibatan responden dalam keikutsertaan kegiatan ini sangat baik. Dimana responden semuanya ikut aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan atau program yang dilaksanakan. Seperti dalam kegiatan pemberdayaan usaha, responden secara keseluruhan mengikuti program pinjaman modal usaha kelompok bergulir melalui KSM yang terbentuk. Selain itu keterlibatan dalam pemberdayaan lingkungan juga sangat baik, dimana responden ikut serta dalam pembangunan fisik yaitu perbaikan jalan (pengaspalan), perbaikan drainase (saluran air), dan pembangunan Polindes. Hal ini ditunjukkan juga dengan adanya sistem gotong-royong masyarakat yang masih ada sampai sekarang.

Pada tahap proses pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program dari tahap sosialisai sampai tahap pelaksanaan Tridaya sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat ikut aktif

berpartisipasi dalam setiap proses yang dilakukan dan sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis yang dibuat Pemerintah. Meskipun ada beberapa hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan, akan tetapi dapat diatasi dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat Desa Wandanpuro. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya Program P2KP di Desa Wandanpuro dari tahun 2005 sampai dengan sekarang.

6.3 Dampak Program P2KP di Desa Wandanpuro

Program P2KP di Desa Wandanpuro yang dimulai pada tahun 2005 sudah memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup dari anggota KSM program P2KP dan anggota masyarakat lain khususnya dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program P2KP yang dilaksanakan sampai sekarang mampu mengembangkan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan yang semula dinilai kurang berhasil hingga mampu meningkatkan pendapatan dan meringankan beban biaya hidup untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak program P2KP terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (RTM) yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro. Apabila terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota P2KP maka dapat disimpulkan bahwa program P2KP memiliki manfaat yang sangat berarti bagi RTM yang berarti pula program P2KP yang sudah berlangsung di Desa Wandanpuro layak untuk diteruskan.

Tingkat kesejahteraan RTM yang mengikuti program P2KP dapat dilihat dari 1) Kepemilikan aset, 2) Keadaan pangan, 3) Keadaan sandang, 4) Keadaan papan, 5) Kesehatan, dan 6) Pendidikan. Penilaian tersebut berdasarkan atas pengukuran tingkat kesejahteraan menurut Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan adanya penilaian tersebut maka akan terlihat dampak dari program P2KP terhadap rumah tangga miskin peserta program P2KP. Tingkat kesejahteraan RTM dalam program P2KP di Desa Wandanpuro disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18. Dampak Program P2KP Terhadap Tingkat Kesejahteraan RTM

No	Indikator	Sebelum Pelaksanaan Program P2KP			Sesudah Pelaksanaan Program P2KP			Peningkatan (%)	Ranking
		Skor di-Lapang	Skor Max	Persentase (%)	Skor di lapang	Skor Max	Persentase (%)		
1	Kepemilikan Aset	7.15	15	47.65	9.85	15	65.68	18.02	II
2	Keadaan Pangan	4.67	6	77.78	5.74	6	95.68	17.90	III
3	Keadaan Sandang	2.04	3	67.90	2.74	3	91.36	23.46	I
4	Keadaan Papan	14.74	18	81.89	16.44	18	91.36	9.47	IV
5	Kesehatan	1.93	3	64.20	2.15	3	71.60	7.41	V
6	Pendidikan	2.85	3	95.06	3.00	3	100.00	4.94	VI
Total		33.37	48	69.52*	39.93	48	83.18 *	13.66	--
Kategori		Sedang		Sedang	Tinggi		Tinggi		

Sumber: *Analisi Data Primer, 2008*

* : Persentase (%) dari skor maksimum

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin peserta program P2KP mengalami peningkatan, dimana sebelum mengikuti program P2KP persentase tingkat kesejahteraan yaitu 69,52 % yaitu pada kategori sedang, selanjutnya setelah mengikuti program P2KP menjadi 83,18 % yaitu pada kategori tinggi.

Apabila dilihat dari indikatornya maka indikator yang paling tinggi mengalami peningkatan adalah keadaan sandang dengan skor di lapang sebelum mengikuti program P2KP sebesar 2,04 (67,90%) dan sesudah mengikuti program P2KP sebesar 2,74 (91,36%) dengan demikian peningkatannya sebesar 23,46% dan menempati ranking pertama. Peningkatan ini dapat dilihat dari pakaian yang dimiliki masing-masing anggota keluarga responden lebih dari cukup yaitu mendapatkan 2 stel atau lebih pakaian baru dalam satu tahun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan responden baik dari usaha P2KP maupun dari sumber lain, selain itu juga mudah mendapatkannya dan harganya lebih terjangkau.

Ranking kedua untuk peningkatan kesejahteraan terletak pada indikator kepemilikan aset yaitu sebelum mengikuti program P2KP skor di lapang sebesar 7,15 (47,65%) dan sesudah mengikuti program P2KP sebesar 9,85 (65,68%) dengan peningkatan sebesar 18,02%. Peningkatan kepemilikan aset tersebut dapat

dilihat dari jumlah kepemilikan ternak yang meningkat yaitu responden memiliki hewan ternak seperti kambing dan sapi, jumlah responden yang memiliki sepeda motor bertambah banyak, alat komunikasi yang digunakan juga meningkat yaitu responden yang memiliki hand phone juga bertambah. Sedangkan kepemilikan terhadap lahan sawah tidak terjadi peningkatan, kebanyakan responden menyewa sawah untuk digunakan berusaha tani baik digunakan untuk tanam padi maupun tanam tebu.

Keadaan pangan sebelum mengikuti program skor di lapang sebesar 4,67 (77,78%) dan sesudah mengikuti program sebesar 5,74 (95,68%) dengan peningkatan sebesar 17,90% menempati ranking ketiga. Peningkatan keadaan pangan dilihat dari meningkatnya frekuensi makan dan kebiasaan dalam mengkonsumsi daging/ikan/telur dalam makan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan pendapatan baik dari hasil usaha P2KP maupun dari sumber lainnya, sehingga mempengaruhi pola dan frekuensi makan responden.

Keadaan papan sebelum mengikuti program skor di lapang sebesar 14,74 (81,89%) dan sesudah mengikuti program sebesar 16,44 (91,36%) dengan peningkatan sebesar 9,47% menempati ranking keempat. Hal ini dilihat dari adanya perbaikan kondisi rumah dari sebelum adanya P2KP dengan setelah adanya program P2KP. Peningkatan yang terjadi diantaranya adalah lantai rumah responden yang sudah tegel dan keramik, temboknya sudah diplester, memiliki jaringan listrik sendiri, dan sudah memiliki MCK sendiri. Sedangkan luasan rumah rata-rata standart 8m^2 dan tidak terjadi peningkatan luasan rumah.

Keadaan kesehatan sebelum mengikuti program skor di lapang sebesar 1,93 (64,20%) dan sesudah mengikuti program sebesar 2,15 (71,6%) dengan peningkatan sebesar 7,41% menempati ranking kelima. Hal ini dilihat dari layanan pengobatan yang sering digunakan responden jika anggota keluarganya ada yang sakit. Dari peningkatan yang terjadi sangat kecil, hal ini dikarenakan rata-rata responden memilih untuk berobat ke Posyandu dari pada ke Dokter. Disamping biaya lebih murah, juga dikarenakan Posyandu di Desa Wandanpuro lebih dekat jaraknya dan pelayanannya juga lebih baik.

Keadaan pendidikan sebelum mengikuti program skor di lapang sebesar 2,85 (95,06%) dan sesudah mengikuti program sebesar 3,00 (100%) dengan

peningkatan sebesar 4,94% menempati ranking keenam. Hal ini terjadi dikarenakan anggota keluarga responden yang usia sekolah bersekolah dan sudah menempuh pendidikan minimal tingkat atas atau SMA dan SMK. Sehingga tidak terjadi peningkatan yang besar di indikator pendidikan.

Berdasarkan peningkatan yang terjadi terhadap ke enam indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin peserta program P2KP mengalami peningkatan, dimana sebelum mengikuti program P2KP persentase tingkat kesejahteraan yaitu 69,52 % yaitu pada kategori sedang, selanjutnya setelah mengikuti program P2KP menjadi 83,18 % yaitu pada kategori tinggi. Sehingga dapat dikatakan Program P2KP memiliki dampak yang positif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin anggota P2KP. Dimana keadaan rumah tangga responden selama menjadi anggota Program P2KP menjadi lebih baik dari sebelum adanya program P2KP. Hal ini dilihat dari program-program P2KP yang di buat dan yang telah dilaksanakan banyak membantu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rumah tangganya. Baik dari kemampuan yang dimiliki juga pendapatan dari responden juga meningkat, sehingga banyak membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.

6.3.1 Uji Rank Wilcoxon Terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin

Dari hasil analisis Rank Wilcoxon, maka dapat diketahui dampak dari program P2KP pada RTM peserta program P2KP di Desa Wandanpuro yang diteliti dari perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga responden. Perubahan kesejahteraan ini dibagi menjadi enam, yaitu: kepemilikan aset, keadaan pangan, keadaan sandang, keadaan papan, kesehatan, dan pendidikan, diharapkan dari keenam indikator penentu tingkat kesejahteraan ini dapat memberikan gambaran tentang perubahan tingkat kesejahteraan yang terjadi. Hasil dari analisis Wilcoxon untuk variabel kesejahteraan disajikan dibawah ini:

Tabel 19. Analisis Wilcoxon Terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan Pada RTM

No	Indikator	T _{hitung}	T _{tabel}	Z _{hitung}	Z _{tabel}	Kesimpulan
1	Kepemilikan Aset	-	-	4,54	1,64	Tolak Ho
2	Keadaan Pangan	0	40	-	-	Tolak Ho
3	Keadaan Sandang	0	46	-	-	Tolak Ho
4	Keadaan Papan	-	-	4,46	1,64	Tolak Ho
5	Kesehatan	0	0	-	-	Terima Ho
6	Pendidikan	0	0	-	-	Terima Ho
	Perubahan Tingkat Kesejahteraan	-	-	4,54	1,64	Tolak Ho

Sumber: Analisis Data Primer, 2008

Keterangan:

- apabila $n > 25$ maka menggunakan nilai z tabel adalah $z_{0,05} = 1,64$
- dengan jumlah sampel yang dianalisis 27 sampel
- nilai t_{tabel} didapat dari: Sugiyono "Statistik Non Parametris Untuk Penelitian"

6.3.2 Perubahan Kepemilikan Aset

Indikator tingkat kesejahteraan dalam perubahan aset yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas kepemilikan lahan responden yang dipergunakan untuk berusaha tani, kepemilikan ternak, alat transportasi yang dimiliki, alat komunikasi dan alat hiburan atau media elektronik yang dimiliki anggota keluarga. Dari perubahan banyaknya jumlah kepemilikan aset yang dimiliki sebelum dan sesudah adanya program P2KP menandakan adanya perubahan pada tingkat kesejahteraan responden.

Dari Tabel 18 diatas dapat dilihat bahwa untuk kepemilikan aset responden sebelum mengikuti program P2KP mendapat skor di lapang sebesar 7,15 (47,65%) dan sesudah mengikuti program meningkat sebesar 9,85 (65,68%) dan termasuk dalam kategori sedang, dimana persentase peningkatan mencapai 18,02%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah atau banyaknya aset yang dimiliki responden setelah mengikuti program P2KP semakin bertambah. Dari

kepemilikan lahan sawah tidak banyak meningkat setelah adanya program P2KP hanya 7 responden yang mengalami peningkatan kepemilikan lahan. Rata-rata kepemilikan luas lahan responden kurang dari 0,33 ha dan hanya 3 responden yang memiliki luas lahan lebih dari 0,77 ha. Hal ini dikarenakan harga beli lahan yang sangat mahal sehingga responden lebih banyak memilih untuk sewa lahan yang digunakan usahatani baik untuk padi maupun tebu. Dengan pertimbangan lebih murah jika sewa pertahun atau permusin dan dapat menambah penghasilan. Selain itu masyarakat Desa Wandanpuro lebih banyak bekerja di bidang non pertanian seperti berdagang karena letak desa yang dekat dengan pusat kota kecamatan dan dekat dengan pasar.

Peningkatan yang terjadi selain kepemilikan luas lahan adalah kepemilikan ternak yaitu sebelum program P2KP responden sebagian besar hanya memiliki ayam dan kambing, akan tetapi setelah program P2KP responden ada yang memiliki kambing dan sapi. Dari hasil penelitian, sebagian responden menyisihkan pendapatannya baik dari usaha program P2KP dan penghasilan lain untuk dibelikan hewan ternak. Alasan responden memiliki sapi dan kambing adalah sebagai bentuk tabungan untuk keperluan keluarga. Dari program P2KP juga ada program Kambing Bergulir. Program ini pada dasarnya adalah memberikan anggota P2KP indukan kambing yaitu induk kambing jantan dan betina. Setelah induk kambing ini beranak maka anakan menjadi milik anggota yang merawat sedangkan induk kambing dikembalikan lagi ke Unit Pengelola Program P2KP.

Sedangkan kepemilikan terhadap alat transportasi juga mengalami peningkatan setelah adanya program P2KP. Alat transportasi yang dimiliki responden sebelum program P2KP sebagian besar telah memiliki sepeda motor dan sepeda sebagai alat transportasi. Sebelum program P2KP ada 9 responden yang memiliki kendaraan sepeda motor, sedangkan setelah adanya program P2KP sebanyak 23 responden yang memiliki sepeda motor dan 2 responden diantaranya memiliki mobil. Sepeda motor dan sepeda ini banyak dimiliki karena menyangkut harga dan pajaknya yang murah. Selain itu, responden juga membeli secara kredit yang harga dan cicilanya tidak terlalu memberatkan mereka. Sehingga responden sebagian menyisihkan pendapatannya baik dari usaha P2KP dan penghasilan lain

untuk membeli sepeda motor baik secara kredit maupun secara tunai. Alasan responden memiliki sepeda motor juga untuk mendukung kelancaran usaha yang dijalankan responden.

Untuk alat komunikasi juga mengalami peningkatan setelah program P2KP. Sebelum P2KP sebanyak 10 responden yang telah memiliki alat komunikasi berupa telfon rumah maupun hand phone, sedangkan setelah P2KP hanya 2 responden yang masih belum memiliki alat komunikasi. Alasan responden dengan adanya peningkatan kepemilikan adalah untuk memperlancar usahanya.

Peningkatan yang terjadi dalam kepemilikan aset sebelum program P2KP dengan sesudah program P2KP juga dibuktikan dengan hasil analisis Uji Wilcoxon untuk perubahan kepemilikan aset, yaitu diperoleh nilai Z_{hitung} 4,54 dengan Z_{tabel} 1,64, dengan kesimpulan Tolak H_0 , artinya terjadi perubahan kepemilikan aset setelah diadakan program P2KP. Peningkatan kepemilikan aset responden dikarenakan adanya bantuan yang diberikan dalam program P2KP baik berupa modal usaha maupun sarana prasarana untuk meningkatkan usaha anggota P2KP dalam berusahatani, berdagang maupun lainnya. Selain itu, sumber penghasilan yang lain baik dari bekerja juga membantu meningkatkan kepemilikan aset yang dimiliki responden. Oleh karena itu, dengan adanya program P2KP ini responden mengatakan sangat terbantu dalam mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari yaitu meningkatkan kepemilikan aset yang dimiliki dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga responden.

6.3.3 Perubahan Keadaan Pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan anggota rumah tangga miskin yang ikut dalam program P2KP di Desa Wandanpuro adalah keadaan pangan dari responden. Ditinjau dari keadaan pangan, indikator yang digunakan untuk mengetahui kecukupan pangan responden dalam penelitian ini adalah dari frekuensi makan anggota keluarga dalam satu hari, dan kebiasaan mengonsumsi (daging/ikan/telur).

Hasil analisis Uji Wilcoxon untuk perubahan keadaan pangan diperoleh t_{hitung} 0 dengan t_{tabel} 40, sehingga kesimpulannya Tolak H_0 , artinya telah terjadi

perubahan dalam keadaan pangan responden. Perubahan tersebut yaitu frekuensi makan dalam satu hari dan kebiasaan pola mengkonsumsi (daging/ikan/telur). Perubahan yang terjadi mengarah pada kesadaran rumah tangga responden dalam memenuhi kesehatan yang berasal dari makan frekuensi makan tiga kali sehari selain itu peningkatan pendapatan juga berpengaruh pada frekuensi makan dan pola mengkonsumsi (daging/ikan/telur).

Menurut BKKBN bahwa frekuensi makan 2 kali sehari termasuk dalam indikator keluarga prasejahtera (sangat miskin). Sesuai dengan hasil penelitian, untuk keadaan pangan rumah tangga sebelum program P2KP sudah termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 18 sebelum mengikuti program P2KP didapatkan skor di lapang 4,67 (77,78%), dimana ada sebagian responden makan dengan frekuensi tiga kali sehari namun seminggu sekali mengkonsumsi (daging/ikan/telur). Sedangkan setelah mengikuti program P2KP secara keseluruhan frekuensi makannya meningkat menjadi tiga kali dalam sehari dan setiap hari mengkonsumsi (daging/ikan/telur) dengan skor di lapang yang diperoleh sebesar 5,74 (95,68%), serta persentase peningkatan mencapai 17,90%. Dilihat dari peningkatannya bahwa frekuensi makan responden meningkat yang semula dua kali sehari menjadi tiga kali sehari dan mengkonsumsi (daging/ikan/telur) setiap hari meskipun masih ada yang seminggu sekali.

Peningkatan atau perubahan pola makan yang terjadi dikarenakan adanya peningkatan penghasilan dari usaha yang dilakukan seperti hasil usaha sampingan selain pekerjaan tetap responden. Sehingga dengan frekuensi makan tiga kali sehari akan meningkatkan kesehatan bagi anggota keluarga responden. Seperti yang diungkapkan ibu Nurul bahwa untuk frekuensi makan dalam sehari tetap tiga kali tetapi lauknya atau pola mengkonsumsi (daging/ikan/telur) meningkat dan mengikuti jumlah pendapatan, hal ini untuk menjaga agar badan tetap sehat dan tidak sakit-sakitan.

6.3.4 Perubahan Keadaan Sandang

Perubahan keadaan sandang dalam penelitian ini mengarah pada perubahan responden dalam membeli pakaian baru dalam setiap tahunnya. Untuk perubahan ini dapat dilihat dalam analisis Uji Wilcoxon bahwa didapat nilai t_{hitung}

0 dengan t_{tabel} 46, sehingga kesimpulannya Tolak H_0 , artinya terjadi perubahan dari sebelum diadakan program P2KP dan sesudah diadakan program P2KP. Perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan setelah mengikuti program P2KP yaitu hasil dari usaha program P2KP maupun dari sumber pendapatan lain.

Dari Tabel 18 dapat dilihat dari sebelum diadakan program P2KP skor yang didapat adalah sebesar 2,04 (67,90%). Sedangkan sesudah diadakan program P2KP skor yang diperoleh sebesar 2,74 (91,36%) dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu lebih dari cukup dimana anggota keluarga mendapatkan 2 stel pakaian baru dalam 1 tahun, dengan persentase peningkatan sebesar 23,46% yang merupakan peningkatan terbanyak dari indikator tingkat kesejahteraan. Kenaikan ini disebabkan karena responden memiliki penghasilan lebih besar dari pada sebelum mengikuti program P2KP. Sehingga sebagai responden mampu membelikan pakaian baru bagi anggota keluarganya. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Sugiarti bahwa beliau dapat membelikan pakaian lebih dari satu stel dikarenakan pendapatan yang diperoleh lebih besar dari sebelumnya.

Menurut BKKBN dijelaskan bahwa kondisi rumah tangga dalam hal sandang dikatakan sejahtera apabila setiap anggota keluarga memiliki dua stel pakaian baru atau lebih dalam satu tahun. Dari hasil pengamatan di lapangan sebelum adanya program P2KP bahwa keadaan sandang responden cukup yaitu masing-masing anggota keluarga mendapatkan 1 stel pakaian baru yang umumnya hanya dapat membeli pakaian baru saat hari raya lebaran, sedangkan setelah adanya program P2KP menjadi lebih dari cukup dimana masing-masing anggota mendapatkan 2 stel pakaian baru dalam satu tahun. Sebagian responden menjawab alasannya dulu harga pakian masih mahal sedangkan sekarang sudah murah dan bisa dijangkau dengan mudah.

6.3.5 Perubahan Keadaan Papan

Menurut BKKBN dijelaskan bahwa kondisi rumah tangga yang berkaitan dengan keadaan papan, keluarga dikatakan sejahtera apabila luas lantai rumah paling tidak mencukupi untuk aktifitas sehari-hari. Namun dikatakan keluarga prasejahtera (sangat miskin) apabila rumah yang ditempati dalam keluarga

tersebut layak huni dan sarana air bersih dan MCK belum memadai. Dalam penelitian ini, tingkat kesejahteraan dilihat dari keadaan papan yang dinilai dari luas rumah yang ditinggali, keadaan lantai, keadaan tembok, keadaan atap, penerangan dan persediaan air bersih dan MCK responden.

Dari Tabel 18 di atas dapat terlihat perubahan keadaan papan responden setelah mengikuti program P2KP. Sebelum adanya program P2KP skor di lapang keadaan papan sebesar 14,74 (81,89%) dan setelah program P2KP skornya menjadi 16,44 (91,36%) dimana mengalami peningkatan sebesar 9,47%. Kondisi keadaan papan sebelum adanya program P2KP sudah termasuk kategori layak, dimana secara umum keadaan rumah dari luasan standar, lantai plester semen, tembok sebagian plester, dan beratap genting.

Peningkatan yang terjadi dalam keadaan papan setelah adanya program P2KP adalah keadaan atau kondisi lantai rumah responden yang lebih baik yaitu sudah menggunakan tegel dan keramik. Daripada sebelum adanya program P2KP yang hanya di plester semen saja. Responden mengatakan jika rumah menggunakan lantai tegel atau keramik lebih terlihat bersih dan tidak kumuh sehingga lebih sehat dan mudah perawatannya. Hal ini juga terjadi pada keadaan tembok rumah. Dimana sebelum adanya program P2KP ada rumah responden yang masih belum diplester, tetapi setelah adanya program P2KP keadaan tembok responden rata-rata sudah diplester meskipun hanya bagian dalam rumah saja tidak secara keseluruhan rumah. Responden menyatakan sebagian uang yang digunakan untuk merenovasi rumah adalah hasil dari usaha program P2KP sehingga sangat membantu sekali untuk memperbaiki keadaan rumah responden.

Untuk penerangan juga mengalami peningkatan yaitu sebelum adanya program P2KP sebagian penerangan masih ikut orang lain atau listrik masih belum pasang sendiri sebanyak 10 responden, sedangkan setelah adanya program P2KP sarana penerangan sudah menggunakan listrik sendiri-sendiri hanya 1 responden yang masih ikut orang lain. Kondisi persediaan air dan MCK rumah responden juga mengalami peningkatan setelah program P2KP. Kondisi MCK sebelum program P2KP sebagian masih ikut di MCK milik umum sebanyak 15 responden. Akan tetapi untuk persediaan air bersih sudah tersedia di rumah masing-masing meskipun sebagian masih mengambil air di MCK umum.

Sedangkan setelah adanya program P2KP di Desa Wandanpuro persediaan air dan MCK responden sudah memiliki sendiri hanya 2 responden dari 27 responden yang masih belum memiliki MCK sendiri. Untuk persediaan air responden kebanyakan mengambil dari sumur yang dibuat dipekaranganya. Selain itu dari program P2KP yang dilaksanakan di Desa Wandanpuro juga ada kegiatan untuk memperbaiki saluran drainase dan persediaan air untuk masyarakat serta pembangunan MCK untuk umum.

Sedangkan untuk luas rumah yang ditinggali responden rata-rata tidak ada peningkatan sesudah adanya program P2KP yaitu standart 8 m² masih sama dengan sebelum adanya program P2KP. Responden menyatakan untuk pembangunan dan pelebaran rumah memerlukan biaya yang banyak, sehingga uangnya lebih baik digunakan hanya untuk merenovasi saja dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga terjadi pada keadaan atap rumah responden yaitu tidak terjadi perubahan baik sebelum maupun sesudah adanya program P2KP yaitu sudah menggunakan genting untuk atap rumahnya.

Peningkatan dalam keadaan papan responden setelah program P2KP juga dapat dilihat dari hasil analisis Uji Wilcoxon terhadap perubahan keadaan papan responden yaitu diperoleh Z_{hitung} 4,46 dengan Z_{tabel} 1,64, sehingga kesimpulannya Tolak H_0 , artinya artinya terjadi perubahan keadaan papan setelah diadakan program P2KP. Hal ini mendukung dari hasil penilaian pada Tabel 18 yang menunjukkan peningkatan keadaan papan peserta program P2KP meskipun hanya 9,47%, akan tetapi sudah menunjukkan bahwa terjadi perubahan kondisi papan anggota P2KP setelah adanya program P2KP dilaksanakan di Desa Wandanpuro.

6.3.6 Perubahan Kesehatan

Menurut BKKBN dijelaskan bahwa kesehatan dalam artian keluarga sejahtera apabila anak sakit dibawa ke petugas kesehatan atau pengobatan modern. Keadaan kesehatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator layanan pengobatan atau kesehatan yang sering digunakan anggota keluarga jika ada anggota keluarga yang sakit.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk indikator tingkat kesejahteraan pada tingkat kesehatan dapat dilihat pada Tabel 18 dimana skor di lapang keadaan

kesehatan responden sebelum mengikuti program sebesar 1,93 (64,20%) dan setelah mengikuti program P2KP skor yang diperoleh sebesar 2,15 (71,60%), dan persentase peningkatan adalah sebesar 7,41%. Dari hasil pengamatan di lapang, sebelum dan sesudah adanya program P2KP sebagian besar responden memilih untuk layanan pengobatan atau kesehatan jika anggota keluarga responden ada yang sakit dibawa ke Posyandu yang ada di Desa Wandanpuro. Hal ini dikarenakan layanan kesehatan yang ada di Desa Wandanpuro hanya ada Posyandu dan Polindes saja, sedangkan untuk Dokter Umum atau Dokter Khusus masih sedikit. Peningkatan kesehatan yang terjadi di Desa tersebut adalah perubahan dari layanan kesehatan yang sebelumnya Posyandu berubah untuk menggunakan layanan Dokter Khusus yang hanya dilakukan oleh 4 responden dari 27 responden. Alasan memilih Dokter Khusus dikarenakan jenis sakit anggota keluarga responden yang memerlukan penanganan khusus dari dokter.

Hasil analisis Uji Wilcoxon untuk perubahan kesehatan, diperoleh kesimpulan Terima Ho, artinya tidak terjadi perubahan kesehatan dari setelah diadakan program P2KP. Hal ini sesuai hasil dari pengamatan di lapang yaitu layanan kesehatan yang sering digunakan baik sebelum dan sesudah adanya Program P2KP adalah layanan Posyandu. Layanan Posyandu di Desa Wandanpuro tetap menjadi pilihan masyarakat karena dari program P2KP telah memberikan bantuan dana untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat seperti pembangunan Polindes.

6.3.7 Perubahan Pendidikan

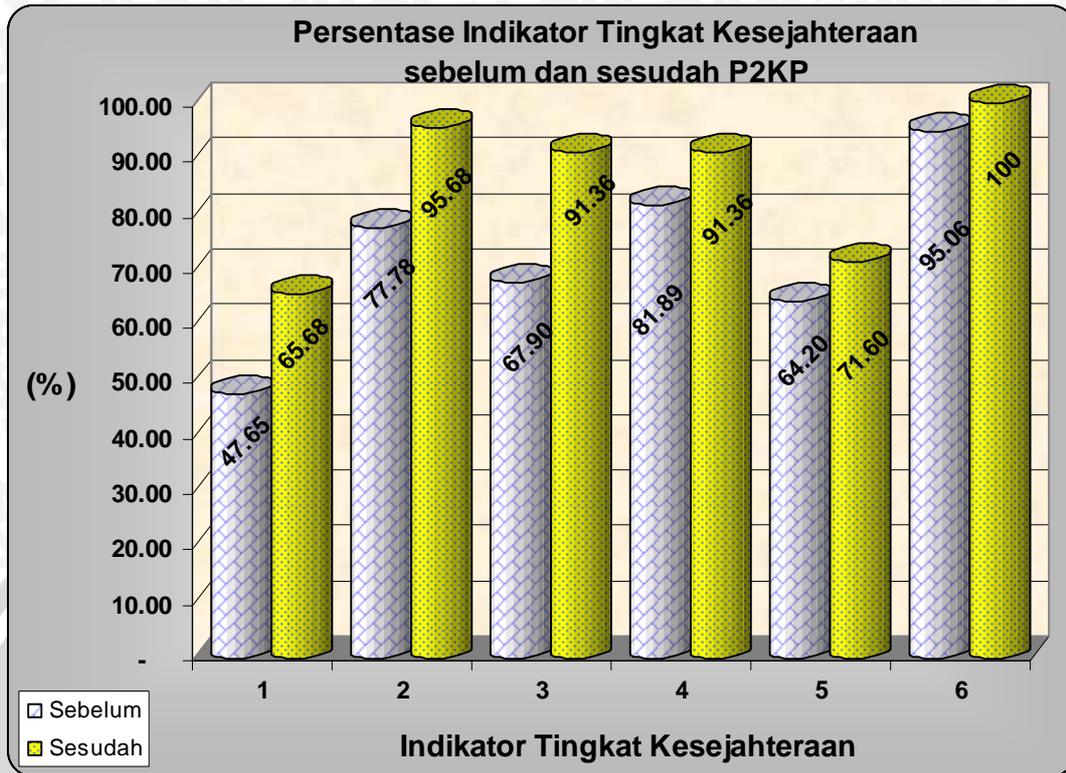
Perubahan pendidikan dalam penelitian ini adalah apabila ada perubahan pada RTM dalam tingkat pendidikan pada anak usia sekolah yang bersekolah sebelum program P2KP, dibandingkan anak usia sekolah yang bersekolah sesudah program P2KP. Menurut BKKBN dijelaskan bahwa kondisi pendidikan keluarga yang sejahtera apabila kebutuhan akan pendidikan terpenuhi. Indikator pendidikan dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator pendidikan anak usia sekolah.

Hasil analisis Uji Wilcoxon untuk perubahan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 19 dan disimpulkan bahwa Terima Ho, artinya tidak terjadi perubahan

tingkat pendidikan pada rumah tangga responden setelah diadakan program P2KP. Hal ini juga dapat dilihat pada Tabel 18 dimana skor pendidikan yang diperoleh pada kategori tinggi. Dimana tingkat pendidikan anak usia sekolah keluarga responden semuanya bersekolah. Dari 27 responden yang diteliti yang memiliki anak usia sekolah semuanya bersekolah dimana sebagian responden memiliki anak usia sekolah yang telah selesai menempuh pendidikan pada tahun sebelumnya. Sehingga didapatkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Wandanpuro dapat dikatakan baik, dimana orang tua menganggap pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya. Selain itu dengan adanya program P2KP di Desa Wandanpuro dengan program peningkatan dan pembangunan di bidang sumberdaya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya masyarakat Desa Wandanpuro dengan berbagai pembangunan fasilitas sekolah baik formal maupun informal seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

6.3.8 Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Selain menganalisis tiap indikator, juga dilakukan analisis secara keseluruhan atau secara umum untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin. Hal ini digunakan untuk menguji hipotesis umum. Untuk perubahan tingkat kesejahteraan hasil analisis Uji Wilcoxon dapat dilihat pada Tabel 19 bahwa untuk tingkat perubahan kesejahteraan sebelum dan sesudah program P2KP diperoleh nilai Z_{hitung} sebesar 4,54 dan Z_{tabel} 1,64, sehingga kesimpulannya Tolak H_0 , artinya telah terjadi perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga responden di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Terjadi perubahan kesejahteraan karena sebagian besar RTM mengaku merasakan dampak yang positif dari program P2KP yang dilaksanakan di desanya. Untuk lebih jelas dibawah ini disajikan persentase indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga responden, berikut ini:



Gambar 4. Persentase Tingkat Kesejahteraan Responden

Keterangan:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Kepemilikan Aset | 4. Keadaan Papan |
| 2. Keadaan Pangan | 5. Kesehatan |
| 3. Keadaan Sandang | 6. Pendidikan |

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dapat diperoleh rumah tangga miskin di Desa Wandanpuro ini dari program P2KP adalah adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Keadaan tingkat kesejahteraan rumah tangga responden sebelum dan sesudah adanya program P2KP jika dikaitkan dengan indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN maka sebagian besar kondisi rumah tangga responden sebelum mengikuti program P2KP tergolong kategori keluarga sejatera 1 (miskin) dan sebagian kecil ada yang prasejahtera (sangat miskin). Dalam teori BKKBN dikatakan keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: makan 2 kali sehari, memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas, tingkat kesehatan yang selalu dijaga, rumah yang layak huni dan

lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan untuk kategori keluarga miskin (sejahtera 1) adalah paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau telur atau ikan, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8m^2 dan usia 6-15 tahun bersekolah.

Setelah responden mengikuti program P2KP selama kurang lebih 4 tahun, maka dari hasil pengamatan dan hasil analisis data diketahui bahwa terjadi perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga responden, dimana sekarang sebagian besar rumah tangga responden termasuk dalam kategori keluarga sejahtera 2 bahkan ada responden yang tergolong sejahtera 3. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang meliputi keadaan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan sudah dapat dipenuhi dan memberikan manfaat bagi rumah tangga responden, meskipun ada sebagian kecil yang belum terpenuhi.

Perubahan tingkat kesejahteraan RTM sebelum dan sesudah mengikuti program P2KP sebesar 13,66 %. Perubahan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dalam peningkatan kepemilikan aset responden. Diantaranya adalah kepemilikan ternak, alat transportasi, alat komunikasi dan alat hiburan keluarga responden. Peningkatan kepemilikan aset sebesar 18,02 %. Hal ini sejalan dengan program P2KP yang secara langsung telah memberikan bantuan berupa modal kepada anggota P2KP untuk digunakan sebagai modal usaha baik di bidang pertanian maupun non pertanian.

Hasil pendapatan juga berpengaruh pada keadaan pangan terhadap frekuensi makan yang mereka lakukan dalam satu hari. Kebiasaan frekuensi makan sehari 2 kali menjadi 3 kali sehari, dan konsumsi (daging/ikan/telur) seminggu sekali menjadi setiap hari meskipun tidak semua responden melakukan perubahan pola makan. Dari hasil analisis dapat diketahui hasilnya dari peningkatan yang sebesar 17,90%. Kondisi sandang rata-rata sebelum mengikuti program P2KP dalam kurun waktu satu tahun masing-masing anggota keluarga mendapatkan satu stel pakaian baru. Dengan adanya program P2KP terjadi perubahan menjadi lebih dari satu kali, meskipun tidak semua keluarga membelikan pakaian baru dalam satu tahun sebanyak lebih dari satu. Dimana peningkatan yang terjadi sebesar 23,46%.

Kondisi papan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,47% diantaranya keadaan lantai rumah yang sebelumnya masih tanah dan berplester semen menjadi keramik atau tegel, tembok menjadi berplester dan penerangan yang sudah menggunakan listrik sendiri. Untuk MCK dan persediaan air bersih sebagian besar responden sudah memiliki sendiri hanya 2 responden yang masih menggunakan milik umum. Dari pengamatan di lapang responden rata-rata memiliki sumur untuk persediaan air bersih baik untuk dikonsumsi maupun untuk MCK. Untuk tingkat kesehatan responden dikarenakan layanan kesehatan yang ada hanya Posyandu dan polindes maka untuk peningkatan kesehatan hanya sebesar 7,41% dimana peningkatan tersebut adalah layanan kesehatan yang digunakan memilih Dokter khusus. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di ukur dari anak usia sekolah keluarga responden. Tingkat pendidikan tidak mengalami peningkatan dimana hanya 4,94% yaitu semua anak usia sekolah telah bersekolah.

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program P2KP berdampak positif terhadap perubahan kesejahteraan rumah tangga miskin, hal ini sesuai dengan hipotesa yang telah dibuat sebelumnya. Dimana manfaat yang didapat dari program P2KP sudah baik dengan adanya perubahan peningkatan kesejahteraan rumah tangga responden peserta program P2KP. Sebelum mengikuti program P2KP tingkat kesejahteraan rumah tangga responden berada pada kategori sedang dan setelah mengikuti program P2KP tingkat kesejahteraan rumah tangga responden berada pada kategori tinggi. Sesuai dengan penelitian di lapang bahwa kenaikan kesejahteraan rumah tangga responden tidak secara keseluruhan disebabkan oleh pendapatan dari usaha – usaha yang dijalankan dalam program P2KP, akan tetapi disebabkan juga adanya penghasilan dari luar program P2KP yaitu seperti berusaha tani, bekerja sampingan seperti bekerja di pabrik rokok dan lainnya. Sehingga dengan adanya program P2KP manfaat yang dirasakan responden sebagian besar adalah sangat terbantu dari segi penghasilan yaitu dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga responden. Dengan adanya program P2KP kesejahteraan rumah tangga responden menjadi lebih baik, baik dari kondisi sandang, pangan, dan papan maupun kesehatan dan pendidikan rumah tangga responden.

Dengan demikian program P2KP berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga responden yang ada di Desa Wandanpuro, sehingga program ini layak untuk dipertahankan dan sebarluaskan, yang nantinya akan membawa perubahan yang berarti bagi rumah tangga responden di Desa ini maupun desa lain dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta semua pelaku program terutama rumah tangga responden itu sendiri. Dengan melihat hasil perkembangan selama beberapa periode sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menetapkan Program P2KP ini sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang sekarang lebih disempurnakan lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimana program ini lebih menitikberatkan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pemberdayaan masyarakat.



VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Program P2KP di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Program P2KP di Desa Wandanpuro dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan kegiatan program yaitu : a) Sosialisasi, b) Rembuk Kesiapan Masyarakat, c) Refleksi kemiskinan, d) Pemetaan Swadaya, e) Pembentukan BKM, f) Perencanaan Partisipatif, g) Pelaksanaan Pemberdayaan Tridaya (Manusia, Ekonomi dan Lingkungan). Meskipun ada beberapa hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan, akan tetapi dapat diatasi dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat Desa Wandanpuro. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya Program P2KP di Desa Wandanpuro dari tahun 2005 sampai dengan sekarang.
2. Dampak dari pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang adalah berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin, yaitu terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik setelah dilaksanakannya program P2KP. Dampak yang dirasakan adalah perubahan tingkat kesejahteraan responden, yaitu tingkat kesejahteraan sebelum mengikuti P2KP berada dalam kategori sedang, selanjutnya setelah mengikuti P2KP berada dalam kategori tinggi. Perubahan tingkat kesejahteraan responden tersebut dilihat dari perubahan kepemilikan aset, keadaan pangan, keadaan sandang, keadaan papan, kesehatan dan pendidikan. Dari perubahan tersebut diperoleh perubahan tingkat kesejahteraan responden yang sebelumnya 69,52% menjadi 83,18%, sehingga mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar 13,66%. Perubahan kesejahteraan tersebut dibuktikan dengan hasil analisis Uji Wilcoxon. Yaitu yang diperoleh kesimpulan terjadi perubahan tingkat kesejahteraan responden anggota program P2KP di Desa Wandanpuro. Dengan adanya program P2KP

manfaat yang dirasakan responden sebagian besar adalah sangat terbantu dari segi penghasilan yaitu dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga responden. Dengan adanya program P2KP kesejahteraan rumah tangga responden menjadi lebih baik, baik dari kondisi sandang, pangan, dan papan maupun kesehatan dan pendidikan rumah tangga responden.

7.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pelaksanaan program P2KP di Desa Wandanpuro khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha perlu di bentuk sebuah wadah organisasi sebagai bentuk kelanjutan dari program pelatihan ketrampilan seperti kelompok-kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) agar kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat tersalurkan.
2. Manfaat dari Program P2KP di Desa Wandanpuro belum dirasakan oleh keseluruhan rumah tangga miskin, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan partisipasi yang aktif dari rumah tangga miskin.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan Program P2KP dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin sebagai bentuk perbandingan dengan pelaksanaan program di wilayah lain. Sehingga dapat diketahui solusi-solusi untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program P2KP selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Coki Syahwier. 2005. **Kemiskinan Dan Kesejahteraan Bangsa**. Artikel Kemiskinan.
- Anonymous, 2005 a. **Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju dan Mandiri**. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan. Jakarta
- _____, 2005 b. **Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kantor Menteri Negara Kependudukan BKKBN**. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. PT. Asdi Mahasatya. Jakarta
- Awang, Sang Afri dkk. 1999. **Program IDT Dan Pemberdayaan Masyarakat**. Aditya Media. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) (1997). **Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan**. Aditya Media. Yogyakarta.
- BAPPENAS, 2004. **Menanggulangi Kemiskinan Desa**. Artikel-Ekonomi Rakyat dan kemiskinan. Yogyakarta.
- Cahyat, Ade. 2004. **Bagaimana Kemiskinan Diukur**. Cifor. Bogor.
- Chambers, Robert. 1987. **Pembangunan Desa**. LP3ES. Jakarta
- Dillon, HS. 2001. **Paradigma Yang Pro Kaum Miskin Dan Pro Keadilan: Belajar Dari Kesalahan Masa Lalu**. Jakarta
- Hidayat, H. 1989. **Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial**. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kuncoro Yakti, Dorajatun. 1986. **Kemiskinan Di Indonesia**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lubis, Mochtar. 1983. **Tirai Kemiskinan (Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga)**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mubyarto 2005. **Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah**. Yogyakarta.
- P2KP, 2007. **Buku Pedoman PNPM-P2KP 2007**. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1986. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Surabaya.

Sahdan, Gregorius. 2005. **Menanggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan**. Yogyakarta.

Sari, Dika Mey Ani Diana. 2007. **Pelaksanaan dan Dampak Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin**. Skripsi Fakultas Pertanian UB.Malang.

Sajogyo, 1985. **Pertanian Dan Kemiskinan Di Jawa**. PT. Gramedia. Jakarta.

Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. **Metode Penelitian Survei**. LP3S. Jakarta.

Sugiyono, 2008. **Statistik Non Parametris**. CV. Alfabeta. Bandung

Suharto, Edi. 2006. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. PT. Refika Aditama. Bandung

Suparlan, Parsudi 1984. **Kemiskinan Di Perkotaan**. Sinar Harapan. Jakarta.

The World Bank. 2006. **Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**. Bank Dunia. Jakarta.

Tim P3PK UGM, 1994. **Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan**. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan . Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

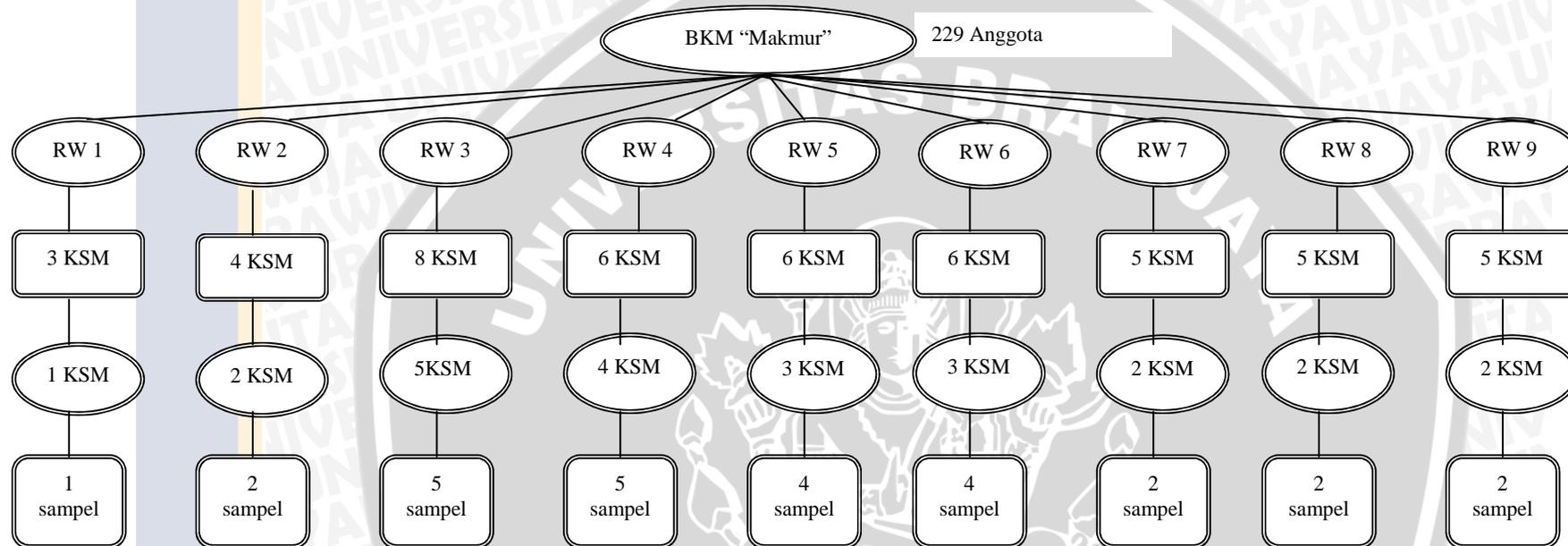
Tim Persiapan P2KP. 2004. **Pedoman Umum P2KP**. Proyek P2KP Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.

Umar, Husein. 1999. **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis**. Cetakan kedua. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Lampiran 1. Daftar Nama Responden

No	Nama	Umur (thn)	JK	Pendidikan	Status dlm Kelompok	KSM
1	Sumarlik	42	P	SD	Ketua	Anggrek
2	Jaenap	73	P	SD	Anggota	Jaya
3	Hari Santoso	50	L	SMA	Anggota	Anggrek 1
4	Karmidjan	73	L	SD	Anggota	Flamboyan
5	Astikah	65	P	SD	Anggota	Lily
6	Supeno	61	L	SMA	Anggota	Anugerah
7	Djarwadi	50	L	SD	Anggota	Samudra
8	Ramu	61	L	SD	Anggota	Bakung
9	Nurul L	38	P	SMA	Ketua	Rajawali
10	Sugiarti	37	P	SMA	Anggota	Rajawali
11	Ismiwati	35	P	SMP	Anggota	Manfaat
12	Supani	40	L	SMA	Anggota	Mekarsari
13	Ririn Indrawati	36	P	SMA	Ketua	Barokah 1
14	Sri Astuti	42	P	SD	Anggota	Kenari 2
15	Sulikah	44	P	SMP	Anggota	Bimasakti
16	Agus Suyitno	40	L	SMP	Anggota	Srikandi
17	Sumiatun	59	P	SD	Anggota	Srikandi
18	Asmani	40	P	SD	Anggota	Abimanyu
19	Listyaningih	39	P	SMP	Anggota	Nusa Indah
20	Subani	50	L	SMP	Anggota	Nusa Indah
21	Tuni	57	P	SD	Anggota	Sri rejeki
22	Lailiyah	51	P	SD	Anggota	Anggrek 2
23	Wiwik Endang	31	P	S1	Anggota	Melati
24	Sugina	45	P	SD	Anggota	Mekarsari
25	Siti Aisah	47	P	SD	Anggota	Mawar 3
26	Suryadi	48	L	SMP	Anggota	Barokah 2
27	Atim Supriyanto	50	L	SMP	Ketua	Barokah 2

Lampiran 2. Skema Pengambilan Sampel dengan *Multistage Random Sampling*



Keterangan:

BKM : BKM di desa tempat penelitian

RW : RW yang ada di desa tersebut

KSM : KSM yang ada di RW tersebut

Lampiran 3. Skor dan Rangking Kepemilikan Asset RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	7	10	+3	18	
2	8	12	+4	23.5	
3	8	9	+1	3	
4	5	7	+2	9	
5	7	13	+6	27	
6	7	9	+2	9	
7	7	9	+2	9	
8	6	9	+3	18	
9	8	12	+4	23.5	
10	7	11	+4	23.5	
11	6	7	+1	3	
12	7	10	+3	18	
13	7	9	+2	9	
14	9	10	+1	3	
15	8	13	+5	26	
16	6	8	+2	9	
17	7	10	+3	18	
18	6	9	+3	18	
19	7	10	+3	18	
20	9	11	+2	9	
21	8	10	+2	9	
22	6	9	+3	18	
23	9	11	+2	9	
24	7	11	+4	23.5	
25	8	10	+2	9	
26	7	9	+2	9	
27	6	8	+2	9	
Total				363	0

Ket:

$$1 = 1+2+3 = 6/2 = 3$$

$$2 = 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 = 99/11 = 9$$

$$3 = 15+16+17+18+19+20+21 = 126/7 = 18$$

$$4 = 22+23+24+25 = 94/4 = 23.5$$

$$5 = 26 = 26/1 = 26$$

$$6 = 27 = 27/1 = 27$$

Perhitungan:

$n > 25$ maka menggunakan rumus Tes Rangking Bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan

Jumlah rangking positif = 363

Jumlah rangking negatif = 0

$$n = 27$$

$$\mu T = n(n+1)/4 = 27(27+1)/4 = 189$$

$$\sigma_T = \sqrt{N(N+1)(2N+1)/24} = \sqrt{27(27+1)(2.27+1)/24} = \sqrt{1732,5} = 41,62$$

$$Z = |(T - \mu T) / \sigma T| = |(0 - 189) / 41,62| \quad \mathbf{Zhit} = \mathbf{4,541}$$

Z tabel (0,05) = 1,64, Jadi Z hit > Z tabel maka tolak H_0 , ini berarti terjadi perubahan kepemilikan asset RTM sesudah program P2KP.

Lampiran 4. Skor dan Rangking Keadaan Pangan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	4	6	+2	17.5	
2	5	6	+1	7	
3	6	6	0		
4	2	4	+2	17.5	
5	5	6	+1	7	
6	4	6	+2	17.5	
7	4	6	+2	17.5	
8	4	6	+2	17.5	
9	5	6	+1	7	
10	5	6	+1	7	
11	5	5	0		
12	6	6	0		
13	6	6	0		
14	4	5	+1	7	
15	5	6	+1	7	
16	5	6	+1	7	
17	4	6	+2	17.5	
18	5	6	+1	7	
19	4	5	+1	7	
20	4	6	+2	17.5	
21	5	6	+1	7	
22	5	6	+1	7	
23	5	5	0		
24	5	6	+1	7	
25	5	6	+1	7	
26	3	5	+2	17.5	
27	6	6	0		
Total				231	0

Perhitungan:

Jumlah rangking positif = 231

} Thitung = 0

Jumlah rangking negatif = 0

n = 18 (9 orang responden memiliki selisih = 0)

T table (0,05); n = 18 → 40

Thitung < Ttabel → Tolak Ho

Jadi terjadi perubahan keadaan pangan RTM sesudah adanya program P2KP

Lampiran 5. Skor dan Rangking Keadaan Sandang RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	2	3	+1	10	
2	2	3	+1	10	
3	2	3	+1	10	
4	2	2	0		
5	2	3	+1	10	
6	2	3	+1	10	
7	2	3	+1	10	
8	2	2	0		
9	2	3	+1	10	
10	2	3	+1	10	
11	2	2	0		
12	2	3	+1	10	
13	2	3	+1	10	
14	2	2	0		
15	2	3	+1	10	
16	2	3	+1	10	
17	3	3	0		
18	2	3	+1	10	
19	2	2	0		
20	2	3	+1	10	
21	2	3	+1	10	
22	2	3	+1	10	
23	2	3	+1	10	
24	2	3	+1	10	
25	2	2	0		
26	2	2	0		
27	2	3	+1	10	
Total				190	0

Perhitungan:

Jumlah rangking positif = 190

Jumlah rangking negatif = 0

$n = 19$ (8 orang responden memiliki selisih = 0)

$T_{table}(0,05); n = 19 \rightarrow 46$

$Thitung < T_{tabel} \rightarrow \text{Tolak } H_0$

Jadi terjadi perubahan keadaan sandang RTM sesudah program P2KP

} $Thitung = 0$

Lampiran 6. Skor dan Rangkings Keadaan Papan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	14	15	+1	5.5	
2	15	18	+3	24.5	
3	16	17	+1	5.5	
4	10	11	+1	5.5	
5	17	18	+1	5.5	
6	17	18	+1	5.5	
7	14	16	+2	16.5	
8	13	15	+2	16.5	
9	17	18	+1	5.5	
10	16	18	+2	16.5	
11	13	16	+3	24.5	
12	14	17	+3	24.5	
13	17	18	+1	5.5	
14	14	16	+2	16.5	
15	17	18	+1	5.5	
16	14	16	+2	16.5	
17	14	16	+2	16.5	
18	14	16	+2	16.5	
19	14	17	+3	24.5	
20	13	15	+2	16.5	
21	14	16	+2	16.5	
22	17	18	+1	5.5	
23	16	16	0		
24	14	16	+2	16.5	
25	14	16	+2	16.5	
26	14	16	+2	16.5	
27	16	17	+1	5.5	
Total				351	0

Perhitungan:

$n > 25$ maka menggunakan rumus Tes Rangkings Bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan

Jumlah rangkings positif = 351

Jumlah rangkings negatif = 0

$n = 26$ (1 orang responden memiliki selisih = 0)

$\mu T = n(n+1)/4 = 26(26+1)/4 = 175,5$

$\sigma_T = \sqrt{N(N+1)(2N+1)/24} = \sqrt{26(26+1)(2.26+1)/24} = \sqrt{1550,25} = 39,37$

$Z = |(T - \mu T) / \sigma T| = |(0 - 175,5) / 39,37|$ **Zhit = 4,457**

Z tabel (0,05) = 1,64, Jadi Z hit > Z tabel maka tolak H_0 , ini berarti terjadi perubahan keadaan papan RTM sesudah program P2KP.

Lampiran 7. Skor dan Rangking Kesehatan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	2	2	0		
2	2	3	+1	3.5	
3	2	2	0		
4	1	2	+1	3.5	
5	2	3	+1	3.5	
6	2	2	0		
7	2	2	0		
8	1	2	+1	3.5	
9	2	2	0		
10	2	2	0		
11	2	2	0		
12	2	2	0		
13	2	3	+1	3.5	
14	2	2	0		
15	2	3	+1	3.5	
16	2	2	0		
17	2	2	0		
18	2	2	0		
19	2	2	0		
20	2	2	0		
21	2	2	0		
22	2	2	0		
23	2	2	0		
24	2	2	0		
25	2	2	0		
26	2	2	0		
27	2	2	0		
Total				21	0

Perhitungan:

Jumlah rangking positif = 21

Thitung = 0

Jumlah rangking negatif = 0

$n = 6$ (21 orang responden memiliki selisih = 0)

T table (0,05); $n = 6 \rightarrow 0$

Thitung = Ttabel \rightarrow Tolak Ho

Jadi tidak terjadi perubahan keadaan kesehatan RTM sesudah program P2KP

Lampiran 8. Skor dan Rangking Pendidikan RTM Sebelum dan Sesudah Program P2KP

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	3	3	0		
2	3	3	0		
3	3	3	0		
4	2	3	+1	2.5	
5	3	3	0		
6	3	3	0		
7	3	3	0		
8	2	3	+1	2.5	
9	3	3	0		
10	3	3	0		
11	3	3	0		
12	3	3	0		
13	3	3	0		
14	3	3	0		
15	3	3	0		
16	3	3	0		
17	3	3	0		
18	3	3	0		
19	2	3	+1	2.5	
20	3	3	0		
21	3	3	0		
22	3	3	0		
23	3	3	0		
24	3	3	0		
25	3	3	0		
26	2	3	+1	2.5	
27	3	3	0		
Total				10	0

Perhitungan:

Jumlah rangking positif = 10

} Thitung = 0

Jumlah rangking negatif = 0

n = 4 (23 orang responden memiliki selisih = 0)

T table (0,05); n = 4 → 0

Thitung = Ttabel → Terima H₀

Jadi tidak terjadi perubahan keadaan pendidikan RTM sesudah program P2KP

**Lampiran 9. Skor dan Ranking Perubahan Kesejahteraan Keluarga RTM
Sebelum dan sesudah Program P2KP**

No. Responden	Total Sebelum	Total Sesudah	Beda	Pangkat	
				Positif	Negatif
1	32	39	+7	16	
2	35	45	+10	26.5	
3	37	40	+3	1.5	
4	22	29	+7	16	
5	36	46	+10	26.5	
6	35	41	+6	9.5	
7	32	39	+7	16	
8	28	37	+9	24.5	
9	37	44	+7	16	
10	35	43	+8	22	
11	31	35	+4	4	
12	34	41	+7	16	
13	37	42	+5	6.5	
14	34	38	+4	4	
15	37	46	+9	24.5	
16	32	38	+6	9.5	
17	33	40	+7	16	
18	32	39	+7	16	
19	31	39	+8	22	
20	33	40	+7	16	
21	34	40	+6	9.5	
22	35	41	+6	9.5	
23	37	40	+3	1.5	
24	33	41	+8	22	
25	34	39	+5	6.5	
26	30	37	+7	16	
27	35	39	+4	4	
Total				378	0

Ket:

$$3 = 1+2 = 3/2 = 1.5$$

$$4 = 3+4+5 = 12/3 = 4$$

$$5 = 6+7 = 13/2 = 6.5$$

$$6 = 8+9+10+11 = 38/4 = 9.5$$

$$7 = 12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 144/9 = 16$$

$$8 = 21+22+23 = 66/3 = 22$$

$$9 = 24+25 = 49/2 = 24.5$$

$$10 = 26+27 = 53/2 = 26.5$$

Perhitungan:

$n > 25$ maka menggunakan rumus Tes Rangkings Bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan

Jumlah rangking positif = 378

Jumlah rangking negatif = 0

$n = 27$ (tidak ada responden yang memiliki selisih = 0)

$$\mu T = n(n+1)/4$$

$$= 27(27+1)/4$$

$$= 189$$

$$\sigma_T = \sqrt{N(N+1)(2N+1)/24}$$

$$= \sqrt{27(27+1)(2 \cdot 27+1)/24}$$

$$= \sqrt{1732,5}$$

$$= 41,62$$

$$|Z| = |(T - \mu_T) / \sigma_T|$$

$$|Z| = |(0 - 189) / 41,62|$$

$$Z_{hit} = |4,541|$$

Z tabel (0,05) = 1,64, Jadi Z hit > Z tabel maka tolak Ho, ini berarti terjadi perubahan kesejahteraan rumah tangga miskin anggota sesudah program P2KP.



Lampiran 10. Perhitungan Tingkat Kesejahteraan RTM Responden Sebelum Pelaksanaan P2KP di Desa Wandanpuro Kec Bululawang

No	Nama Responden	Kepemilikan Aset						Keadaan Pangan			Keadaan Sandang	Keadaan Papan							Kesehatan	Pendidikan	Total
		1	2	3	4	5	Jml	1	2	Jml		1	2	3	4	5	6	Jml			
1	Sumarlik	1	2	1	1	2	7	2	2	4	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	32
2	Jaenap	1	2	1	2	2	8	3	2	5	2	3	2	3	2	2	3	15	2	3	35
3	Hari Santoso	2	1	2	1	2	8	3	3	6	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	37
4	Karmidjan	1	1	1	1	1	5	1	1	2	2	1	1	1	3	2	2	10	1	2	22
5	Astikah	1	1	1	2	2	7	3	2	5	2	3	2	3	3	3	3	17	2	3	36
6	Supeno	1	1	1	2	2	7	2	2	4	2	3	2	3	3	3	3	17	2	3	35
7	Djarwadi	2	1	1	1	2	7	2	2	4	2	2	2	2	3	2	3	14	2	3	32
8	Ramu	1	1	1	1	2	6	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	13	1	2	28
9	Nurul L	2	1	2	1	2	8	3	2	5	2	3	3	2	3	3	3	17	2	3	37
10	Sugiarti	2	1	1	1	2	7	3	2	5	2	3	2	3	3	2	3	16	2	3	35
11	Ismiwati	1	1	1	1	2	6	3	2	5	2	2	1	3	3	2	2	13	2	3	31
12	Supani	1	1	2	1	2	7	3	3	6	2	2	2	3	3	2	2	14	2	3	34
13	Ririn Indrawati	1	1	2	1	2	7	3	3	6	2	3	2	3	3	3	3	17	2	3	37
14	Sri Astuti	2	1	2	2	2	9	2	2	4	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	34
15	Sulikah	1	1	2	2	2	8	3	2	5	2	3	3	3	3	2	3	17	2	3	37
16	Agus Suyitno	1	1	1	1	2	6	3	2	5	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	32
17	Sumiatun	1	1	1	2	2	7	2	2	4	3	2	2	2	3	3	2	14	2	3	33
18	Asmani	1	1	1	1	2	6	3	2	5	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	32
19	Listyaningghih	1	1	2	1	2	7	2	2	4	2	2	2	2	3	2	3	14	2	2	31
20	Subani	1	2	2	2	2	9	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	13	2	3	33
21	Tuni	1	1	2	2	2	8	3	2	5	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	34
22	Lailiyah	1	1	1	1	2	6	2	3	5	2	3	3	3	3	3	2	17	2	3	35
23	Wiwik Endang	2	1	1	2	3	9	3	2	5	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	37
24	Sugina	2	1	1	1	2	7	3	2	5	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	33
25	Siti Aisah	1	2	1	2	2	8	3	2	5	2	2	2	2	3	3	2	14	2	3	34
26	Suryadi	2	1	1	1	2	7	2	1	3	2	2	1	3	3	3	2	14	2	2	30
27	Atim Supriyanto	1	1	1	1	2	6	3	3	6	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	35
Jumlah		35	31	36	37	54	193	69	57	126	55	61	54	66	80	71	66	398	52	77	901
Rata-rata		1.30	1.15	1.33	1.37	2.00	7.15	2.56	2.11	4.67	2.04	2.26	2.00	2.44	2.96	2.63	2.44	14.74	1.93	2.85	33.37
Persentase (%)		43.21	38.27	44.44	45.68	66.67	47.65	85.19	70.37	77.78	67.90	75.31	66.67	81.48	98.77	87.65	81.48	81.89	64.20	95.06	69.52

Lampiran 11. Perhitungan Tingkat Kesejahteraan RTM Responden Sesudah Pelaksanaan P2KP di Desa Wandanpuro Kec Bululawang

No	Nama Responden	Kepemilikan Aset						Keadaan Pangan			Keadaan Sandang	Keadaan Papan						Kesehatan	Pendidikan	Total	
		1	2	3	4	5	Jml	1	2	Jml		1	2	3	4	5	6				Jml
1	Sumarlik	1	2	2	2	3	10	3	3	6	3	2	2	2	3	3	3	15	2	3	39
2	Jaenap	1	3	2	3	3	12	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	45
3	Hari Santoso	2	1	2	2	2	9	3	3	6	3	2	3	3	3	3	3	17	2	3	40
4	Karmidjan	1	1	1	1	3	7	2	2	4	2	1	2	1	3	2	2	11	2	3	29
5	Astikah	3	2	2	3	3	13	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	46
6	Supeno	1	2	2	2	2	9	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	2	3	41
7	Djarwadi	2	1	2	2	2	9	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	39
8	Ramu	1	2	2	2	2	9	3	3	6	2	2	2	3	3	3	2	15	2	3	37
9	Nurul L	2	3	2	2	3	12	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	2	3	44
10	Sugiarti	2	2	2	2	3	11	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	2	3	43
11	Ismiwati	1	1	1	2	2	7	3	2	5	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	35
12	Supani	2	1	2	2	3	10	3	3	6	3	2	3	3	3	3	3	17	2	3	41
13	Ririn Indrawati	1	1	3	2	2	9	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	42
14	Sri Astuti	2	2	2	2	2	10	3	2	5	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	38
15	Sulikah	2	2	3	3	3	13	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	46
16	Agus Suyitno	1	1	2	2	2	8	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	38
17	Sumiatun	2	2	2	2	2	10	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	40
18	Asmani	1	2	2	2	2	9	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	39
19	Listyaninggih	1	2	2	2	3	10	3	2	5	2	2	3	3	3	3	3	17	2	3	39
20	Subani	2	2	2	2	3	11	3	3	6	3	2	2	2	3	3	3	15	2	3	40
21	Tuni	1	2	2	2	3	10	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	40
22	Lailiyah	1	2	2	2	2	9	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	18	2	3	41
23	Wiwik Endang	3	1	2	2	3	11	3	2	5	3	1	3	3	3	3	3	16	2	3	40
24	Sugina	2	2	2	2	3	11	3	3	6	3	2	2	3	3	3	3	16	2	3	41
25	Siti Aisah	2	2	2	2	2	10	3	3	6	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	39
26	Suryadi	3	1	1	1	3	9	3	2	5	2	2	2	3	3	3	3	16	2	3	37
27	Atim Supriyanto	1	1	2	2	2	8	3	3	6	3	2	3	3	3	3	3	17	2	3	39
Jumlah		44	46	53	55	68	266	80	75	155	74	60	67	77	81	80	79	444	58	81	1078
Rata-rata		1.63	1.70	1.96	2.04	2.52	9.85	2.96	2.78	5.74	2.74	2.22	2.48	2.85	3.00	2.96	2.93	16.44	2.15	3.00	39.93
Persentase (%)		54.32	56.79	65.43	67.90	83.95	65.68	98.77	92.59	95.68	91.36	74.07	82.72	95.06	100.0	98.77	97.53	91.36	71.60	100.00	83.18

Lampiran 12. Nilai T_{α} Untuk Uji Pangkat-Bertanda Wilcoxon

N	Tingkat Signifikansi Untuk Test Satu Pihak		
	0.025	0.01	0.005
	Tingkat Signifikansi Untuk Test Satu Pihak		
	0.05	0.02	0.01
6	0		
7	2	0	
8	4	2	0
9	6	3	2
10	8	5	3
11	11	7	5
12	14	10	7
13	17	13	10
14	21	16	13
15	25	20	16
16	30	24	20
17	35	28	23
18	40	33	28
19	46	38	32
20	52	43	38
21	59	49	43
22	66	56	49
23	73	62	55
24	81	69	61
25	89	77	68

Sumber : Sugiyono "Statistik Nonparametris"

Sedangkan untuk nilai z tabel, untuk $z_{0,05} = 1,64$; $z_{0,025} = 1,96$ dan $z_{0,005} = 2,58$.

Lampiran 13. Foto Hasil Penelitian



a. Program P2KP untuk Pembangunan Polindes



b. Program P2KP untuk Paving Jalan



c. Program P2KP untuk Pembangunan Perbaikan Drainase



d. Program P2KP untuk Pengaspalan Jalan

Lampiran 14. Kuisisioner Penelitian

No :

KUISISIONER

**“PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN”
(Studi Kasus di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**

I). IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama Responden :
- b. Umur (Tahun) :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan
1. Utama :
2. Sampingan :
- e. Pendidikan formal terakhir :
- f. Status dalam kelompok :
- g. Jumlah anggota keluarga :
- h. Alamat :
- i. KSM :



II). PROSES PELAKSANAAN PROGRAM P2KP

1. Sosialisasi

Apa saja kegiatan sosialisasi program P2KP yang telah dilakukan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Sosialisasi Program P2KP	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

2. Rembuk Kesiapan Masyarakat

Apa saja kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat yang telah dilakukan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

3. Refleksi Kemiskinan

Apa saja kegiatan Refleksi Kemiskinan yang telah dilakukan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Refleksi Kemiskinan	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

4. Pemetaan Swadaya

Apa saja kegiatan Pemetaan Swadaya yang telah dilakukan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Pemetaan Swadaya	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

5. Pembentukan Badan Kswadayaan Masyarakat

Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka Pembentukan Badan Kswadayaan Masyarakat dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Langkah Pembentukan Badan Kswadayaan Masyarakat	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

6. Penyusunan Rencana kerja Kelompok

Apa saja kegiatan Penyusunan Rencana kerja Kelompok yang telah dilakukan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Kelompok	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

7. Pelaksanaan Program P2KP

a). Pemberdayaan Manusia

Apa saja kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Manusia dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Pemberdayaan Manusia	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

2). Pemberdayaan Usaha

Apa saja kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Pemberdayaan Usaha	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

3). Pemberdayaan Lingkungan

Apa saja kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Lingkungan dan bagaimana tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan ini?

No	Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan	Dilaksanakan (Ya/Tdk)	Keikutsertaan (Ya/Tdk)
1			
2			
3			

III. TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN PESERTA PROGRAM P2KP

No	Indikator	Sebelum P2KP	Skor	Sesudah P2KP	Skor
A	Kepemilikan aset anggota P2KP				
1	Berapa luas kepemilikan tanah/lahan bapak/ibu?	a. > 0,77ha b. 0,33 – 0,77ha c. < 0,33ha Alasan :		a. > 0,77ha b. 0,33 – 0,77ha c. < 0,33ha Alasan :	
2	Apa ternak yang bapak/ibu miliki?	d. Sapi (.....ekor) e. Kambing (.....ekor) f. Ayam (.....ekor) Alasan :		a. Sapi (.....ekor) b. Kambing (.....ekor) c. Ayam (.....ekor) Alasan :	
3	Apa alat transportasi yang bapak/ibu miliki?	d. Mobil, sepeda motor, sepeda (.....Unit) e. Sepeda motor, sepeda (.....Unit) f. Sepeda (.....Unit) Alasan :		a. Mobil, sepeda motor, sepeda (.....Unit) b. Sepeda motor, sepeda (.....Unit) c. Sepeda (.....Unit) Alasan :	
4	Apa alat komunikasi yang bapak/ibu miliki?	a. Telepon rumah dan telepon genggam b. Telepon rumah atau telepon genggam saja c. Tidak punya Alasan :		a. Telepon rumah dan telepon genggam b. Telepon rumah atau telepon genggam saja c. Tidak punya Alasan :	
5	Apa alat hiburan / media massa/ elektronik yang bapak/ibu miliki?	a. TV, DVD, Tape, radio (.....unit) b. TV dan Radio (.....unit) c. Radio atau Tape (.....unit)		a. TV, DVD, Tape, radio (.....unit) b. TV dan Radio (.....unit) c. Radio atau Tape (.....unit)	

		Alasan :.....	Alasan :.....	
B	Keadaan Pangan Anggota Program P2KP			
1	Berapa kali frekuensi makan anggota keluarga bapak/ibu dalam 1 hari	d. Frekuensi makan lebih dari 2 kali sehari e. Frekuensi makan 2 kali dalam sehari f. Frekuensi makan kurang dari 2 kali sehari Alasan :.....	a. Frekuensi makan lebih dari 2 kali sehari b. Frekuensi makan 2 kali dalam sehari c. Frekuensi makan kurang dari 2 kali sehari Alasan :.....	
2	Bagaimana biasanya konsumsi (Makan) daging atau ikan atau telur dalam keluarga bapak/ibu?	a. Setiap hari b. Seminggu sekali c. 2 minggu sekali Alasan :.....	a. Setiap hari b. Seminggu sekali c. 2 minggu sekali Alasan :.....	
C	Keadaan Sandang anggota P2KP			
1	Bagaimana keadaan sandang (pakaian) bapak/ibu?	a. Lebih dari cukup (masing-masing anggota keluarga mendapatkan 2 stel pakaian baru dalam 1 tahun) b. Cukup (masing-masing anggota keluarga hanya mendapatkan 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun) c. Kurang (masing-masing anggota keluarga tidak mendapatkan pakaian baru dalam 1 tahun) Alasan :.....	a. Lebih dari cukup (masing-masing anggota keluarga mendapatkan 2 stel pakaian baru dalam 1 tahun) b. Cukup (masing-masing anggota keluarga hanya mendapatkan 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun) c. Kurang (masing-masing anggota keluarga tidak mendapatkan pakaian baru dalam 1 tahun) Alasan :.....	

D	Keadaan Papan anggota P2KP			
1	Berapa luas rumah yang bapak/ibu tinggali?	a. Lebih besar dari 8 m ² . (.....m ²) b. Standart 8m ² (.....m ²) c. Lebih kecil dari 8 m ² . (.....m ²) Alasan :.....	a. Lebih besar dari 8 m ² . (.....m ²) b. Standart 8m ² (.....m ²) c. Lebih kecil dari 8 m ² . (.....m ²) Alasan :.....	
2	Bagaimana keadaan lantai rumah bapak/ibu?	d. Lantai keramik/tegel e. Plester semen f. Tanah Alasan :.....	a. Lantai keramik/tegel b. Plester semen c. Tanah Alasan :.....	
3	Bagaimana keadaan tembok rumah bapak/ibu?	d. Tembok plester e. Tembok tidak plester f. Gedheg/papan Alasan :.....	a. Tembok plester b. Tembok tidak plester c. Gedheg/papan Alasan :.....	
4	Bagaimana keadaan atap rumah bapak/ibu?	a. Genteng b. Seng c. Ijuk Alasan :.....	a. Genteng b. Seng c. Ijuk Alasan :.....	
5	Bagaimana keadaan penerangan rumah bapak/ibu?	a. Listrik pasang sendiri b. Listrik ikut orang lain c. Petromak	a. Listrik pasang sendiri b. Listrik ikut orang lain c. Petromak	

		Alasan :.....	Alasan :.....	
6	Bagaimana persediaan air bersih dan sarana MCK rumah bapak/ibu?	a. Memiliki air bersih dan MCK sendiri b. Memiliki air bersih dan MCK milik umum c. Tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya Alasan :.....	a. Memiliki air bersih dan MCK sendiri b. Memiliki air bersih dan MCK milik umum c. Tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya Alasan :.....	
E	Tingkat Kesehatan anggota P2KP			
1	Apa layanan pengobatan yang sering digunakan keluarga bapak/ibu jika sakit?	d. Dokter khusus e. Puskesmas f. Dukun / tukang pijat Alasan :.....	a. Dokter khusus b. Puskesmas c. Dukun / tukang pijat Alasan :.....	
F	Tingkat Pendidikan anggota P2KP			
1	Bagaimana tingkat pendidikan anak usia sekolah keluarga bapak/ibu?	d. Semua anak usia sekolah bersekolah e. Ada anak usia sekolah tidak bersekolah f. Semua anak usia sekolah tidak bersekolah Alasan :.....	a. Semua anak usia sekolah bersekolah b. Ada anak usia sekolah tidak bersekolah c. Semua anak usia sekolah tidak bersekolah Alasan :.....	

